



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KOMPONEN GEOPOLITIK TERHADAP KONFLIK
DI LAUT CHINA SELATAN ANTARA CHINA-VIETNAM PADA
PERIODE 2009 – 2011**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada Program Studi Hubungan Internasional**

Nuri Widiastuti Veronika
1006743935

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Nuri Widiastuti Veronika

NPM : 1006743935

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Nuri Widiastuti Veronika
NPM : 1006743935
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Pengaruh Komponen Geopolitik Terhadap Konflik Di
Laut China Selatan Antara China-Vietnam Pada
Periode 2009 – 2011

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Fredy B.L. Tobing, (.....)
Sekretaris : Asra Virgianita, S.Sos., M.A (.....)
Pembimbing : Dr. Makmur Keliat (.....)
Penguji Ahli : Yeremia Lalisang, M.Sc (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Konflik di laut China Selatan merupakan konflik yang sangat kompleks dipandang dari berbagai perspektif. Pertama, konflik ini melibatkan beberapa negara pengklaim yaitu China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan. Kedua, laut China Selatan yang merupakan *semi-enclosed sea* yang menurut UNCLOS harus dikelola dengan kerja sama antara negara pantai, ternyata pada kenyataannya menjadi sumber konflik karena telah menjadi ajang perebutan klaim. Ketiga, konflik laut China Selatan sangatlah berkepanjangan karena belum ditemukannya penyelesaian yang memuaskan bagi semua negara pengklaim. Oleh karena kompleksitasnya ini, maka laut China Selatan menjadi subjek penelitian yang menarik.

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian mengenai laut China Selatan dengan mengkhususkan pada konflik China – Vietnam. Sebagai dua negara mengklaim keseluruhan fitur di laut China Selatan, China-Vietnam merupakan dua pengklaim yang paling sering mengalami insiden di kawasan ini. Meskipun perjanjian penyelesaian batas darat telah diselesaikan pada tahun 2009, namun perbatasan laut kedua negara ini belum terselesaikan sampai saat ini sehingga insiden masih terus terjadi. Selain itu, berbagai faktor juga mempengaruhi semakin mengemukanya konflik kedua negara ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari komponen geopolitik yaitu wilayah, energi dan power seperti yang diungkapkan oleh Ralf Emmers. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat komponen-komponen geopolitik dalam konflik di laut China Selatan antara China-Vietnam 2009 - 2011.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menyadari banyaknya keterbatasan yang dimiliki penulis baik dari segi waktu, materi maupun tenaga. Meskipun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan analisis mengenai konflik laut China Selatan antara China-Vietnam dilihat dari komponen geopolitik. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi proses pembuatan *code of conduct* di laut China Selatan yang sedang dibahas oleh para pengambil kebijakan negara-negara pengklaim khususnya China – Vietnam serta menjadi sumbangsih yang berarti bagi pengembangan ilmu hubungan internasional khususnya dalam bidang kajian keamanan.

Jakarta, 10 Juli 2012

Nuri Widiastuti Veronika

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur yang tak terkira dalamnya saya panjatkan kepada Tuhan Yang Mahaesa karena atas kasih karunia-Nya yang besar saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Makmur Keliat, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan memberikan inspirasi saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Dr. Drs. Fredy B.L. Tobing, M.Si selaku ketua sidang tesis, *Mas* Yeremia Lalisang, M.Sc, selaku penguji ahli dan *mbak* Asra Virgianita, S.Sos, M.A., selaku sekretaris sidang yang telah bersedia memberikan masukan, saran dan pengetahuan untuk membantu saya memperbaiki kualitas tesis ini.
- (3) Ketua Departemen HI dan Ketua Program Pasca Sarjana HI serta segenap pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan FISIP UI yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan selama menjalani masa studi di Universitas Indonesia
- (4) *Mbak* Ice dan Pak Udin, selaku staf di Program Pasca Sarjana HI yang selalu setia melayani segala permintaan dan keluh kesah saya selama menjalani masa studi saya di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI.
- (5) Orang tua tercinta, F.X. Purwadi dan C. Rusmiyati yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan semangat dalam melaksanakan pendidikan di Universitas Indonesia dan dalam menyusun tesis ini.
- (6) Kakak saya, G. Andi Yunanto, yang selalu siap menjadi ‘kakak siaga’ untuk mendukung dan menyemangati saya di saat jatuh bangun dalam menjalankan dua tahun masa studi di Universitas Indonesia.

- (7) Suami tercinta, F.A. Sigit Cahyono, belahan jiwa yang selalu memberikan dukungan, semangat dan cintanya yang tak terbatas selama menjalankan masa studi dan menyelesaikan tesis ini.
- (8) Segenap atasan dan kolega saya di Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang telah mendukung saya dalam menjalankan tugas belajar dan memberikan pengertian bagi kelancaran penulisan tesis ini.
- (9) Segenap staf dari *Beasiswa Unggulan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menyediakan bantuan biaya pendidikan sehingga saya dapat mengikuti masa studi di Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.
- (10) Teman-teman Pasca Sarjana Hubungan Internasional UI 2010, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas persahabatan, dan keakraban yang saya terima selama menjalankan masa studi. Segala canda tawa dan duka cita yang kita lewati selama 2 tahun ini akan menjadi kenangan indah bagi saya dalam kehidupan saya selanjutnya.
- (11) Terakhir, untuk master kecil terhebat dan paling sempurna yang Tuhan anugerahkan pada saya, Aletta Nusantarasya Kirana, atas kekuatan dan kesabaran yang luar biasa dalam menemani mamanya saat berjuang mengerjakan tesis ini. *She's the best miracle that God has sent me in this world.*

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Baik berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jakarta, 10 Juli 2012

Nuri Widiastuti Veronika

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuri Widiastuti Veronika
NPM : 1006743935
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Komponen Geopolitik Terhadap Konflik Di Laut China Selatan Antara China-Vietnam Pada Periode 2009 – 2011

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan



(Nuri Widiastuti Veronika)

ABSTRAK

Nama : Nuri Widiastuti Veronika
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pengaruh Komponen Geopolitik Terhadap Konflik Di Laut China Selatan Antara China-Vietnam Pada Periode 2009 – 2011

Tesis ini membahas tentang pengaruh komponen – komponen geopolitik yaitu wilayah, energi dan power terhadap sengketa teritorial di Laut China Selatan antara China dan Vietnam periode 2009 – 2011. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif untuk menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel serta menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga komponen geopolitik mempengaruhi sengketa teritorial di Laut China Selatan . Pertama, komponen wilayah yang dijelaskan melalui kedekatan geografis dan panjang garis pantai menunjukkan adanya klaim kepemilikan dan tingkat resiko bagi apabila terjadi sengketa di kawasan tersebut. Kedua, komponen energi yang dijelaskan melalui pengukuran tingkat pemenuhan kebutuhan energi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan energi mempengaruhi eskalasi konflik akibat eksplorasi energi di kawasan yang masih menjadi sengketa. Sedangkan komponen power, kapabilitas militer yang kuat menimbulkan peningkatan agresivitas China – Vietnam untuk mengklaim kawasan LCS. Selain itu, strategi China – Vietnam untuk mempertahankan klaim juga mempengaruhi hubungan konfliktual di antara kedua negara ini.

Kata kunci: *Geopolitik, sengketa teritorial, Laut China Selatan, China, Vietnam.*

ABSTRACT

Name : Nuri Widiastuti Veronika
Study Program : Ilmu Hubungan Internasional
Title : The Impact of Components of Geopolitics towards The Territorial Dispute in the South China Sea between China – Vietnam in the Period of 2009 – 2011

The focus of this study is analyzing the impact of the components of geopolitics i.e. territory, energy and power toward the territorial dispute between China and Vietnam in the South China Sea at the period of 2009 – 2011. This study is quantitative research that aims to analyze the causal relationship between each variable. This study summarize that the component of geopolitics give impact to the conflict escalation in the South China Sea dispute between Vietnam and China. In terms of territory, the geographic proximity and the coastline have explained the ownership claim and the country's risk should the dispute escalate into large-scale conflict or even war. In terms of energy, the rate of energy sufficiency ability gives impact to the dispute since it will cause a country to explore the disputed area in order to fulfill the energy demand. And in terms of power, the military capability has been the basis for China-Vietnam to act aggressively in the South China Sea. In addition, China – Vietnam have also chosen different strategies to maintain their claims that in turns gives impact to the conflicting relationship among them.

Keywords: *Geopolitics, territorial dispute, South China Sea, China, Vietnam*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Signifikansi Penelitian.....	11
1.4 Tinjauan Pustaka	11
1.5 Kerangka Pemikiran	21
1.6 Metode Penelitian.....	29
1.7 Operasionalisasi Konsep	31
1.8 Model Analisis	33
1.9 Hipotesis.....	36
1.10. Sistematika Pembabakan.....	37
2. GAMBARAN UMUM, DINAMIKA KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN DAN HUBUNGAN BILATERAL CHINA-VIETNAM	38
2.1 Gambaran Umum Laut China Selatan.....	38
2.1.1 Topografi Laut China Selatan	38
2.1.2 Potensi Penting Laut China Selatan: Letak Strategis dan Sumber Daya Alam.....	39
2.1.3 Dinamika Konflik di Laut China Selatan.....	43
2.2 Hubungan Bilateral China – Vietnam Terkait konflik di Laut China Selatan	58

2.2.1 Fase-fase Perkembangan Hubungan Bilateral China – Vietnam: Kemajuan Positif dan Interdependensi	58
2.2.2 Asimetri dalam Hubungan Bilateral China-Vietnam.....	63
2.2.3 Masalah Perbatasan di Laut China Selatan antara China -Vietnam	66

3. PENGARUH KOMPONEN WILAYAH DAN ENERGI TERHADAP KONFLIK CHINA – VIETNAM DI LAUT CHINA SELATAN PERIODE 2009

- 2011	74
3.1 Wilayah	75
3.1.1 Pengaruh Jarak terhadap Konflik	76
3.1.2 Pengaruh Panjang Garis Pantai terhadap Konflik.....	81
3.2 Energi	88
3.2.1 Gambaran Umum Situasi Energi Vietnam.....	89
3.2.2 Gambaran Umum Situasi Energi China	92
3.2.3 Pengaruh Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi terhadap konflik	95

4. PENGARUH POWER TERHADAP KONFLIK CHINA – VIETNAM DI LAUT CHINA SELATAN PERIODE 2009 - 2011

4.1 Kapabilitas Angkatan Laut China – Vietnam.....	101
4.2 Tingkat Agresivitas	105
4.3 Strategi China – Vietnam untuk Mempertahankan Klaim di LCS.....	111
4.3.1 Strategi Vietnam.....	111
4.3.2 Strategi Vietnam.....	113

5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

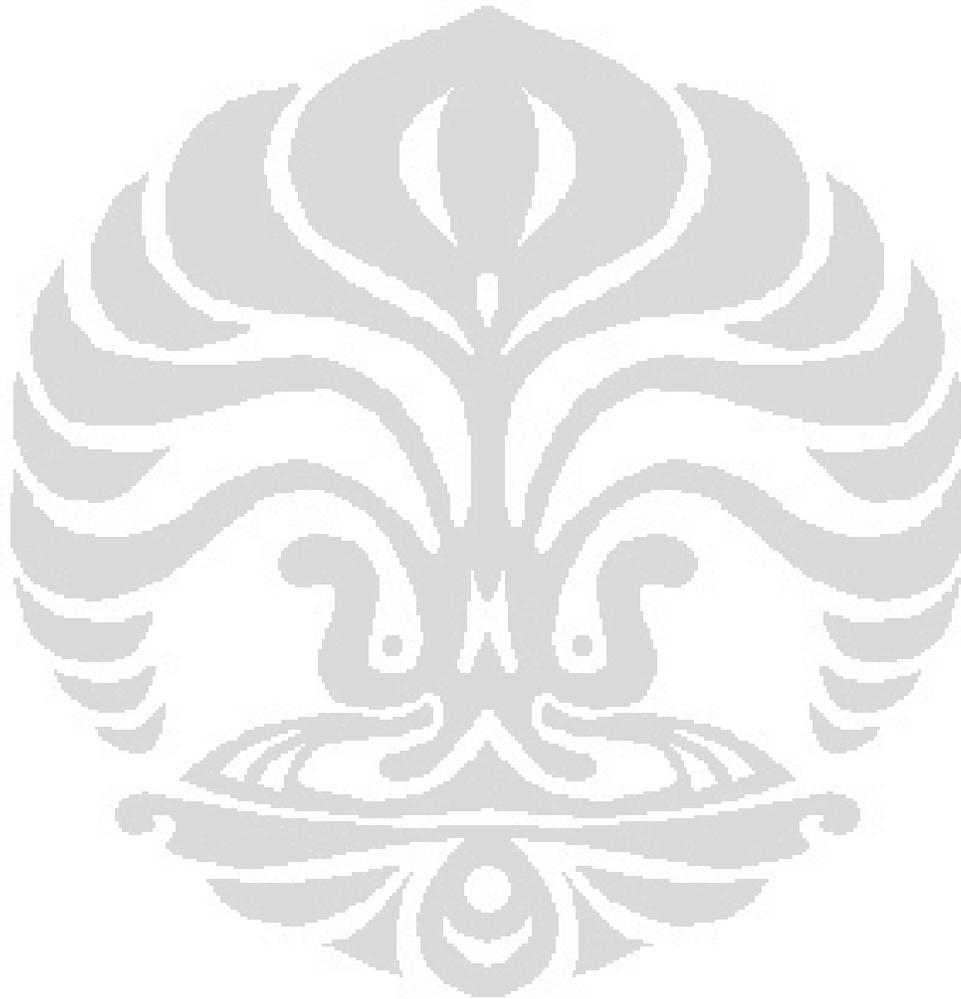
Gambar

1.1 Kawasan Laut China Selatan dan Wilayah Sengketa.....	3
1.2 Evolusi Tahapan Sengketa Internasional	24
1.3 Model Analisis	35
2.1 Peta Potensi Sumber daya minyak dan gas	42
2.2. Tumpang Tindih Klaim di Spratly dan Paracel.....	47
2.3. Nilai Perdagangan Bilateral China – Vietnam dari 1999 - 2011.....	61
2.4. Partner Dagang Vietnam pada 2010.....	61
2.5. Matriks Temuan Bab 2	73
3.1 Peta jarak Vietnam-China ke Kepulauan Paracel dan Spratly	77
3.2 Garis Pantai China-Vietnam yang berbatasan dengan LCS.....	84
3.3. Konsumsi Minyak Vietnam.....	90
3.4 Produksi Energi Vietnam	90
3.5 Produksi dan Konsumsi Energi Vietnam 1990-2011	91
3.6 Produksi Energi China 1971-2009	93
3.7 Konsumsi Minyak China 1971-2009	94
3.8. Gap antara Produksi dan konsumsi Energi China	94
3.9 Matriks Temuan Bab 3	99
4.1 Daftar 10 negara Dengan Anggaran Pertahanan terbanyak di dunia	102
3.9 Matriks Temuan Bab 4.....	115

Tabel

1.1 Jumlah Pulau yang Diduduki di Kepulauan Spratly dan Estimasi Jumlah pasukan	4
1.2 Tinjauan Pustaka	19
2.1 Klaim Teritorial Negara-negara di Sekitar Kawasan Laut China Selatan ..	44
2.2 Insiden Konflik antar negara pengklaim Laut China Selatan sejak 1974 ..	51
3.1 Tahapan Konflik Internasional.....	74
3.2 Indikator Komponen Wilayah dan Energi.....	75
3.3 Jarak China-Vietnam ke Spratly dan Paracel	79
3.4 Skala Tahap – tahap eskalasi konflik	83
3.5 Garis Pantai China-Vietnam dari LCS	85
3.6 Pengukuran Threat (Ancaman) China – Vietnam di LCS.....	85
3.7 Pengukuran Resiko China - Vietnam	87

3.8 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi Minyak China Vietnam 2009 - 2011	96
3.8 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Gas Alam China Vietnam 2009 - 2011 ..	97
4.1. Kapabilitas Maritim China – Vietnam	103
4.2 Skala Intensitas Tindakan Negara	105
4.3 Agresivitas China – Vietnam di LCS 2009 - 2011	107



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laut menjadi sarana dimana berbagai kepentingan strategis bertemu karena laut memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dari segi politik dan keamanan, namun juga dari segi ekonomi. Dari perspektif politik dan keamanan, laut menjadi wilayah yang tak terpisahkan dari batas-batas kedaulatan negara. Perbatasan wilayah antar negara yang dihubungkan dengan laut seringkali menjadi sengketa, selain itu klaim wilayah karena kaitannya dengan posisi dan keberadaan sumber daya alam sering memicu konflik antar negara. Dari bidang ekonomi, laut merupakan sarana transportasi untuk perdagangan dimana sekitar 95% perdagangan dunia menggunakan laut sebagai jalur perdagangan antar negara. Selain itu, suplai energi yang menyokong sebuah negara juga menggunakan laut sebagai jalur transportasi energi, mulai dari pengiriman melalui kapal-kapal tanker, kapal pengangkut gas alam, hingga jalur pipa-pipa minyak dan gas yang tertanam di dalam laut.

Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang politik, keamanan maupun ekonomi, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat dalam penentuan perbatasan maritim antar negara. Landasan hukum yang digunakan oleh negara-negara dalam menetapkan perbatasan laut adalah keputusan PBB dalam Hukum laut Jenewa 1958 (Hukum Laut I) yang diperbaharui dengan Konvensi PBB 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Konvensi ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut yang seringkali dimanfaatkan terutama oleh negara pantai untuk menekankan segi kepentingan nasionalnya. Akan tetapi dalam perkembangannya, landasan hukum tentang pengaturan perbatasan maritim ini seringkali diabaikan oleh negara-negara yang bertetangga secara maritim sehingga menimbulkan sengketa akibat adanya benturan kepentingan antara satu negara dengan negara lain. Permasalahan perbatasan maritim yang tidak dapat diselesaikan ini berpotensi menimbulkan friksi dan sengketa yang dapat mengarah pada konflik

internasional.¹ Konflik ini kemudian dapat mempengaruhi kondisi keamanan dan kestabilan di suatu kawasan seperti halnya yang dialami oleh kawasan Asia Pasifik.

Sebagai satu-satunya kawasan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, kawasan Asia Pasifik seringkali dipandang sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik dengan dasar keseimbangan kawasan yang tergolong rapuh. Sistem pemerintahan yang demokratis dan otoriter, laju perekonomian yang bervariasi dari berkembang sampai maju serta keberadaan beberapa kekuatan besar dunia seperti AS, China, dan Jepang membuat kontestasi politik dan ekonomi di kawasan ini menjadi satu hal yang tidak terhindarkan. Selain itu, isu keamanan tradisional yang berkaitan dengan konflik perbatasan wilayah atau konflik territorial yang terjadi di wilayah perairan di beberapa sub-region di kawasan Asia Pasifik telah menjadi isu utama yang menjadikan kawasan ini mengalami ketidakstabilan berkepanjangan.

Salah satu konflik territorial yang mengemuka di kawasan Asia Pasifik adalah konflik maritim di laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara yaitu China, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sengketa perbatasan yang terjadi di laut China Selatan merupakan sengketa kepemilikan atas dua kepulauan utama di laut China Selatan yaitu kepulauan Spratly dan Paracel. Spratly diklaim oleh China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Sementara itu, Paracel diklaim oleh China, Taiwan dan Vietnam dan sejak tahun 1974 telah dimasukkan sebagai wilayah China meskipun Vietnam juga mengklaim pulau ini sebagai bagian dari wilayahnya². Gambar di bawah menunjukkan kawasan yang masih menjadi sengketa di kedua kepulauan tersebut³.

¹ Wawan Fahrudin, "Sekuritisasi Maritim Dan Wilayah Perbatasan", *Institute For Global Justice* (9 Maret 2007), hlm. 16-18.

² Ralf Emmers, "Maritime Disputes in the South China Sea: Strategic and Diplomatic Status Quo", *IDSS Working Paper No.87*, (Singapura: Institute of Defence and Strategic Studies, September 2005), hlm.1

³ Peta diperoleh dari alamat <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/images/south-china-sea-claims3.gif> diakses pada 3 Januari 2012 pukul 13.30 WIB.

Gambar 1.1 Kawasan Laut Cina Selatan dan Wilayah Sengketa



Sengketa di kedua kepulauan tersebut sangatlah kompleks akibat banyaknya jumlah negara yang memperebutkan kedua pulau tersebut dan ketidakjelasan maupun ambiguitas Hukum Laut Internasional dimana tidak ada panduan mengenai situasi dimana terjadi *overlap* antara klaim wilayah laut, pulau-pulau dan Zona Ekonomi Eksklusif⁴. Menurut Emmers (2010), sengketa ini menjadi semakin kompleks akibat pentingnya potensi kawasan di kedua pulau tersebut yaitu pentingnya kedua pulau sebagai dasar legal untuk menentukan wilayah kedaulatan negara-negara pengklaim, potensi ikan maupun cadangan migas serta akses kebebasan navigasi untuk kapal-kapal komersial yang sangat penting untuk perdagangan internasional.

Klaim teritorial di kawasan laut China Selatan menempati posisi yang sangat penting bagi beberapa negara pengklaim, khususnya China dan Vietnam. Di antara beberapa negara yang memiliki sengketa teritorial maritim di laut China Selatan, China dan Vietnam merupakan dua negara yang sama-sama mengklaim keseluruhan pulau-pulau di kepulauan Spratly dan Paracel. Hal inilah yang menyebabkan China

⁴ Leszek Buszynski, "Can the South China Sea Dispute be Resolved? ASEAN's Choices Before an Assertive China" *Paper*, Seminar on South China Sea, CASS dan The Habibie Centre, (Jakarta, 31 Mei 2011), hlm. 1

dan Vietnam paling sering mengalami konflik terbuka terkait klaim atas kepulauan Spratly dan Paracel maupun wilayah perairan di laut China Selatan. Selain itu, kedua negara ini menempatkan pasukan di kedua kepulauan tersebut dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan negara pengklaim lainnya. Sebagai contoh, tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana China dan Vietnam sama-sama menempatkan jumlah pasukan yang berkisar antara 900 sampai 1000 personil di pulau-pulau yang menjadi bagian kepulauan Spratly.

Tabel 1.1. Jumlah Pulau yang Diduduki di Kepulauan Spratly dan Estimasi Jumlah Pasukan

Negara	Jumlah Pulau yang Diduduki	Estimasi Jumlah Pasukan di Seluruh Kawasan Yang Diduduki
Vietnam	22	900-1000
Cina	14	900-1000
Taiwan	1	500-600
Malaysia	10	230-330
Filipina	11	60-70
Brunai Darussalam	0	0

*sumber: Rommel C Banloi, "Renewed Tensions and Continuing Maritime Security Dilemma in the South China Sea: A Philippine Perspective," dalam *The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development*, (Vietnam: Diplomatic Academy of Vietnam, 2011), hlm. 5

Hubungan antara kedua negara ini juga diwarnai dengan berbagai kompleksitas, baik hubungan kerja sama setelah normalisasi hubungan pada tahun 1991 maupun hubungan ketegangan dan rawan konflik akibat hubungan bilateral

yang bersifat asimetris maupun akibat pengalaman historis kedua negara yang diwarnai permusuhan⁵.

Normalisasi hubungan antara China-Vietnam dimulai ketika China dibawah Deng Xiaoping memulai normalisasi hubungan dengan Soviet pada tahun 1982. Salah satu persyaratan yang disampaikan China adalah perlunya Soviet mengurangi pengaruhnya di Indochina yang diwujudkan dengan mengakhiri pendudukan Vietnam di Kamboja. Pada akhir November 1987, China dan Laos (yang masih dibawah kendali Vietnam) melakukan normalisasi hubungan yang menandai melunaknya hubungan Sino-Vietnam. Kemudian pada September 1990, dilaksanakan pertemuan di Chengdu, antara China-Vietnam untuk membahas pengakhiran pendudukan Vietnam di Kamboja sehingga membuka jalan normalisasi hubungan China-Vietnam. Pada November 1991, perjanjian *Paris Peace Accords* yang menentukan nasib Kamboja menjadi tahap awal perjanjian normalisasi hubungan Sino-Vietnam baik antar negara maupun antar kedua partai komunis di kedua negara⁶.

Periode 1991 sampai dengan 2000 merupakan periode restorasi hubungan baik antara kedua negara untuk membangun kembali kepercayaan kedua negara. Pada periode 1990–1992, telah dilakukan 219 kunjungan politis antara China dan Vietnam. Pemerintah kedua negara telah membuat enam *joint communiqués* atau deklarasi pada 1991, 1992, 1994, 1995, 1999, dan 2000 dengan tujuan memperjelas arah hubungan bilateral. Pada tahun 2000, pemerintah kedua negara menandatangani perjanjian perbatasan di Beibu Gulf dan kerjasama bidang perikanan yang dilanjutkan dengan deklarasi kerjasama komprehensif. Selain itu, hubungan kedua negara yang semakin membaik terlihat dengan adanya perjanjian yang ditandatangani kedua negara pada

⁵ Pengalaman sejarah kedua negara menunjukkan bahwa hubungan Vietnam dan China telah mengalami dinamika kompleks sejak kekaisaran China dan hubungan yang ekstrim (permusuhan maupun persahabatan) selama 60 tahun terakhir telah menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat Vietnam terhadap China. Terdapat pandangan bahwa China cenderung menindas dan berupaya mengontrol Vietnam secara politik sehingga menimbulkan kemarahan dan kebencian kepada China. Baca lebih lanjut di “Conflict in the South China Sea: China’s Relations with Vietnam and the Philippines” oleh Ian Storey. April 30, 2008 diakses melalui <http://www.japanfocus.org/-Ian-Storey/2734> diakses pada 13/11/2011 pukul 13.35.

⁶ Joseph Y. S Cheng, “Sino-Vietnamese Relations in the Early Twenty-first Century: Economics in Command?” *Asian Survey*, Vol. 51, No. 2, (2011) hlm. 385

Juni 2008. Kemudian pada November 2009, China dan Vietnam menandatangani perjanjian yang menandai berakhirnya negosiasi perjanjian perbatasan yang telah dibahas selama 35 tahun. Perjanjian ini meliputi perjanjian untuk menentukan batas-batas wilayah dan penanaman pagar hidup sebagai penanda perbatasan, perjanjian regulasi manajemen perbatasan dan perjanjian yang mengatur tentang pintu masuk ke kedua negara⁷. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tahun 2009 merupakan tahun kedua negara mampu menyepakati penyelesaian untuk masalah perbatasan darat yang selama ini merintang hubungan kedua negara.

Hubungan bilateral antara China-Vietnam yang mengalami dinamika baik konflik maupun normalisasi selama beberapa dekade dapat dilihat dari perspektif tentang hubungan bilateral yang asimetris. Menurut Brantly Womack⁸, hubungan bilateral asimetris adalah sebuah paradigma yang membahas efek dari kesenjangan nasional pada hubungan internasional. Asimetri menciptakan perbedaan dalam hal persepsi risiko, perhatian dan perilaku interaktif antar negara, dan dapat menyebabkan terjadinya lingkaran setan (*vicious cycle*) kesalahpahaman sistemik. Meskipun pihak yang lebih lemah tidak dapat menjadi penantang yang seimbang bagi pihak yang lebih kuat, sulit untuk mengatakan bahwa perbedaan kapasitas dapat membuat pihak yang lebih kuat mampu memaksakan kehendaknya pada yang lebih lemah. Alasannya adalah bahwa, dalam suatu konflik, pihak yang lebih lemah merasa mengalami ancaman eksistensial dan dengan demikian dapat memobilisasi seluruh kekuatan untuk menghadapi ancaman tersebut, sementara pihak yang lebih kuat hanya menganggapnya sebagai "perang kecil" dengan tujuan terbatas.

Untuk mengatasi ancaman eksistensial yang dirasakan oleh Vietnam karena menjadi negara yang lebih inferior daripada China, maka Vietnam melakukan aliansi dengan negara besar lain yaitu Uni Soviet pada masa perang dingin dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat pasca perang dingin. Oleh karena itu pada tahun 1978, aliansi Vietnam dengan Uni Soviet menjadi dasar utama sikap permusuhan

⁷ *Ibid*

⁸ Brantly Womack, "Asymmetry Theory and China's Concept of Multipolarity" *Journal of Contemporary China*, Vol. 13 No. 39, (Mei 2004) hlm. 355

China. Begitu pula kedekatan Amerika Serikat dengan Vietnam sejak kunjungan Hillary Clinton ke Hanoi 2010 telah menjadi dasar sikap asertif China di laut China Selatan yang menyatakan akan menggunakan kekuatan militer atau *'sound of cannon'* apabila negara-negara pengklaim seperti Vietnam dan Filipina terus mencoba mengeksplorasi kawasan yang oleh China dianggap sebagai kawasan tradisionalnya tersebut. Kedekatan Vietnam dengan AS dimanfaatkan oleh Vietnam untuk memperoleh perlindungan dari Amerika Serikat yang mulai memfokuskan kembali kebijakan luar negerinya ke Asia Pasifik serta menempatkan 2.500 pasukan marinir di Darwin dan Australia Utara mulai pertengahan 2012, diperkuat dengan penggelaran armada kapal perang dan pesawat tempur AS⁹.

Sementara itu, China yang melihat perkembangan hubungan antara Vietnam dengan Amerika Serikat dan melihat penempatan marinir AS di Asia Pasifik menanggapi dengan menyatakan bahwa PLA akan mempercepat proses modernisasi kekuatan militernya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan militer sekaligus melindungi dan mengamankan kedaulatan dan keamanan nasional China. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya konflik antara China dengan Amerika Serikat akan berimbang pada kondisi geopolitik di kawasan khususnya pada Vietnam yang selama ini juga menjadi negara pengklaim laut China Selatan.

Meskipun telah terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam hubungan bilateral China-Vietnam sejak normalisasi hubungan dari tahun 1991 sampai dengan 2009, namun sengketa teritorial antara kedua negara tetap terjadi setelah tahun 2009 sehingga menghantui harmonisasi hubungan kedua negara. Meskipun telah berhasil menyelesaikan negoisasi perjanjian perbatasan China-Vietnam pada 2009, namun sengketa di laut China Selatan masih menyebabkan terjadinya *clash*, diantaranya insiden penangkapan lebih dari 22 kapal nelayan Vietnam sepanjang tahun 2010 di

⁹ Dokumentasi Kemenko Polhukam, tanggal 13 Januari 2012

perairan sengketa di laut China Selatan, dan pengumuman pelarangan mencari ikan secara sepihak oleh China di perairan yang masih menjadi sengketa¹⁰.

Sengketa kedua negara terjadi lagi pada 9 Juni 2011 saat terjadi penyerangan atas kapal Vietnam oleh kapal China dimana China melakukan pemotongan kabel eksplorasi yang dipasang oleh kapal survey yang digunakan oleh perusahaan minyak Vietnam (PetroVietnam) dan China menuntut Vietnam menghentikan kegiatan eksplorasi minyak di kawasan tersebut.¹¹ Akibatnya, kejadian ini menimbulkan berbagai reaksi tidak hanya dari Vietnam namun dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik itu sendiri. Kemudian sebagai respon atas kejatian tersebut, Vietnam menggelar latihan angkatan laut berskala besar di area yang berdekatan dengan daerah sengketa di Laut China Selatan pada Senin, pada 13 Juni 2011¹². Selain itu, sengketa di laut China Selatan ini juga ditentang Amerika Serikat karena Amerika Serikat merasa bahwa China telah melakukan klaim sepihak di wilayah perairan laut internasional¹³. Hal ini didasari oleh kebijakan Amerika Serikat yang sejak tahun 2010 menyatakan bahwa keamanan maritim dan kebebasan navigasi ke laut China Selatan merupakan salah satu dari kepentingan nasional Amerika Serikat.

Dalam menganalisis masalah sengketa territorial di Laut China Selatan, teori – teori utama dalam hubungan internasional tidak cukup untuk menjelaskan fenomena ini secara terpisah. Hal ini dikarenakan konflik ini memiliki dimensi yang sangat besar meliputi kebijakan negara terhadap kedaulatannya yang menunjukkan paradigma realis, kemungkinan adanya kerja sama pengelolaan energi yang menunjukkan paradigma liberal, dan peran pengaruh identitas serta nasionalisme terhadap terjadinya krisis antar negara yang mewakili fenomena konstruktivis.

¹⁰ Amitav Acharya, “Collective Identity and Conflict Management in Southeast Asia” dalam Addler dan Michael Barnett, *Security Communities*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) hlm. 204 – 205

¹¹ <http://www.nytimes.com/2011/06/11/world/asia/11vietnam.html> diakses pada 13/11/2011 pukul 15.23

¹² *China Irks Neighbors as Tensions rise in South China Sea* diakses melalui <http://www.voanews.com/english/news/asia/China-Irks-Neighbors-as-Tensions-Rise-in-South-China-Sea-123197918.html> pada 13/11/2011 pukul 15.45

¹³ *US Speaks on South China Sea* diakses melalui <http://www.atimes.com/atimes/Southeast Asia/MF09Ae01.html> pada 13/11/2011 pukul 15.50

Konflik di laut China Selatan menunjukkan adanya tendensi, keinginan dan kemampuan dari negara-negara pengklaim untuk memulai sengketa dengan adanya peningkatan kekuatan laut di antara mereka pada awal tahun 1990an¹⁴. Konflik laut China Selatan dipandang dari perspektif realis, menunjukkan bahwa sengketa ini membutuhkan utilisasi kekuatan untuk memecahkan permasalahan (*utility of force as means to resolve disputes*) dan bahwa peningkatan kapabilitas militer sangat terkait dengan isu politis.¹⁵ Kemudian, dari sudut pandang liberal institutionalisme, sengketa di laut China Selatan juga melibatkan institusi regional seperti ASEAN serta beberapa forum seperti ARF, dan ASEAN yang berperan sebagai mediator dalam mengurangi ketegangan antara negara-negara pengklaim¹⁶. Selain itu, dari sudut pandang konstruktivis, konflik ini menyebabkan adanya peningkatan identitas dan nasionalisme yang ditunjukkan dengan demonstrasi anti China oleh rakyat Vietnam selama tiga minggu penuh terkait dengan pendudukan tentara China di kepulauan Spratly¹⁷.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritis yang komprehensif untuk memahami perselisihan territorial di laut China Selatan yang dapat mempengaruhi konstelasi hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, penelitian ini mencoba melihat sengketa laut China Selatan dari perspektif geopolitik yang mampu menghubungkan antara wilayah, kebijakan politik dan militer antarnegara pengklaim. Hal ini sesuai dengan perspektif geopolitik yang menyatakan asumsi bahwa lokasi geografis sangatlah penting untuk memahami perilaku negara dan bagaimana negara melaksanakan kebijakan luar negerinya¹⁸.

¹⁴ James Manicom, "IR Theory and Asia's Maritime Territorial Disputes" School of Political and International Studies, Flinders University paper yang dipaparkan kepada Australasian Political Studies Association Conference University of Newcastle, (Newcastle, 25-27 September 2006), hlm. 15

¹⁵ Paul R Viotti dan Mark V Kauppi, "Realis: The State and Balance of Power" dalam *International Relations Theory*. 4th Ed, (New York: Pearson Education Inc, 2010), hlm. 43

¹⁶ Mark J Valencia, "A Maritime Security Regime for Northeast Asia", *Asian Perspective*, Vol. 32, No. 4, (2008), hlm. 160.

¹⁷ *South China Sea warning casts shadow over US-China dialogue*, diakses dari www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1101&MainCatID=&id=20110623000095 pada 13/11/2011 pukul 16:59

¹⁸ Ralf Emmers, *Geopolitics And Maritime Territorial Disputes In East Asia*, *Routledge Security in Asia pacific Series*, (London and New York: Routledge, 2010), hlm. 6

1.2. Rumusan Masalah

Konflik di kawasan laut China Selatan antara China–Vietnam yang kembali mengemuka khususnya pada periode 2009 sampai 2011 ini membawa pada pertanyaan penelitian: *Bagaimana pengaruh komponen geopolitik terhadap konflik teritorial China-Vietnam di laut China Selatan periode 2009–2011?* Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dijelaskan tiga komponen geopolitik yaitu wilayah, energi dan *power* sebagai pendorong terjadinya konflik teritorial China-Vietnam di laut China Selatan. Dari komponen wilayah akan dilihat hubungan antara kedekatan jarak dan panjang garis pantai China-Vietnam terhadap konflik di laut China Selatan. Dari komponen energi akan dilihat hubungan antara tingkat pemenuhan kebutuhan energi China-Vietnam dengan kecenderungan terjadinya konflik tahun 2009-2011. Sedangkan dari komponen *power* akan dijelaskan hubungan antara kapabilitas militer kedua negara, tingkat agresivitas di kawasan sengketa periode 2009 – 2011 dan strategi kedua negara untuk mempertahankan klaimnya di kawasan LCS.

1.3. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh komponen-komponen geopolitik terhadap sengketa teritorial antara China–Vietnam di laut China Selatan pada periode 2009 – 2011. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan perkembangan konflik teritorial di Laut China Selatan antara China-Vietnam dan hubungan bilateral kedua negara ini pada periode 2009–2011.
- b. Menjelaskan pengaruh dari faktor-faktor geopolitik yaitu wilayah, energi dan *power* terhadap konflik antara China–Vietnam di Laut China Selatan pada periode 2009-2011.

1.3.2. Signifikansi Penelitian

- a. Memberikan penjelasan mendalam mengenai hubungan antara faktor geopolitik dengan eskalasi konflik teritorial di antara kedua negara yang berkonflik.
- b. Memberikan kontribusi pada umumnya bagi pengembangan kajian keamanan dan pada khususnya bagi para pengambil kebijakan negara di kawasan Asia yang saat ini sedang membahas *code of conduct* (CoC) di laut China Selatan sehingga pembuatan CoC tersebut mempertimbangkan faktor-faktor geopolitik dalam merumuskan CoC sehingga mampu mengakomodir kepentingan semua pihak yang terkait.

1.4. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang hubungan antara China-Vietnam dan konflik di Laut China Selatan antara kedua negara sudah banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan masalah konflik Laut China Selatan yang melibatkan kedua negara sangatlah menarik untuk diteliti. Berikut ini beberapa tulisan yang terkait dengan konflik teritorial di laut China Selatan. Tulisan – tulisan berikut ini dianggap sebagai tulisan yang dapat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Tulisan pertama terkait masalah laut China Selatan (LCS) adalah tesis yang ditulis oleh Timothy Glogan¹⁹ dari Universitas Turku. Tesis ini membahas pernyataan bahwa isu LCS merupakan *core interest* China seperti halnya isu Taiwan, Tibet dan Xinjiang. Penggunaan pernyataan *core interest* ini menimbulkan reaksi global dimana banyak negara di dunia merasa cemas bahwa China, dengan statusnya sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, akan mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang lebih asertif untuk mengimbangi statusnya sebagai kekuatan *superpower* global saat ini.

Dengan menganalisis pandangan dari para ahli dan evolusi kebijakan maupun retorika China terhadap LCS, tesis ini menunjukkan bagaimana penggunaan istilah *core interest* dalam pertemuan pribadi dapat memiliki konsekuensi yang jauh

¹⁹ Timothy Glogan, "China's 'Assertive' South China Sea Policy and Rhetoric: Proactive, Reactive or Myth?" *Tesis Master*, Pusat Studi Asia Timur, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Turku (Juni 2011)

melebihi maksud sebenarnya dari istilah tersebut. Tesis ini juga menunjukkan bahwa kebijakan maritim China tidak menjadi semakin asertif karena dengan tahap perkembangan sosial dan ekonominya saat ini, China tidak akan mampu menghadapi konsekuensi dari agresi internasional. Akhirnya tesis ini menunjukkan bahwa posisi China terhadap LCS mulai dipandang oleh dunia sebagai bentuk generalisasi dari kebijakan luar negeri China.

Alasan utama mengapa terjadi peningkatan ketegangan di LCS antara China-AS serta antara China dengan Negara-negara ASEAN adalah adanya ketegangan militer, ekspansi kapabilitas militer China, kebutuhan China yang besar akan minyak dan sumber daya alam serta faktor domestik China seperti nasionalisme dan pencarian legitimasi oleh pemerintah China. Situasi geopolitik seperti hubungan dengan AS terkait isu Taiwan; isu Korea; hubungan dengan ASEAN; hubungan China dengan Jepang terkait masalah Laut China Timur; dan keinginan China untuk memperoleh akses ke Samudera Hindia juga menjadi alasan terjadinya peningkatan ketegangan di LCS.

Tesis ini menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir, China memang terlihat asertif sehubungan dengan isu LCS, namun keasertifan ini merupakan 'respon' dari keasertifan Negara-negara lain. Selain itu, pernyataan bahwa LCS adalah *core interest* China merupakan pernyataan yang menyesatkan karena telah mengalami pergeseran makna akibat pengutipan dari media-media yang meliput pertemuan pribadi Menlu China Dai Bingguo dan Wamenlu AS James Steinberg pada Maret 2010. Pernyataan Dai Bingguo yang sebenarnya yaitu LCS 'mempengaruhi *core interest* China' telah bergeser menjadi "LCS sebagai *core interest*" dan memberikan ide bahwa China bersifat agresif dan 'mengancam' dunia barat maupun negara pantai di kawasan LCS. Peningkatan manuver China di LCS sejak tahun 2009 merupakan respon atas tindakan Vietnam dan Malaysia yang mengklaim hak perpanjangan landas continental (*extended continental shelf*). Selain itu, tindakan China ini juga merupakan respon dari semakin meningkatnya frekuensi latihan militer AS di tempat-tempat yang berdekatan dengan wilayah China misalnya

di Laut Kuning bersama Korea Selatan dan Jepang serta di LCS bersama dengan Vietnam pada pertengahan 2010.

Retorika China tentang masalah LCS juga terlihat penuh kemarahan karena Menlu AS Hillary Clinton pada 2010 menyatakan bahwa menjaga terbukanya LCS terhadap *free navigation* merupakan *national interest* AS. China marah karena memandang bahwa AS terlalu mendekati area permasalahan yang seharusnya tidak membutuhkan campur tangan AS. Meskipun China memiliki kesempatan untuk bersikap asertif karena kekuatan militer dan angkatan lautnya yang lebih superior daripada negara pantai lainnya, namun sikap asertif justru ditunjukkan oleh Filipina dan Vietnam untuk memperkuat klaim mereka atas kepulauan Spratly. Peneliti juga menyatakan bahwa saat ini jelas terlihat bahwa China tetap ingin mempertahankan sikap rendah hati dalam kebijakan luar negerinya dengan berdasarkan pada *Independent Foreign Policy of Peace* sehingga tidak menakuti mitra dagangnya di dunia. Sebagai negara yang tidak jatuh akibat resesi tahun 2008 – 2009, China telah memiliki profil internasional yang kuat serta membutuhkan kekuatan militer khususnya angkatan laut yang kuat untuk menjaga wilayah, pengaruh dan *prestise*-nya.

Berbeda dengan tulisan Timothy Glogan (2011) yang memandang China sebagai negara yang tidak mengancam dalam kasus LCS dan hanya menjadi asertif sebagai respon terhadap keasertifan Negara lain, tulisan Ian Storey (2011) menekankan bahwa sejak awal tahun 2011, eskalasi ketegangan di LCS semakin meningkat karena adanya kompetisi terhadap sumber daya maritim, klaim kedaulatan yang semakin menguat dan taktik China yang semakin agresif²⁰.

Dalam tulisan ini dijelaskan tentang sikap asertif China pada 2010 yang berubah menjadi agresif sejak tahun 2011. Meskipun China telah berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan, namun kenyataannya retorika

²⁰ Ian Storey, "Hardening Positions over Dangerous Grounds: Recent Developments in the South China Sea Dispute", *Paper*, CSIS Conference on Maritime Security in the South China Sea, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), (Singapura, 20 – 21 June 2011)

China ini tidak sesuai dengan tindakannya di LCS yang menunjukkan kecenderungan semakin agresif di tahun 2011. Kecemasan dari beberapa Negara pengklaim juga meningkat karena peningkatan nasionalisme China, peningkatan kapabilitas militer China dan sikap asertif China di LCS. Tiga hal yang menunjukkan taktik agresif China di LCS adalah:

- a. Insiden pengusiran kapal perusahaan energi yang melakukan eksplorasi di kawasan ZEE dan kapal Filipina MV Veritas Voyager di dekat Reed Bank oleh kapal China serta pemotongan kabel peralatan seismik kapal PetroVietnam dan kapal Viking 2 di kawasan ZEE Vietnam oleh kapal China.
- b. China melakukan pengetatan implementasi pelarangan menangkap ikan tahunan (*unilateral annual fishing ban*) di kawasan utara LCS dan telah menangkap lebih dari selusin kapal nelayan Vietnam serta memberikan tembakan peringatan pada kapal nelayan Filipina.
- c. Kapal-kapal China menurunkan material konstruksi di Amy Douglas Reef yang merupakan kawasan ZEE Filipina dan menempatkan penanda di Reed Bank and Boxall Reef. Insiden ini meyalahi perjanjian DoC yang melarang pihak-pihak untuk menempati fitur geografis yang belum dihuni pihak manapun.

Beberapa alasan disampaikan China atas tindakannya yang agresif ini, yaitu pertama bahwa China membela diri dari Filipina dan Vietnam yang kerap kali melanggar perjanjian dengan melakukan tindakan unilateral misalnya melakukan aktivitas eksplorasi migas sehingga membahayakan hak kedaulatan dan kepentingan ekonomi China. Namun, ternyata kebutuhan minyak China yang besar membuat China juga melakukan pengeboran di laut dalam di LCS untuk mendapat deposit minyak bumi. Selain itu, China juga memprotes kebijakan beberapa Negara ASEAN yang dianggap ‘menginternasionalisasi’ sengketa LCS di level regional seperti ARF dan mengundang AS sehingga membuat masalah menjadi semakin kompleks. Kedua, modernisasi Angkatan Laut China merupakan senjata China untuk menekan secara

koersif kepada Negara pengklaim lainnya. Ketiga, China mungkin sedang menguji bagaimana AS akan mengatasi masalah ketegangan di LCS.

Sementara itu, Storey juga melihat bagaimana respon dari beberapa negara Asia khususnya Vietnam dan Filipina dalam melihat masalah LCS. Kedua Negara ini sangat kritis terhadap sikap China yang agresif dan meminta China untuk membuktikan komitmennya atas perdamaian dan stabilitas regional. Secara khusus, peneliti menyoroti respon Vietnam yang lebih keras daripada Filipina dengan menyatakan bahwa pemotongan kabel seismik Kapal Vietnam oleh China merupakan tindakan serangan terencana atau *premeditated attacks* dan merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan Vietnam. Selain itu, pemerintah Vietnam juga mendukung demonstrasi anti-China di Hanoi dan Ho Chi Minh City selama dua minggu penuh pada Juni 2011. Selain itu, Vietnam juga melakukan kerjasama dengan AS yang ingin melakukan *capacity building* dengan Negara pengklaim LCS di Asia Tenggara, dengan melakukan latihan bersama *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT). Baik Vietnam dan Filipina telah mengundang AS untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di LCS karena kehadiran AS dianggap menjadi *deterrence* untuk tindakan yang melanggar hukum di LCS.

Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu buku yang ditulis oleh Min Gyo Koo²¹ yang di dalamnya terdapat satu bab yang secara khusus membahas tentang hubungan Sino–Vietnam terkait dengan masalah sengketa kepulauan Paracel and Spratly. Hubungan Sino–Vietnam telah diwarnai dengan kecurigaan, kenangan menyakitkan, dan ketegangan yang semakin meningkat. Sebagian besar dari permasalahan ini terkait dengan klaim kedaulatan di LCS. Sejak tahun 1970an, LCS telah dianggap sebagai arena peperangan dari beberapa konflik militer yang terjadi diantara China – Vietnam. Insiden-insiden penting yang terjadi adalah tahun 1974 ketika China menginvasi dan menempati pulau-pulau Paracel di bagian barat dari Vietnam Selatan. Pada 1978–79, perbedaan bilateral terkait kepulauan Spratly telah menyebabkan adanya sengketa perbatasan berskala besar antara kedua negara, di awal tahun 1988,

²¹ Min Gyo Koo, *Island Disputes and Maritime Regime Building in East Asia Between a Rock and a Hard Place*, (London: Springer Science Business Media, 2009)

China dan Vietnam kembali mengalami konflik terkait pendudukan beberapa karang di rantai Spratly. Tahun 1990 sering terjadi konfrontasi minor yang tidak sampai menyebabkan eskalasi konflik, serta hanya dalam bentuk tuduhan, klaim, bantahan klaim (*counterclaim*), penggunaan kekuatan militer dalam skala kecil dan penangkapan warga sipil.

Bagi China, Paracel dan Spratly merupakan kawasan yang strategis khususnya menjadi maritim buffer untuk melindungi kawasan daratan. Selain itu, sumber daya maritim, khususnya cadangan energi hidrokarbon sangat penting bagi kemakmuran ekonomi China. Bagi Vietnam, kedua kepulauan ini memiliki sumber daya alam migas yang sangat penting khususnya karena banyak investor asing yang mendorong Vietnam untuk mengeksplorasi kawasan ini. Bagi kedua Negara, nilai strategis dan ekonomis LCS menjadi semakin besar khususnya akibat semakin menipisnya persediaan energi global.

Kondisi geopolitik yang tidak stabil juga menjadi pendorong terjadinya konflik nasionalisme antara China dan Vietnam sehingga semakin meningkatkan frekuensi konflik di LCS. Namun Min Gyo Koo menyatakan bahwa pengaruh interdependensi ekonomi yang kuat antara China dan Vietnam telah mencegah isu kedua kepulauan ini menjadi konflik yang diluar kendali kedua negara sejak normalisasi hubungan tahun 1991. Selain itu, Min Gyo Koo juga menyatakan bahwa China tidak lagi terlalu agresif karena ingin memainkan peran yang lebih besar khususnya untuk meningkatkan kemajuan ekonominya, memperoleh akses terhadap pasar terbesar dunia dan reunifikasi dengan Taiwan sehingga menghindari konflik dengan tetangganya khususnya Vietnam. Namun, kemajuan China yang pesat juga perlu dipandang sebagai peluang bagi Negara ASEAN khususnya Vietnam untuk membuka hubungan baik dengan China.

Selain beberapa tulisan yang berfokus pada konflik LCS serta hubungan antara China-Vietnam, salah satu tulisan yang membahas tentang kemungkinan

mekanisme penyelesaian konflik di LCS adalah tulisan Ralf Emmers (2009)²². Tulisan Emmers ini berfokus pada perubahan distribusi kekuatan di LCS dan menganalisis implikasi dari perubahan ini terhadap manajemen konflik dan penghindaran terhadap konflik. Tulisan ini juga melihat bagaimana peningkatan kapabilitas militer China yang kuat dan asimetris telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara ASEAN pengklaim LCS. Selain itu, tulisan ini membahas bagaimana ASEAN menggunakan model khusus untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi kekuatan di LCS untuk menjadi mekanisme manajemen konflik. Namun model ASEAN ini, menurut Emmers, juga memiliki kelemahan dalam konteks masa kini karena peningkatan kekuatan yang asimetris dan bertambahnya *security dilemma* akibat peningkatan kapabilitas angkatan Laut China.

Tulisan ini menekankan bahwa diantara semua negara pengklaim LCS, China merupakan negara dengan kekuatan militer yang terkuat akibat modernisasi militer sejak awal 1990an. Menurut *SIPRI Yearbook*, China adalah pembeli senjata terbanyak di Asia dan terbesar keempat di dunia dan terus meningkatkan pembelian serta produksi alutsistanya untuk memperkuat penjagaannya di kawasan LCS. Sementara itu, negara pengklaim LCS terkuat dari Asia Tenggara tidak memiliki kapasitas militer yang mampu menandingi China meskipun telah melakukan modernisasi alutsistanya secara sederhana. Negara pengklaim di Asia Tenggara hanya memperoleh bantuan militer dari AS dengan keberadaan armada ketujuh AS meskipun tidak ada perjanjian resmi aliansi dengan AS. Oleh karena itu, Negara-negara pengklaim di Asia Tenggara merasakan kekhawatiran terhadap peningkatan angkatan laut China dan tidak dapat mengandalkan politik *balance of power* tradisional untuk mengatasi distribusi kekuatan yang tidak seimbang.

ASEAN harus mampu mengatasi masalah ketidakseimbangan distribusi kekuatan ini dengan mekanisme manajemen konflik. Hal ini telah dilakukan dengan membuat DoC dengan China pada 2002 dan TAC tahun 2003. Namun, hal ini tidak mencegah bertambahnya *security dilemma* akibat meningkatnya kekuatan angkatan

²² Ralf Emmers, "The Changing Power Distribution in the South China Sea: Implication for Conflict Management and Avoidance", *RSIS Working Paper No. 183*, (Singapura: RSIS, 30 September 2009)

laut China. Model ini ternyata masih terlalu rapuh untuk menjadi dasar kerjasama antarnegara dalam memitigasi ketidakseimbangan distribusi kekuatan di LCS. Tulisan ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan distribusi kekuatan di LCS, diperlukan struktur internasional yang lebih luas dan meng-engage China dalam struktur yang lebih luas untuk mengurangi *security dilemma*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multilateral yang kuat yang terdiri dari kerjasama *joint development* yang diletakkan dalam kerangka kerjasama manajemen konflik yang lebih luas.

Meskipun demikian, kekuatan militer Soviet dan AS yang berkurang di kawasan ini telah meningkatkan kepercayaan diri China karena dengan kekuatan militer China yang semakin maju pesat dan asertif, maka tak mungkin China akan menyerah dalam memperjuangkan klaim teritorial yang belum selesai di LCS. Selain itu, tumpang tindihnya klaim teritorial dan maritim akan tetap membayangi hubungan antar negara litoral di LCS.

Terkait hubungan antara China-Vietnam, salah satu tulisan jurnal yang dibuat oleh Joseph Y. S. Cheng telah menjelaskan dengan komprehensif berbagai aspek hubungan antara Vietnam – China khususnya di abad 21 ini²³. Jurnal ini mempelajari hubungan Sino-Vietnam selama beberapa dekade terakhir dengan berfokus pada kepentingan bersama mereka dan perbedaan strategis/keamanan, hubungan antar partai komunis, perselisihan teritorial, dan hubungan ekonomi kedua negara. Jurnal ini menyajikan ulasan mengenai latar belakang sejarah yang berfokus pada normalisasi hubungan pada tahun 1990-1991, kemudian melihat bagaimana dinamika hubungan Sino-Vietnam sejak pertengahan 1980-an dimana faktor-faktor ekonomi dapat mengubah dua negara yang saling bertentangan menjadi negara yang bekerja sama secara damai dalam hubungan bilateral yang asimetris. Selain itu, jurnal ini menganalisis pula peran ASEAN dan pembangunan *Greater Mekong Sub-region* dalam kerja sama ekonomi kedua negara. Meskipun demikian, jurnal ini juga menyajikan bagaimana strategi Vietnam untuk *hedging* dan *balancing* atas sikap China yang agresif dalam konflik di laut China Selatan.

²³Joseph Y. S Cheng, *loc. cit.*

Beberapa tulisan akademik dan tulisan diatas memberikan penjelasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap konflik teritorial di kawasan Laut China Selatan dan hubungan antara China dan Vietnam terkait dengan konflik tersebut. Berbagai perspektif dan studi kasus yang digunakan mencerminkan bervariasinya sudut pandang dalam melihat konflik laut China Selatan antara China–Vietnam maupun bagaimana kemungkinan konflik ini dapat dimitigasi di masa depan. Meskipun demikian, tulisan yang secara spesifik membahas isu sengketa LCS antara China-Vietnam dengan menggunakan sudut pandang geopolitik yaitu wilayah, energi dan *power* belum dibahas secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui rumusan masalah yang dikemukakan, peneliti ingin memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hubungan Internasional, terutama yang terkait dengan konflik LCS dengan subjek penelitian China – Vietnam dengan melihat ketiga komponen geopolitik tersebut.

Tabel 1.2. Tinjauan Pustaka

No	Penulis	Judul	Summary
a.	Timothy Glogan	<i>China's 'Assertive' South China Sea Policy And Rhetoric: Proactive, Reactive Or Myth?</i>	Tindakan asertif China di kawasan LCS merupakan respon dari tindakan asertif dari beberapa Negara lain yang juga berkepentingan di LCS. Penggunaan istilah <i>core interest</i> telah memberikan implikasi berupa generalisasi atas keseluruhan kebijakan luar negeri China yang tidak semuanya bersifat mengancam.
b.	Ian Storey	<i>Hardening Positions over Dangerous Grounds: Recent Developments in the South China Sea Dispute.</i>	Konflik LCS telah mempengaruhi China untuk bertidak secara agresif khususnya di tahun 2011 dengan adanya beberapa insiden seperti pengusiran kapal, penerapan larangan menangkap ikan dan penempatan material di kawasan yang tidak dihuni. Selain itu, beberapa Negara pengklaim seperti Vietnam dan Filipina juga

			memberikan respon atas sikap agresif ini dengan memberikan kritik keras, melakukan kerja sama dengan AS dan melakukan internasionalisasi konflik LCS.
c.	Min Gyo Koo.	<i>Island Disputes and Maritime Regime Building in East Asia: Between a Rock and a Hard Place.</i>	Konflik laut China Selatan antara Vietnam dan China telah terjadi sejak tahun 1970an dan masalah ini akan tetap mewarnai hubungan kedua Negara karena adanya klaim territorial dan maritim yang tumpang tindih antar negara litoral. Selain itu, kemajuan ekonomi dan militer China tidak hanya bisa dilihat sebagai ancaman namun juga peluang bagi Negara-negara ASEAN pengklaim LCS khususnya Vietnam.
d.	Joseph Y. S. Cheng.	<i>Sino-Vietnamese Relations in the Early Twenty-first Century Economics in Command?</i>	Hubungan Sino-Vietnam sejak pertengahan 1980an menunjukkan bagaimana hubungan ekonomi dapat mengubah dua Negara yang saling berkonflik dalam hubungan bilateral yang asimetris. Keinginan China untuk mengejar lingkungan internasional yang damai untuk mendukung kemajuan ekonomi telah diikuti pula oleh Vietnam.
e.	Ralf Emmers	<i>The Changing Power Distribution in the South China Sea: Implication for Conflict Management and Avoidance</i>	Untuk mengatasi distribusi kekuatan yang tidak seimbang dan bertambahnya <i>security dilemma</i> di LCS, ASEAN perlu menerapkan mekanisme manajemen konflik yang tidak hanya bersifat regional, namun lebih luas dalam konteks internasional.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain seperti yang telah disebutkan dalam tinjauan pustaka adalah bahwa penelitian ini menggunakan sudut pandang geopolitik yang mampu menjembatani berbagai pendekatan teoritis seperti realisme, liberalisme dan konstruktivisme untuk menganalisis konflik teritorial di laut China Selatan antara China dan Vietnam. Pendekatan geopolitik dalam penelitian ini mampu menghubungkan antara wilayah, kebijakan politik dan militer dengan konflik teritorial yang terjadi antara kedua negara tersebut. Selain itu, penelitian ini khusus meneliti permasalahan sengketa perbatasan laut antara China dengan Vietnam karena kedua negara ini merupakan dua negara yang mengklaim keseluruhan fitur yang ada di laut China Selatan sehingga kebijakan luar negeri maupun politik domestik keduanya sangat dipengaruhi oleh dinamika konflik di laut China Selatan. Berbagai insiden yang terjadi antara kedua negara di laut China Selatan menunjukkan bahwa kedua negara ini seringkali mengalami benturan kepentingan di kawasan sengketa tersebut.

Secara khusus, penelitian ini membatasi periode konflik antara tahun 2009 sampai dengan 2011 karena tahun 2009 merupakan tahun emas normalisasi hubungan antara China–Vietnam ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perbatasan darat yang telah dibahas selama 35 tahun. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan terjadinya berbagai insiden penangkapan, penyerangan dan pengusiran kapal di kawasan laut China Selatan. Sedangkan tahun 2011 menunjukkan semakin “memanasnya” hubungan kedua negara akibat konflik di laut China Selatan karena adanya kompetisi terhadap sumber daya maritim, klaim kedaulatan yang semakin menguat dan taktik China yang semakin agresif di kawasan tersebut.

1.5. Kerangka Pemikiran

A. Interstate Territorial Dispute

Menurut Huth & Alle (2002), *interstate territorial disputes* atau perselisihan teritorial antar negara didefinisikan sebagai kasus-kasus perselisihan antar pemerintahan mengenai lokasi sebuah perbatasan baik itu berupa batas darat maupun laut. Perselisihan teritorial dapat terjadi apabila suatu pemerintahan menempati teritori

nasional negara lain dan menolak untuk menyerahkan atau menarik kekuasaannya dari wilayah tersebut; ketika suatu pemerintahan tidak mengakui kedaulatan negara lain atas beberapa bagian wilayah yang berada dalam garis perbatasan pemerintahan negara lain tersebut; atau bilamana sebuah pemerintahan tidak mengakui kemerdekaan dan kedaulatan pemerintahan lain dan mencoba untuk mencaplok beberapa atau semua wilayah negara lain tersebut²⁴. Oleh karena itu, gerakan separatis antara pemerintah dengan berbagai kelompok etnis dan religius, khususnya di wilayah Asia Tenggara dan daratan China, tidak termasuk dalam definisi ini.

Huth & Alle (2002) juga mengklasifikasikan enam tipe konflik teritorial dalam sistem internasional pada abad ke -21 ini yaitu:

- a. Sengketa antar dua negara terhadap klaim yang bertentangan atas daerah yang masih menjadi bagian dalam wilayah negara mereka. Konflik ini biasanya terjadi antar negara tetangga yang belum menyepakati lokasi perbatasan sungai, kedaulatan atas pulau-pulau lepas pantai atau belum adanya pengakuan atas kedaulatan dan kemerdekaan atas suatu negara yang bertetangga.
- b. Sengketa antara dua negara dengan klaim yang bertentangan atas daerah yang masuk wilayah bagian negara yang satu dan namun merupakan wilayah luar dari negara yang lain. Konflik ini melibatkan *major power* yang ingin menyebarkan pengaruhnya di wilayah negara lain, dimana konflik teritorial dengan negara setempat muncul akibat adanya sengketa perbatasan, kedaulatan atas pulau dan hak untuk menggunakan pangkalan militer.
- c. Sengketa antara dua negara dengan klaim yang bertentangan atas daerah yang meliputi wilayah luar dari kedua negara yang bersengketa. Sengketa ini muncul apabila dua kekuatan colonial mengalami konflik teritorial langsung dan membutuhkan penyelesaian atas batas-batas wilayah dan hak pengelolaan pulau lepas pantai.

²⁴ Paul K. Huth dan Todd L. Allee, *The Democratic Peace and Territorial Conflict in the 20th Century*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 30 - 34

- d. Sengketa antara negara dengan negara baru yang ingin memperoleh kemerdekaan dengan memisahkan diri dengan negara tersebut. Sengketa ini muncul akibat adanya kelemahan militer dan politik dari pemerintah pusat yang tidak mampu menerapkan tugas administratif dan kendali militer atas wilayah tertentu di sepanjang wilayah perbatasan mereka.
- e. Sengketa dimana unit-unit politik di dalam negara asing yang dikuasai oleh kekuatan kolonial berusaha untuk memperoleh kemerdekaan dan mendirikan negara sendiri yang terlepas dari kekuasaan colonial tersebut. Sengketa ini berkaitan dengan adanya dekolonisasi yang terjadi di seluruh dunia untuk melawan kekuatan colonial seperti Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, Spanyol, Amerika Serikat, Belgia dan Jepang.
- f. Sengketa antar negara-negara yang berpusat pada klaim atas hak-hak teritorial untuk wilayah air dan tanah di pedalaman laut. Sengketa ini berkaitan dengan perpanjangan hak teritorial atas air sepanjang wilayah pantai dan pulau, wilayah dasar laut di bawah perairan teritorial dan lokasi cekungan kontinental yang berada di wilayah pantai negara-negara tersebut.

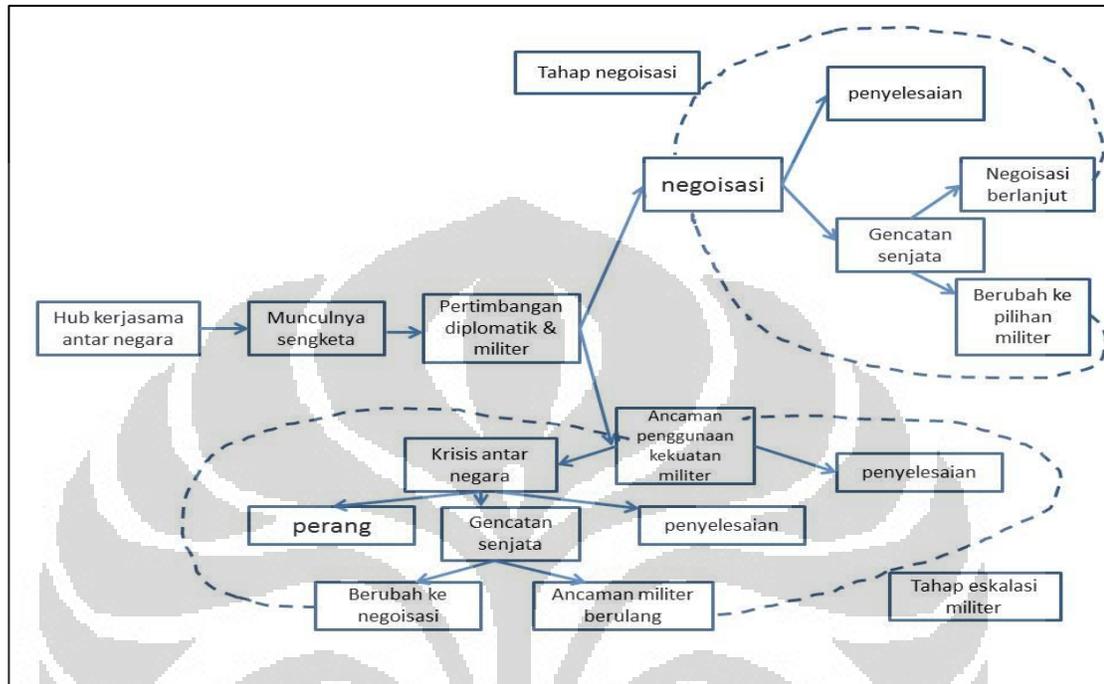
Kategori sengketa yang pertama sampai kelima berkaitan dengan klaim atas wilayah darat, sementara kategori keenam berkaitan dengan klaim atas wilayah yang menjangkau dasar laut dan samudera. Dalam hal ini, sengketa antara China dan Vietnam di laut China Selatan masuk dalam kategori keenam yaitu sengketa hak wilayah air dan tanah di pedalaman laut antar kedua negara yang saling berbatasan tersebut.

Huth dan Alle (2002) menyatakan beberapa tahap dalam konflik internasional sebagai berikut:

- a. Transisi dari status quo terhadap sengketa karena beberapa isu
- b. Upaya untuk melakukan negoisasi dan menyelesaikan sengketa tersebut.
- c. Eskalasi konflik diplomatic sampai ke point adanya ancaman kekuatan militer.
- d. Eskalasi lebih lanjut dari konflik militer atau krisis menjadi perang.

Secara sederhana, evolusi sengketa internasional dapat dilihat dari gambar di bawah

Gambar 1.2. Evolusi Tahapan Sengketa internasional²⁵



Selain itu, Quincy Wright (1965) melengkapi teori Huth & Alle (2002) dengan menyatakan adanya tahap – tahap eskalasi konflik dalam interstate territorial dispute sebagai berikut²⁶:

- a. Kesadaran akan adanya ketidaksesuaian
- b. Meningkatnya ketegangan
- c. Tekanan dengan menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi ketidaksesuaian
- d. Intervensi militer atau perang untuk memaksakan solusi.

Dua tahap pertama biasanya berkaitan dengan adanya *arms race* yang kemudian cenderung mengalami eskalasi karena adanya proses aksi–reaksi dan ketegangan antar pihak yang diperparah dengan adanya persepsi ancaman atas bertambahnya

²⁵ *Ibid*, hlm. 35.

²⁶ Quincy Wright, “The Escalation of International Conflicts”, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 9 No.4, (Virginia: University of Virginia, Desember, 1986), hlm. 434

kapabilitas pihak lain. Pola aksi–reaksi akan mempercepat *arms race* karena adanya penambahan biaya, ketidakpuasan satu pihak dan rasa takut akan terjadinya perang. Eskalasi konflik akan terjadi apabila terdapat tindakan internasional yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti protes diplomatik, intervensi subversif, sanksi ekonomi maupun serangan ekonomi.

B. Geopolitik

Pendekatan geopolitik sangat tepat untuk menganalisis bagaimana perselisihan teritorial mempengaruhi bagaimana negara-negara berperilaku secara politik dan militer di suatu kawasan. Istilah geopolitik merefleksikan hubungan antara power dan kepentingan, pengambilan keputusan secara strategis dan wilayah geografis tertentu²⁷. Istilah geopolitik mulai mengemuka pada akhir abad ke sembilan belas dan mengacu pada bagaimana ide–ide yang berhubungan dengan politik dan bagaimana ruang kewilayahan (*space*) dapat digunakan sebagai dasar kebijakan nasional. Geopolitik juga berfokus pada hubungan politis antara negara, strategi eksternal negara dan perimbangan kekuatan global serta tentang bagaimana memahami dasar kekuatan negara dan sifat-sifat interaksi antara satu negara dengan negara lain²⁸.

Geopolitik merupakan kombinasi antara gambaran rill permukaan bumi, yakni tanah, laut, serta seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya dengan kemampuan mengendalikan dan mengelola seluruh sumber daya tersebut.²⁹ Singkatnya, geopolitik menunjukkan keterhubungan antara sumber daya alam, dominasi strategis dan wilayah geografis di satu sisi dan berbagai aktor negara maupun non-negara yang berinteraksi untuk memperoleh tujuan kepentingan individu maupun kepentingan kolektif. Dengan demikian, geopolitik tidak hanya

²⁷ Michael Mayer. “What is geopolitics?” diakses dari http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45%3Aarticle2&catid=1%3Alatest-news&limitstart=1 pada 03/12/2011 pukul 17.00

²⁸ *Geopolitics* diakses dari <http://socgeo.ruhosting.nl/html/files/geoapp/Werkstukken/Geopolitics.pdf> pada 03/12/2011 pukul 17.05

²⁹ Jakub J. Grygiel, “Great Power and Geopolitical Change”, (London: The John Hopkins University Press, 2006), hlm. 22

menghubungkan antara politik dengan letak geografis, namun juga mengandung beberapa asumsi utama yaitu: negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional, kompetisi ekonomi-militer terjadi antar negara untuk memperoleh sumber daya mentah untuk kekayaan nasional, bahwa negara dan aliansi berguna untuk menyeimbangkan hubungan satu dengan lain melalui pendudukan secara fisik maupun dengan memberikan pengaruh politik di dalam wilayah geografis, dan bahwa geografi merepresentasikan determinasi terbesar atas hubungan politik³⁰.

Menurut Ralf Emmers, geopolitik menekankan bahwa geografi sangatlah penting untuk memahami pola perilaku negara dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Asumsi-asumsi utama dalam geopolitik yang dirangkum menjadi tiga komponen utama yaitu wilayah, sumber daya alam (energi) dan *power* (kekuatan militer) dapat digunakan untuk memahami perselisihan teritorial antar negara³¹. Secara lebih lanjut, ketiga komponen geopolitik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Wilayah

Wilayah berkaitan dengan pemerintahan (*statehood*), batas-batas nasional, klaim teritorial dan nasionalisme. Wilayah memberikan keuntungan strategis dan ekonomis bagi sebuah negara karena dapat meningkatkan posisi politik sebuah negara dalam sistem internasional. Sesuai dengan pandangan kaum realis, wilayah dipandang sebagai sebuah ‘penanda’ bagi posisi sebuah negara di dunia dan dapat menjadi sumber ketegangan. Oleh karena itu, batas-batas wilayah dan demarkasi fisik merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara karena tidak dapat dipisahkan dari argumen politik untuk memperoleh dan mempertahankan kedaulatannya. Dalam hal ini, legitimasi sebuah pemerintahan dihubungkan dengan kemampuan pemerintahan tersebut dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara termasuk wilayah yang paling kecil sekalipun.

Wilayah sebuah negara berkaitan dengan makna nasionalis yang terkandung di dalamnya. Dalam sebuah sengketa teritorial, nasionalisme dapat menjadi salah satu

³⁰ “Geopolitics”, *Collier’s Encyclopedia*, Vol. 10, 1962, hlm. 700-702

³¹ Ralf Emmers, *op.cit*, hlm..5

faktor yang dapat menjelaskan mengapa sebuah konflik terjadi. Nasionalisme dapat didefinisikan dalam hal ideologi, doktrin, etnisitas, pemerintahan ataupun semua yang berkaitan dengan gerakan-gerakan sosial. Dalam hal ini, kehilangan sebuah wilayah bagian dari suatu negara dianggap sebagai ‘mutilasi’ sehingga wilayah sangatlah penting tidak hanya karena faktor kekayaan yang terkandung di dalamnya, namun juga karena berbagai nilai sosial yang ada dalam wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan faktor politik dan budaya, klaim atas sebuah wilayah seringkali muncul bersamaan dengan ideologi nasionalis yang ingin mempertahankan “tanah air” mereka. Kadangkala negara mendukung sentimen nasionalis tersebut untuk memperoleh dukungan publik atas klaim teritorial maupun mempertahankan ancaman yang dianggap mengancam legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, gerakan nasionalis dapat digunakan sebagai pengalihan, alat melegitimasi maupun menggantikan sebuah ideologi yang hampir mati.

b. Energi (Sumber daya alam)

Kebutuhan akan sumber daya alam dan energi telah mempengaruhi tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Cadangan energi sebuah negara yang mencukupi merupakan satu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi penduduknya, menjamin standar hidup dan membantu pembangunan bagi negara. Sumber daya alam seringkali berubah dari masalah *low politics* yang hanya berkaitan dengan produksi dan konsumsi secara domestik menjadi masalah *high politics* yang berkaitan dengan keamanan nasional. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi kekuatan ekonomi dan posisi politik suatu negara terhadap negara lain, sementara kelangkaan sumber daya alam akan menyebabkan sebuah negara menjadi rentan dan bergantung terhadap negara lain. Kebutuhan sumber daya alam yang meningkat dihadapkan dengan berkurangnya ketersediaan sumber daya alam berpotensi memperburuk ketegangan yang telah ada antarnegara maupun menyebabkan terjadinya konflik. Kebutuhan akan sumber daya alam dan energi telah menjadi faktor mendasar dibangunnya aliansi dengan negara lain, kebijakan ekspansionis dan penyebab terjadinya konflik.

Keinginan untuk memperoleh sumber energi dipengaruhi oleh hukum internasional. Pencarian sumber-sumber energi dan sumber daya alam di kawasan lepas pantai dan wilayah maritim yang masih disengketakan dipengaruhi oleh UNCLOS yang diadopsi sejak 30 April 1982 dan mulai berlaku sejak 16 November 1992. UNCLOS bertujuan untuk menjadi regim maritim dengan melakukan kerja sama yang lebih dekat dalam isu-isu maritim, menawarkan prosedur untuk resolusi konflik teritorial, dan memperkenalkan konsep, hak dan kewajiban yang baru. UNCLOS didasarkan pada asumsi tentang perjanjian atas kedaulatan dan tidak menyediakan mekanisme penyelesaian konflik kecuali melalui kompromi diplomatik. Bagian ke-IX dari UNCLOS mewajibkan negara-negara litoral untuk bekerja sama dalam mengeksploitasi dan menggunakan kawasan laut tertutup (*enclosed*) dan semi tertutup (*semi-enclosed*) seperti kawasan laut China Selatan. UNCLOS juga menjelaskan tentang hak dan keistimewaan dari negara kepulauan dan mengakui perairan yang berada di tengah negara kepulauan tersebut. UNCLOS menjamin adanya *freedom of navigation, rights of innocent passage*, dan hak untuk melewati selat. Beberapa negara di Asia yang telah meratifikasi UNCLOS adalah Filipina, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, China, Brunei Darussalam, Malaysia dan Jepang. Akan tetapi, banyak negara pengklaim laut China Selatan menyalahgunakan UNCLOS untuk memperluas wilayah yurisdiksi kedaulatan mereka untuk memperoleh akses terhadap sumber daya alam.

c. *Power*

Power dalam hal ini dikaitkan dengan tradisi realis yang menekankan pada kekuatan secara militer. Hal ini sejalan dengan pandangan Morgenthau bahwa politik internasional sama seperti politik adalah *struggle for power* dan apapun tujuan dari politik internasional, *power* selalu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Morgenthau menjelaskan pula bahwa *political power* adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan tindakan seseorang dengan cara mempengaruhi pikiran orang tersebut. Selain itu, Joseph Nye menjelaskan bahwa negara dapat menunjukkan *power* melalui metode kultural, ideologi, dan lingistik sehingga *power* merupakan

penjumlahan dari berbagai kapabilitas seperti jumlah penduduk, letak geografis, dan kekuatan militer, ekonomi, politik dan ideologis maupun komponen kultural.

Power selalu dilihat dalam konteks yang relasional dan tidak hanya merupakan hasil penjumlahan atas berbagai kapabilitas tersebut karena ukuran atas kapabilitas sebuah negara selalu relatif terhadap kapabilitas dari negara lain. Jika dilihat dari sudut pandang kapabilitas, *power* dapat dikondisikan terkait dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki sebuah negara serta keuntungan strategis akibat letak negara tersebut. Dari perspektif geopolitik, negara didefinisikan sebagai kekuatan kontinental dan kekuatan maritim berdasarkan letak geografis, kepentingan dan proyeksi kapabilitasnya. Selain itu secara geopolitik, *power* dipandang dari dimensi militer dan strategis yang menekankan pada pemahaman koersif yang terkandung dalam konsep ini.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian penelitian eksplanatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didasarkan pada logika deduktif, yaitu penelitian dimulai dengan tema yang umum lalu disempitkan menjadi pertanyaan penelitian dan hipotesis dan terakhir menguji hipotesis dengan menggunakan bukti-bukti empiris. Kebenaran ilmiah dalam penelitian kuantitatif diperoleh melalui deskripsi akurat tentang suatu variabel dan hubungan antar variabel dan memiliki daya generalisasi yang baik meskipun tidak digunakan angka angka dan tidak bebas konteks³². Menurut Creswell³³, penelitian kuantitatif bertujuan untuk memverifikasi sebuah teori dan biasanya teori diletakkan pada bagian awal yaitu di bagian tinjauan literatur atau tercantum di dalam hipotesis ataupun pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif, teori merupakan serangkaian konstruksi atau variabel yang terbentuk dalam proposisi atau hipotesis yang menjelaskan hubungan

³² Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2003), hlm. 24

³³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches Third Edition*, (California: Thousand Oaks, 2009), hlm. 140.

antar variabel.³⁴ Dengan tujuan untuk menguji atau memverifikasi teori, peneliti mengungkapkan sebuah teori, mengumpulkan data dan merefleksikannya apakah teori tersebut benar atau tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel. Oleh karena itu, melalui metode ini diharapkan penelitian ini mampu membuktikan hipotesis peneliti bahwa tiga komponen geopolitik yaitu wilayah, energi dan power mempengaruhi konflik teritorial antara China Vietnam di laut China Selatan antara China Vietnam periode 2009 – 2011. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba melihat apakah teori tentang faktor-faktor geopolitik yang diungkapkan Emmers mampu menjelaskan konflik di laut China Selatan antara China dan Vietnam pada periode waktu 2009 sampai 2011.

Untuk memenuhi kebutuhan akan data, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data yang dipergunakan untuk keperluan analisa adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa data yang langsung diperoleh dari sumber atau informan yang dapat memberikan informasi yang valid, reliabel dan resmi, khususnya dari pernyataan formal pemerintah yang disampaikan melalui situs resmi pemerintah. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal, buku, dan situs-situs internet yang relevan dengan penelitian.

Data yang dikumpulkan kemudian diolah agar dapat menghasilkan informasi atau keterangan yang objektif dan merujuk pada fakta. Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian akan dianalisis melalui pendekatan kuantitatif, disesuaikan dengan kerangka teori yang telah dipersiapkan dan pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 143

1.7. Operasionalisasi Konsep

Model Analisa	Variabel	teori	Definisi	Indikator
konflik	Interstate teritorial dispute	Paul K. Huth & Todd Alle	kasus-kasus perselisihan antar pemerintahan mengenai lokasi sebuah perbatasan baik itu berupa batas darat maupun laut	Hubungan bilateral antara kedua negara (asimetris, permusuhan, normalisasi hubungan)
			ketika suatu pemerintahan tidak mengakui kedaulatan negara lain atas beberapa bagian wilayah territory yg berada dlm garis perbatasan pemerintahan negara lain tsb;	Perkembangan sengketa teritorial di LCS antara China dan Vietnam
			bila sebuah pemerintahan tidak mengakui kemerdekaan dan kedaulatan pemerintahan lain dan mencoba untuk mencaplok beberapa atau semua wilayah negara lain tersebut	
komponen geopolitik		Ralf Emmers	geopolitik adalah bagaimana ruang kewilayahan (<i>space</i>) dapat digunakan sebagai dasar kebijakan nasional, juga berfokus pada hubungan politis antara negara, strategi eksternal negara dan perimbangan kekuatan global serta tentang bagaimana memahami dasar kekuatan negara dan sifat-sifat interaksi antara	

			satu negara dengan negara lain	
	Wilayah		Wilayah berkaitan dengan pemerintahan (<i>statehood</i>), batas-batas nasional, klaim territorial dan nasionalisme.	Hubungan antara Kedekatan (<i>proximity</i>) kawasan sengketa dengan klaim kepemilikan China-Vietnam
				Pengaruh panjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan kawasan LCS terhadap resiko konflik
	Energi		Energi berkaitan dengan kebijakan luar negeri suatu negara karena sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi penduduknya, menjamin standar hidup dan membantu pembangunan bagi negara, sehingga seringkali berubah low politics menjadi high politics yang berkaitan dengan keamanan nasional.	Tingkat pemenuhan kebutuhan energi yang diperoleh dari Rasio kapasitas produksi energi dengan kapasitas produksi energi China – Vietnam periode 2009 sampai 2011
	Power		Power berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer dan sejalan dengan pandangan bahwa politik internasional adalah <i>struggle for power</i> dan power selalu merupakan	Kapabilitas maritime China–Vietnam

			tujuan yang ingin dicapai.	
				Tingkat agresivitas yang diperoleh dari skala intensitas konflik dikalikan jumlah insiden
				Strategi China-Vietnam untuk mempertahankan klaimnya di LCS

1.8. Model Analisis

Sebagai sebuah negara dengan sejarah permusuhan yang panjang, China dan Vietnam mengalami dinamika hubungan bilateral selama beberapa dekade yang diwarnai dengan permusuhan maupun dengan restorasi hubungan baik antara kedua negara serta periode membangun kembali kepercayaan kedua negara yang telah dimulai sejak era Deng Xiaoping. Hubungan kedua negara mencapai kedekatan ketika dilaksanakan perjanjian kerja sama strategis komprehensif yang ditandatangani kedua negara pada Juni 2008 dan pada November 2009, China dan Vietnam menandatangani perjanjian dan mengakhiri negoisasi perjanjian perbatasan yang telah dibahas selama 35 tahun. Hal ini menunjukkan pola hubungan bilateral yang positif antara China dan Vietnam. Meskipun demikian, China-Vietnam juga memiliki pola hubungan bilateral yang asimetris terlihat dengan perasaan terancam Vietnam atas klaim China di kawasan laut China Selatan. Sebagai pihak yang lebih lemah, Vietnam mencoba melakukan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat serta melakukan *balancing* terhadap perkembangan kapabilitas militer China.

Isu sengketa teritorial yang mulai meruncing antara China dan Vietnam negara masih terganjal akibat adanya tiga masalah perbatasan wilayah yaitu penentuan demarkasi 850-mil perbatasan darat, pembatasan *Gulf of Tonkin*, dan klaim kedaulatan yang tumpang tindih di Laut China Selatan. Sengketa di laut China

Selatan masih mengalami jalan buntu bahkan telah menyebabkan terjadinya beberapa *clash* di selama beberapa tahun terakhir, diantaranya insiden penangkapan lebih dari 22 kapal nelayan Vietnam sepanjang tahun 2010 di perairan sengketa di laut China Selatan, pengumuman pelarangan mencari ikan secara sepihak oleh China di laut China Selatan dan penyerangan atas kapal Vietnam oleh kapal China pada 2011.

Analisis tentang pengaruh komponen geopolitik terhadap konflik teritorial China-Vietnam di LCS Periode 2009–2011 perlu melihat faktor-faktor geopolitik karena sengketa teritorial di kawasan ini terkait dengan tiga hal utama yaitu wilayah, energi dan distribusi kekuatan. Dalam hal ini, wilayah berkaitan dengan pemerintahan (*statehood*), batas-batas nasional, klaim teritorial dan nasionalisme. Analisis mengenai wilayah akan melihat hubungan antara kedekatan wilayah sengketa yaitu LCS dan Kepulauan Spratly serta Paracel dengan klaim kepemilikan kedua negara ini. Klaim kepemilikan diperoleh melalui pengurangan antara jarak antara Spratly–Paracel dengan China-Vietnam dengan batas ZEE negara berdasarkan UNCLOS. Selain itu, akan dilihat pula hubungan antara panjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan LCS dengan resiko suatu negara apabila garis pantai tersebut ditutup aksesnya terhadap dunia internasional pada saat konflik berskala besar terjadi. Dalam hal ini, resiko suatu negara diperoleh melalui perkalian antara kerentanan dengan ancaman. Variabel kerentanan adalah garis pantai karena menjadi akses masuk baik untuk berhubungan dengan dunia internasional maupun akses masuknya invasi negara lain melalui laut. Sedangkan variabel ancaman adalah skala tahapan konflik internasional dikalikan dengan jumlah insiden. Dengan mengukur kedua komponen wilayah tersebut, maka akan ditemukan bagaimana komponen wilayah mempengaruhi konflik di LCS antara kedua negara.

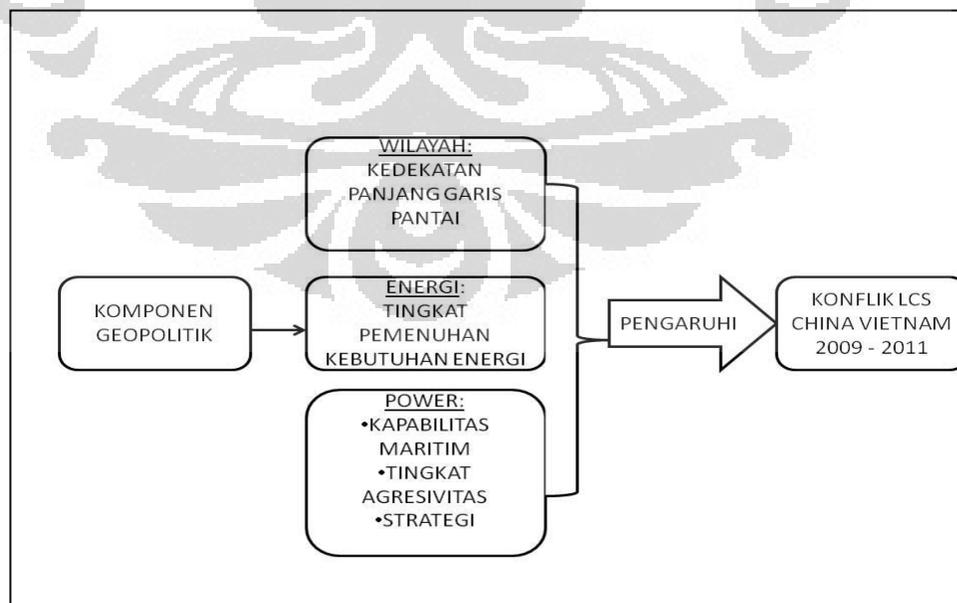
Kemudian, kebutuhan atas sumber daya alam telah menjadikan kedua negara tetap mempertahankan klaim atas Laut China Selatan. Untuk melihat bagaimana komponen energi mempengaruhi konflik, penulis akan menghitung tingkat pemenuhan kebutuhan energi yang diperoleh dari rasio antara konsumsi dengan produksi migas China-Vietnam pada tahun 2009 sampai 2011. Hal ini untuk melihat apakah selama tiga tahun kedua negara mampu memenuhi kebutuhan energi (migas) domestiknya. Negara yang tingkat pemenuhan kebutuhannya rendah, maka

menjadi rentan terhadap kelangkaan energi dan untuk mengatasinya cenderung akan melakukan eksplorasi energi bahkan di kawasan sengketa seperti di LCS.

Pada akhirnya, penggunaan *power* merupakan strategi bagi kedua negara untuk tetap mempertahankan klaim teritorial di laut China Selatan dengan dipersenjatahi oleh kapabilitas maritim masing-masing negara. Dalam komponen *power* ini akan dilihat kapabilitas militer khususnya angkatan laut kedua negara untuk mendukung klaim mereka di kawasan LCS. Kekuatan militer yang besar cenderung mampu mempertahankan klaimnya karena memiliki kemampuan koersif untuk memaksa negara lain. Selain itu, tingkat agresivitas kedua negara juga akan diteliti dengan mengkalikan antara variabel skala intensitas konflik dengan jumlah insiden. Hal ini untuk melihat negara mana yang lebih agresif dalam rangka mempertegas klaimnya di kawasan. Selain itu strategi kedua negara untuk menghadapi konflik juga akan dibahas secara singkat dalam komponen *power* ini. China cenderung menginginkan penyelesaian secara bilateral dan memodernifikasi militernya, sedangkan Vietnam cenderung menginginkan penyelesaian secara internasional/multilateral dan membuat perjanjian kerja sama pertahanan untuk mempertahankan klaimnya di kawasan ini.

Gambar model analisa dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.3. Model Analisis



1.9. Hipotesis

Dalam memulai penelitian ini, terdapat hipotesis yang diajukan sebagai pijakan awal dalam memulai rangkaian proses penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan prediksi yang diyakini oleh peneliti tentang hubungan antar variabel³⁵. Hipotesis merupakan prediksi atas hasil akhir dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Terdapat beberapa hipotesis yang akan dibuktikan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu

- a. Terkait dengan faktor wilayah, terdapat dua hipotesis penulis yaitu:
 - Semakin dekat negara pengklaim dengan kawasan sengketa, maka semakin tinggi klaim kepemilikan suatu negara atas kawasan yang disengketakan.
 - Semakin panjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan kawasan sengketa, maka semakin besar resiko apabila terjadi konflik berskala besar di kawasan LCS antara China–Vietnam.
- b. Terkait dengan faktor energi, semakin kecil persentase tingkat pemenuhan kebutuhan energi, maka akan semakin besar potensi untuk mengeksplorasi kawasan LCS yang masih disengketakan sehingga menyebabkan eskalasi konflik.
- c. Terkait dengan faktor *power*, terdapat 3 hipotesis yaitu:
 - Semakin besar kapabilitas maritim negara pengklaim, maka akan semakin meningkatkan aktivitas dan kebijakan yang memicu konflik diantara kedua negara.
 - Semakin tinggi tingkat agresivitasnya, maka semakin besar potensi untuk memprovokasi pihak lain.
 - Perbedaan strategi untuk mempertahankan klaim di laut China Selatan akan memberikan implikasi yang berbeda pula.
- d. Secara keseluruhan, faktor–faktor geopolitik yang terdiri dari wilayah, energi dan power mempengaruhi konflik teritorial semakin China Vietnam di Laut China Selatan antara China Vietnam periode 2009 – 2011.

³⁵ John Cresswell, *op. cit.*, hlm. 160

1.10. Sistematika Pembabakan

Sistematika pembabakan akan dipaparkan dalam empat bagian sebagai berikut :

Bab 1 merupakan pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, kerangka pemikiran, model analisis, asumsi, hipotesis serta operasionalisasi konsep.

Bab 2 membahas gambaran umum, dinamika konflik di LCS dan hubungan bilateral China–Vietnam terkait konflik di LCS periode 2009–2011. Secara khusus bab ini membahas tentang gambaran umum kondisi laut China Selatan yang diikuti dengan penjelasan tentang konflik di Laut China Selatan sampai dengan masa kini dan kemudian disusul dengan penjelasan tentang hubungan bilateral China – Vietnam terkait dengan konflik di Laut China Selatan.

Bab 3 menganalisis hubungan antara wilayah dan energi dengan sengketa teritorial antara China-Vietnam di LCS pada kurun waktu 2009-2011. Bab ini menganalisis pengaruh dari komponen wilayah yaitu indikator kedekatan wilayah dengan kawasan yang disengketakan dan panjang kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah yang disengketakan dengan potensi terjadinya konflik internasional.

Bab 4 menganalisis hubungan *power* dengan sengketa teritorial antara China-Vietnam di LCS pada kurun waktu 2009-2011. Bab ini menganalisis indikator-indikator *power* yang berkaitan dengan kapabilitas kekuatan maritim negara, tingkat agresivitas dan strategi untuk mempertahankan klaim di kawasan LCS dan pengaruhnya terhadap konflik China – Vietnam.

Bab 5 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB 2

GAMBARAN UMUM, DINAMIKA KONFLIK LAUT CHINA SELATAN, DAN HUBUNGAN BILATERAL CHINA – VIETNAM TERKAIT KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum kondisi laut China Selatan yang diikuti dengan penjelasan tentang konflik di laut China Selatan sampai dengan masa kini dan kemudian disusul dengan penjelasan tentang hubungan bilateral China – Vietnam terkait dengan konflik di laut China Selatan. Pembahasan dalam bab ini mengikuti model analisis yang telah dipaparkan pada bab 1 yaitu menekankan pada identifikasi secara lebih rinci terhadap variabel dependen yaitu konflik di laut China Selatan antara China – Vietnam periode 2009 – 2011. Untuk itu struktur pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama akan menjelaskan tentang gambaran umum kondisi laut China Selatan yang terdiri atas topografi laut China Selatan, potensi penting dari kawasan ini dan perkembangan konflik di kawasan laut China Selatan. Kemudian bagian kedua akan menjelaskan tentang hubungan bilateral kedua negara yang terdiri atas penjelasan tentang fase-fase hubungan kedua negara, asimetri dalam hubungan bilateral China Vietnam dan masalah sengketa perbatasan di laut China Selatan antara kedua negara.

2.1. Gambaran Umum Laut China Selatan

2.1.1. Topografi Laut China Selatan

Dari topografinya, laut China Selatan memiliki luas area sampai 648.000 mil persegi atau setara dengan 3.000.000 kilometer persegi di Samudera Pasifik, dengan panjang yang membentang dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan³⁶. Laut China Selatan dikelilingi oleh negara-negara ASEAN, di utara berbatasan dengan China dan

³⁶ Dong Manh Ngunyen, “Settlement Of Disputes Under The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea: The Case Of The South China Sea Dispute”, *University of Queensland Law Journal*, Vol. 25 No. 1, (Queensland, 2006), hlm. 89

Taiwan, di barat berbatasan dengan Vietnam, di Selatan berbatasan dengan Malaysia, Indonesia dan Singapura, serta di timur berbatasan dengan Filipina.

Permukaan laut China Selatan terdiri dari kira-kira 1.000.000 kilometer persegi landas kontinental yang kedalamannya sekitar 200 m dan 2.000.000 kilometer persegi kawasan permukaan laut yang kedalamannya melebihi 200 m³⁷. Terdapat berbagai jenis pulau, gugusan pulau, batu karang dan cekungan laut di laut China Selatan. Berbagai fitur laut tersebut dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu (1) Kepulauan Pratas yang terdiri dari sekelompok pulau dengan panjang 6 km, lebar 2 km, memiliki dua cekungan, dan terletak pada 170 mil laut dari Hong Kong, 240 mil laut di tenggara Taiwan dan 269 mil di utara Paracel; (2) Kepulauan Paracel yang terdiri dari dua gugusan pulau utama, kelompok barat yaitu Amphirite dan kelompok selatan yaitu Crescent (dengan lebih dari 30 pulau), meliputi 15.000 kilometer persegi luasnya dengan Pulau Woody sebagai pulau terpenting di kepulauan ini, (3) Kepulauan Spratly yang terdiri dari lebih dari 235 fitur yang memanjang sejauh 500 mil laut dari utara ke selatan dan 400 mil laut dari timur ke barat. Spratly terletak di 900 mil laut dari Hainan, 230 mil laut dari Vietnam di bagian timur, 120 mil laut dari Filipina di bagian barat dan 150 mil laut dari Malaysia di bagian barat laut. Semua pengklaim kepulauan ini (kecuali Brunei) telah menempatkan pasukan di pulau-pulau yang ada di Spratly dan (4) Macclesfield Bank yang terletak 60 mil laut di timur Paracel, panjangnya sekitar 75 mil laut dan lebarnya 33 mil laut. Fitur – fitur yang ada di Laut China Selatan yang letaknya sangat berdekatan dengan negara-negara pengklaim ini menjadi ajang perang klaim yang berpotensi menjadi sumber konflik bagi negara-negara pengklaim.

2.1.2. Potensi Penting Laut China Selatan: Letak Strategis dan Sumber Daya Alam

Kawasan laut Cina Selatan merupakan kawasan dengan potensi ekonomis dan strategis yang dapat menjadi sumber konflik sekaligus kerjasama³⁸. Terletak di persimpangan antara Eropa, Asia Barat dan India di satu sisi dan Jepang serta China

³⁷ *Ibid.*, hlm. 78

³⁸ Abd Rivai Ras, *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik Sudut Pandang Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Abdi Persada Siporenu Indonesia, Spers Mabes TNI AL, 2001), hlm. 37

di sisi lain serta berbagai sumber daya yang terkandung di dalamnya menyebabkan semua negara pengklaim memperhatikan potensi strategis dan ekonomis Laut China Selatan. Secara strategis, laut China Selatan merupakan jalur komunikasi laut yaitu *Sea Lanes of Communication* (SLOC) yang menghubungkan kawasan Eropa dan Asia, kawasan Asia Timur dengan Samudera Hindia dan Timur Tengah. Beberapa jalur laut di laut China Selatan yaitu Selat Malaka dan Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok dan Makasar merupakan jalur perkapalan tersibuk di dunia karena hampir setengah dari seluruh kapal perdagangan di dunia melewati kawasan ini.

Lebih dari seperempat jalur aktivitas perdagangan di dunia melewati kawasan laut China Selatan setiap tahun sehingga jalur ini merupakan “rumah” bagi beberapa jalur transportasi yang tersibuk di dunia. Lebih dari 80 sampai 90 persen impor minyak Jepang dan China melewati perairan ini³⁹. Setiap tahun ada sekitar 41.000 kapal dagang melewati kawasan ini. Pasokan minyak yang diangkut melalui Selat Malaka dari Samudra Hindia menuju Asia Timur mencapai enam kali lipat jumlah kapal yang melewati Terusan Suez dan 17 kali lipat yang melewati terusan Panama. Selain minyak, pengangkutan dua pertiga dari LNG dunia juga melewati laut China Selatan. ALKI atau *sea lanes of communications* yang ada di LCS sangatlah penting tak hanya bagi perekonomian Asia Tenggara, namun juga Asia timur, Eropa dan AS. ALKI juga penting tak hanya untuk tujuan ekonomi dan komersial namun juga untuk kepentingan militer dunia.

Selain menjadi jalur perdagangan penting bagi perekonomian dunia, laut China Selatan juga kaya akan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Dari sumber daya alam hayati, potensi perikanan di LCS sangatlah besar manfaatnya bagi negara-negara pantai di kawasan ini. Dengan total area 3,56 kilometer persegi, laut China Selatan merupakan laut terbesar dan terdalam di dunia dengan kedalaman rata-rata adalah 1212 km dan titik terdalam adalah 5567 meter. Dengan kedalaman dan luasnya ini, kawasan laut China Selatan sangatlah cocok untuk tempat berkembangbiaknya berbagai jenis ikan dalam jumlah yang besar. Data statistik

³⁹ Alice D. BA, “Staking Claims and Making Waves in the South China Sea: How Troubled Are the Waters?” *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No. 3 (2011), hlm. 280

menyebutkan bahwa nilai ekonomi ikan tangkapan di LCS pada pertengahan 1990an adalah sekitar 3 milyar USD. LCS menyediakan 25% kebutuhan protein yang diperlukan oleh 500 juta orang dan 80% dari makanan seluruh penduduk Filipina. LCS menempati urutan ke-19 zona penangkapan ikan dunia dalam hal produksi hasil laut dengan tangkapan sebanyak 8 juta ton metrik ikan pertahun⁴⁰. Sebagai contoh, menurut data yang dikelola oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, wilayah Penangkapan Perikanan laut China Selatan di kawasan yang diklaim Indonesia saja memiliki luas perairan sekitar 550.000 km persegi dan mempunyai sumber daya ikan sebesar 1.057.050 ton pertahun dengan tingkat produksi 379.900 ton pertahun⁴¹. Pemanfaatan sumberdaya perikanan di kawasan ini memiliki dua aspek penting yaitu bagi perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan dan bagi keamanan untuk meningkatkan upaya pengamanan wilayah perairan perbatasan tersebut. Oleh karena itu, potensi perikanan yang sangat luar biasa di kawasan ini bahkan lebih signifikan daripada potensi sumber daya energi minyak dan gas alam yang masih berupa perkiraan.

Sementara itu, potensi ekonomis laut Laut China Selatan juga semakin besar ketika pada akhir 1960an, hasil penelitian geologis melaporkan kemungkinan adanya kandungan gas alam, minyak bumi dan sumber perikanan yang sangat kaya di kawasan tersebut⁴². Laut China Selatan memiliki potensi gas alam sekitar 7.500 kilometer kubik (266 triliun kaki kubik). Selain itu, Laut China Selatan jadi pusat perhatian banyak negara besar karena berdasarkan perhitungan kasar, terdapat kekayaan minyak mentah di kawasan ini mencapai 7 miliar barel dan 900 triliun kaki kubik di bawah permukaan laut⁴³. Menurut perkiraan ahli energi dari China, potensi minyak di kawasan tersebut hingga 213 milyar barel, sedangkan kandungan gas alam diperkirakan hingga 2 quadrillion kubik per kaki⁴⁴. Potensi energi yang besar di

⁴⁰ Dong Manh Nguyen, *loc. cit.*, hlm. 5.

⁴¹ <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-16181-4106202803-Chapter1.pdf> diakses pada 25 Mei 2012 pukul 11.02

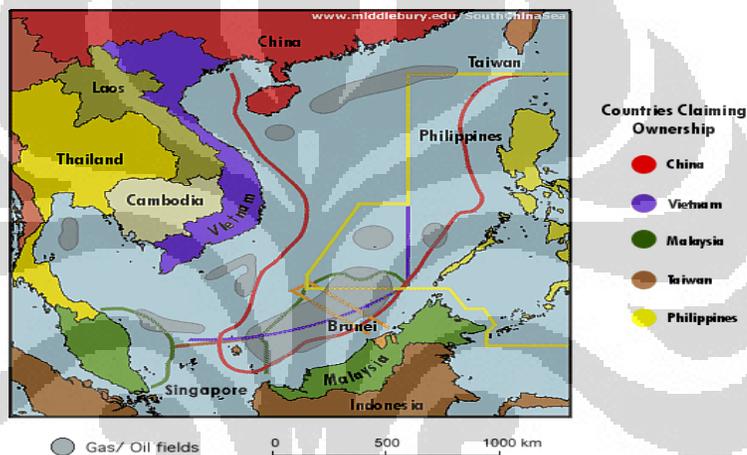
⁴² Min Gyo Ko *op. cit.*, hlm. 36.

⁴³ http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=7457&type=99 diakses pada 25 Mei 2012 pukul 10.53

⁴⁴ EIA, "South China Sea: Country Analysis Briefs", diakses melalui http://www.eia.gov/cabs/South_China_Sea/pdf.pdf pada 26 Desember 2011 pukul 15.14.

kawasan ini menjanjikan masa depan keamanan energi bagi peningkatan konsumsi energi di Negara-negara pengklaim sebab menurut perkiraan *Energy Information Administration* (EIA), konsumsi minyak di Negara-negara Asia Timur akan mengalami kenaikan setiap tahun sebanyak 2,7 persen per tahun dari sekitar 14,8 juta barel perhari (*million barrels per day* atau *MMbbl/d*) pada 2004 mencapai sekitar 29,8 *MMbbl/d* pada tahun 2030. Sedangkan konsumsi minyak China sendiri akan meningkat sekitar setengah dari jumlah tersebut⁴⁵.

Gambar 2.1. Peta potensi sumber daya minyak dan gas⁴⁶



Yang tak kalah penting bagi Negara pengklaim adalah pulau-pulau di kedua kepulauan di laut China Selatan memiliki nilai strategis sebagai dasar hukum untuk memperoleh hak – hak yuridis eksklusif atas perairan tersebut termasuk segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Hal ini sangatlah penting bagi Negara-negara yang bersengketa di kawasan itu yaitu Brunei, Malaysia, China, Vietnam, Filipina dan Taiwan untuk menentukan batas-batas kawasan atau teritori mereka. Negara-negara yang bersengketa tersebut melihat posisi strategis laut China Selatan yang membentang dari Pulau Hainan hingga Malaysia dan Singapura. Dengan fakta bahwa laut China Selatan merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia, maka Negara manapun yang menguasai wilayah ini dapat memperoleh keuntungan

⁴⁵ IEA. “International Energy Administration Country Brief: South China Sea” diakses melalui http://205.254.135.7/EMEU/cabs/South_China_Sea/pdf.pdf pada 25 Mei 2012 pukul 11.33.

⁴⁶ *Ibid*

ekonomi yang besar sebagai Negara – Negara yang dilewati kapal dagang dari seluruh dunia. Sebagai contoh, China mengklaim sebagian besar kawasan ini yang terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur di Propinsi Hainan dengan menyatakan bahwa klaim mereka berdasarkan fakta sejarah bahwa kepulauan Spratly dan Paracel merupakan bagian dari bangsa Cina sejak 2000 tahun yang lalu. Sementara itu Vietnam, yang juga mengklaim kawasan ini, menyanggah klaim China dan menyatakan bahwa perairan laut China Selatan merupakan bagian dari kawasan mereka sejak tahun 1940an.

Oleh karena itu, tidak heran apabila kawasan laut China Selatan tidak pernah ‘sepi’ dari sengketa akibat determinasi setiap negara pengklaim yang ingin menguasai potensi ekonomi dan strategis yang terkandung di Laut China Selatan. Bahkan, pada masa kekinian, laut China Selatan semakin menjadi perairan yang lebih ‘berbahaya’ daripada di masa lalu karena potensinya yang menjadi rebutan bagi semua Negara pengklaim. Kawasan sengketa yang membentang 1,2 juta mil persegi ini sangatlah penting bagi perdagangan dunia dan persediaan energi global sehingga kendali atas kawasan ini dapat pula menjadi sumber kebanggaan nasional suatu Negara.

2.1.3. Dinamika Konflik Di Laut China Selatan

Sengketa yang terjadi di laut China Selatan sangatlah kompleks karena adanya tumpang tindih klaim antar negara pengklaim. Tumpang tindih ini terjadi karena wilayah perbatasan teritorial satu negara pengklaim bertindihan dengan negara lain. Saat ini terdapat dua sengketa di kawasan laut Cina Selatan, yaitu sengketa teritorial kawasan Kepulauan Paracel, Spratlys, dan Kepulauan lainnya (selain dua kepulauan utama tersebut, terdapat juga kawasan kepulauan Pratas yang dikenal sebagai Dongsha, dan Macclesfield Bank yang dikenal sebagai *Quan Dao Trung Sa* atau *Zhongsha Qundao*); dan sengketa perbatasan kawasan laut akibat tumpang tindihnya klaim landas batas maritim antara negara-negara di kawasan tersebut.⁴⁷

Hal ini terjadi karena pengukuran perbatasan laut lebih sulit dilakukan daripada pengukuran perbatasan darat sebab perbatasan laut harus pula

⁴⁷ Abd Rivai Ras *op. cit.*. hlm. 53

memperhitungkan kenaikan dan penurunan permukaan air laut yang mempengaruhi pengukuran atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara yang bersangkutan. Selain itu, Negara – negara pengklaim kawasan ini juga memiliki dasar tersendiri untuk mengklaim kawasan yang mereka yakini masuk sebagai bagian dari teritori mereka khususnya berdasarkan prinsip landas kontinental (*continental shelf*) atau ZEE sesuai dengan UNCLOS. Klaim beberapa negara yang bersengketa di kawasan Laut China Selatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1. Klaim Teritorial Negara – Negara
di Sekitar Kawasan laut China Selatan⁴⁸**

Negara	Laut China Selatan	Kep. Spratly	Kep. Paracel	Teluk Thailand
Brunei	UNCLOS	Tidak ada klaim formal	Tidak mengklaim	Tidak ada keterangan
Kamboja	Tidak ada keterangan	Tidak ada keterangan	Tidak ada keterangan	UNCLOS
China	Semua diklaim	Semua diklaim	Semua diklaim	Tidak ada keterangan
Indonesia	UNCLOS	Tidak mengklaim	Tidak mengklaim	Tidak ada keterangan
Malaysia	UNCLOS	3 pulau	Tidak	UNCLOS
Filipina	Jumlah yang signifikan	8 pulau	Tidak	Tidak ada keterangan
Taiwan	Semua diklaim	Semua diklaim	Semua diklaim	Tidak ada keterangan
Thailand	Tidak ada keterangan	Tidak ada keterangan	Tidak ada keterangan	UNCLOS
Vietnam	Semua diklaim	Semua diklaim	Semua diklaim	UNCLOS

⁴⁸ EIA, *op. cit.*,

Tabel diatas meringkas berbagai klaim yang dibuat oleh negara-negara di sekitar kawasan laut China Selatan secara khusus, klaim keenam negara yang bersengketa di LCS akan dijabarkan sebagai berikut. Pertama, klaim Brunei di laut China Selatan hanya terbatas atas kawasan Zona Ekonomi Eksklusif saja yang dihitung dari satu karang paling selatan di Kepulauan Spratly. Akan tetapi Brunei tidak membuat klaim formal atas Kepulauan Spratly serta tidak mengklaim kepulauan Paracel. Kedua, China mengklaim hampir semua dari kawasan laut China Selatan dengan klaim atas keseluruhan Kepulauan Spratly (China menyebutnya Kepulauan Nansha) dan menempatkan pasukan militernya di beberapa pulau di kepulauan ini. Pada tahun 1974, China merebut kepulauan Paracel dari Vietnam dan mempertahankan kekuasaannya di pulau-pulau tersebut sampai saat ini. Klaim China di LCS adalah berdasarkan ZEE dan prinsip landas kontinental serta catatan sejarah dinasti Han (110 M) dan Ming (1403 – 1433M). China juga mengklaim Kepulauan Pratas.

Ketiga, klaim Malaysia di LCS hanya terbatas pada klaim untuk menentukan ZEE dan batas landas kontinental saja serta hanya mengklaim 3 pulau di Spratly. Upaya yang dilakukan Malaysia untuk memperkuat klaimnya di salah satu pulau yang diklaimnya adalah dengan membangun pariwisata di sana dan melakukan penambahan tanah sehingga meningkatkan ketinggian pulau yang lain. Meskipun demikian, Malaysia tidak membuat klaim atas kepulauan Paracel. Keempat, Filipina mengklaim porsi yang cukup signifikan di Laut China Selatan, dengan menguasai 8 pulau di Kepulauan Spratly (Filipina menyebutnya Kalayaan). Namun, Filipina tidak mengklaim kepulauan Paracel. Klaim Filipina didasari oleh ZEE dan batas landas kontinental serta sebuah ekspedisi penjelajah Filipina pada tahun 1956

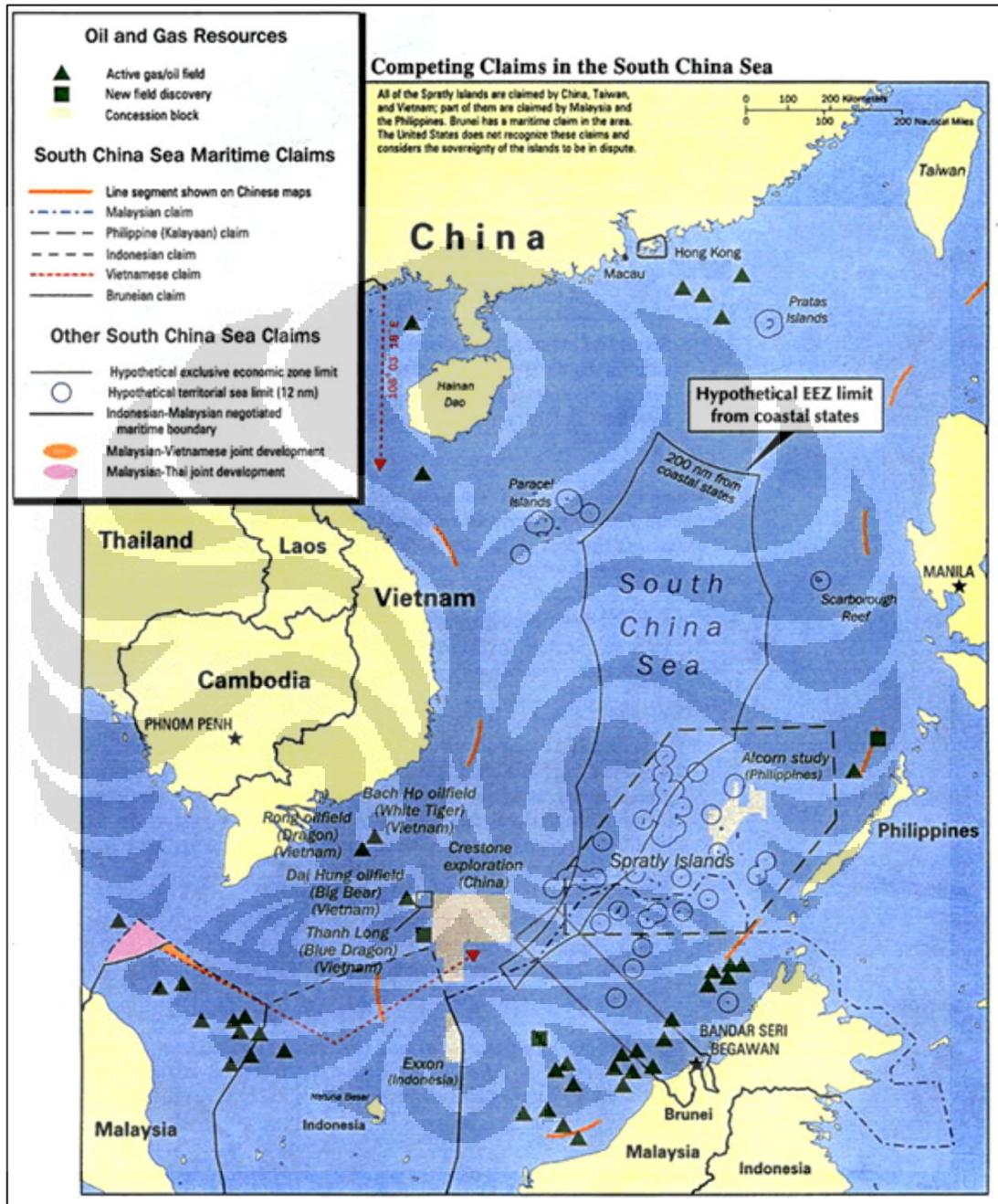
Kelima, Taiwan mengklaim hampir semua laut China Selatan, mengklaim semua pulau di kepulauan Spratly dan Paracel dengan dasar yang sama seperti klaim yang dibuat oleh China. Taiwan juga mengklaim Kepulauan Pratas. Keenam, Vietnam mengklaim hampir semua laut China Selatan berdasarkan ZEE dan batas landas kontinentalnya. Vietnam mengklaim Kepulauan Spratly (Vietnam

menyebutnya Truong Sa) dan telah menghuni 20 pulau yang ada di kepulauan tersebut. Meskipun China telah merebut Paracel dari Vietnam pada tahun 1974, namun Vietnam tetap mengklaim kepulauan Paracel (Vietnam menyebutnya Hoang Sa). Vietnam juga mengklaim Teluk Thailand berdasarkan ZEE dan batas landas kontinentalnya.

Klaim-klaim teritorial di kawasan laut China Selatan oleh keenam negara tersebut mempunyai tiga poros utama, yaitu klaim teritorial berbasis klaim penemuan pertama, klaim teritorial berbasis pendudukan efektif, dan klaim pendudukan berbasis kedekatan teritorial. China dan Vietnam mendasarkan klaimnya pada penemuan pertama, sementara Filipina menggunakan campuran antara fakta historis dan kedekatan teritorial, sedangkan Malaysia menggunakan kedekatan teritorial. Ketiga bentuk klaim tersebut menyebabkan permasalahan kedaulatan di untaian kawasan Kepulauan Paracel, Spratly, dan kepulauan-kepulauan kecil di kawasan laut China Selatan.

Hingga saat ini, Kepulauan Paracel diklaim secara penuh oleh China dan Vietnam, sementara Filipina, Malaysia, dan Brunai Darussalam mengklaim hanya sebagian wilayah kawasan kepulauan ini. Dari jumlah 60 pulau yang tercatat, Vietnam memiliki kontrol terhadap 22 pulau, Filipina mempunyai klaim terhadap 11 fitur, China mempunyai kontrol resmi terhadap 14 fitur, Malaysia mempunyai kontrol terhadap 10 fitur. Taiwan mempunyai kontrol terhadap Pulau Itu Aba, yang merupakan pulau terbesar di kawasan tersebut.

Gambar 2.2. Tumpang Tumpang Tindih Klaim di Spratly dan Paracel⁴⁹



Klaim Cina dan Vietnam mengitari kawasan Spratly dan Paracel bertumpang tindih dengan klaim yang diajukan Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Negara-negara ini mempunyai klaim spesifik terhadap kawasan teritorial mereka, Filipina

⁴⁹Ralf Emmers, *loc. cit.*, hlm. 6.

mempunyai klaim terhadap Kalayaan (*Freedomland*) sebanyak 53 fitur sebagai perpanjangan dari kawasan kepulauan Palawan yang bertumpang tindih dengan klaim Malaysia yang berkisar dari kawasan Sarawak/Sabah. Sedangkan klaim Brunei yang dimulai dari kawasan teritorialnya sendiri, bertumpang tindih dengan klaim negara Malaysia dan Filipina.

Penjelasan mengenai laut China Selatan dalam UNCLOS juga turut menjadi penyebab terjadinya sengketa di kawasan ini. Pertama, laut China Selatan merupakan laut ‘semi-tertutup’ atau *semi-enclosed sea* sesuai dengan definisi yang dibuat dalam *Law of The Sea Convention* (Konvensi Hukum Laut) Artikel 22. Artikel ini menyebutkan bahwa laut semi-tertutup terdiri dari ‘sebagian atau keseluruhan laut yang merupakan laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dari dua atau lebih negara pantai’. Kemudian pada Konvensi Hukum Laut Artikel 123 juga disebutkan bahwa negara-negara pantai laut ‘semi-tertutup’ harus bekerja sama dalam pengelolaan segala sumber daya yang ada di kawasan tersebut. Hal ini menyiratkan adanya ‘keharusan’ untuk melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi juga dalam keamanan di laut tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, yang dominan terjadi bukanlah kerja sama namun perebutan klaim teritorial karena masing-masing negara pantai tidak mematuhi hukum laut yang ada karena hukum tersebut tidak mengikat serta keinginan untuk mengedepankan kepentingan nasional sehingga cenderung mengarah pada tindakan unilateral untuk memperoleh kepentingan ekonomi dan strategis di LCS.

Kedua, laut China Selatan bukanlah “perairan internasional” atau *international waters* meskipun seperempat dari seluruh kapal dagang dunia melewati perairan ini. Namun demikian, negara – negara pantai yang mengklaim kawasan ini tidak hanya diberikan hak untuk menguasai wilayah perairan ini, namun juga memiliki kewajiban untuk membuka kawasan ini sebagai jalur yang bebas untuk dilewati negara lain atau memperoleh *freedom of navigation* serta kebebasan untuk meletakkan kabel, pipa dan alat lainnya di dasar laut yang penggunaannya sesuai

dengan hukum internasional. Dalam menggunakan kebebasan tersebut, negara – negara lain harus memperhatikan hak dan kewajiban dari negara pantai⁵⁰. Permasalahan timbul akibat sulitnya menentukan apa saja tindakan yang memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai dan apa saja tindakan yang dianggap tidak menghormati negara pantai. Hal inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan sengketa di laut China Selatan. Seperti yang terlihat dalam ‘insiden Impeccable’ pada tahun 2009 antara China sebagai negara pantai dengan Amerika Serikat sebagai Negara luar yang memiliki hak untuk *freedom of navigation*.

‘Insiden Impeccable’ terjadi pada Maret 2009 ketika kapal survei laut Amerika Serikat yaitu USNS Impeccable dihadang oleh kapal China di selatan Hainan. Amerika Serikat menyatakan bahwa operasi yang dilakukan oleh kapal Impeccable merupakan operasi yang tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan hukum laut *freedom of navigation* yang diberikan kepada negara asing di dalam Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara. Namun, pihak China berpendapat bahwa Amerika Serikat berusaha untuk menafsirkan konvensi hukum laut sesuai dengan kepentingannya sendiri dan bahwa operasi Impeccable merupakan kapal riset maritim (bertujuan melakukan riset dan survei militer) yang membutuhkan ijin dari China. Insiden ini menjadi katalis bagi intervensi AS pada sengketa di laut China Selatan⁵¹.

Ketiga, perbedaan klaim mengenai pembatasan zona maritim dan landas kontinen di Laut China Selatan berasal dari ketidaktaatan atas UNCLOS 1982, interpretasi subjektif, tidak akurat, dan bahkan menyalahi UNCLOS dalam rangka menguntungkan negosiasi mereka. UNCLOS 1982 menyebut “Pulau” sebagai “sebuah kawasan daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh perairan, dan berada di atas permukaan laut ketika air pasang”. Pulau juga harus memenuhi kriteria untuk dapat menunjang adanya kehidupan. UNCLOS juga menyebut bahwa

⁵⁰ Sam Bateman, “Regime building in the South China Sea – Current Situation and Outlook”, *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs* Vol. 3 No. 1, (2011), hlm. 2

⁵¹ *Ibid* hlm. 3

fitur yang tidak dapat menunjang kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi tidak dapat dijadikan klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen sebuah negara. Fitur yang tidak disebut sebagai pulau hanya mendapat kawasan teritorial perairan sepanjang 12 Nm dan 500 meter zona aman.

Konflik laut Cina Selatan menyisakan berbagai perbedaan dalam interpretasi perbatasan maritim, yaitu Perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen di teluk Biebu antara Vietnam dan Cina; perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen di kawasan Selatan Laut Cina Selatan antara Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunai, dan Indonesia; Perbatasan kawasan laut dan landas kontinen antara Vietnam, Malaysia Thailand dan Kamboja; dan perbatasan wilayah laut di kawasan Paracel dan Spratly.

Konflik di laut China Selatan merupakan konflik kepentingan antar Negara pengklaim karena semua Negara pengklaim memiliki perbedaan pendapat tentang kepulauan kepulauan yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh potensi strategis dan ekonomi LCS yang dapat diperoleh dengan menguasainya secara tersendiri sehingga menyebabkan semua Negara pengklaim mendasarkan klaim mereka atas pengakuan legal maupun historis.⁵² Dengan kepentingan – kepentingan ini, mereka saling bersaing untuk menguasai LCS. Selain itu, masing masing Negara pengklaim juga terlihat memiliki sikap yang saling bertentangan terkait dengan kedaulatan teritorial di kawasan tersebut karena kepentingan ekonomi dan keamanan. Sulitnya kerja sama untuk mengatasi sengketa di kawasan ini menyebabkan hampir semua Negara pengklaim pernah mengalami insiden konflik satu sama lain seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

⁵² Sopheada Phy, "Peace and Conflict Monitor Analysis II: The Management Of The Spratly Islands Conflict: Success Or Failure?" (2 Juni 2009) diakses dari http://www.monitor.upeace.org/printer.cfm?id_article=623 pada 25 Mei 2012 pukul 15.00

Tabel 2.2. Insiden Konflik Antar Negara Pengklaim Laut China Selatan sejak 1974⁵³

Tanggal	Negara yang terlibat	Insiden
1974	China – Vietnam	China merebut Paracels dari Vietnam dan menewaskan 18 tentara pada konflik di salah satu pulau di Paracels.
1988	China – Vietnam	Konflik militer kedua negara di Johnson Reef di Spratly. Beberapa kapal Vietnam tenggelam dan 70 pelaut tewas.
1992	China – Vietnam	Vietnam menuduh China menerjunkan pasukan di Da Luc Reef. China menangkap hampir 20 kapal kargo Vietnam yang mengangkut barang dari Hong Kong pada Juni sampai September.
1994	China – Vietnam	Konfrontasi militer antara China – Vietnam di kawasan laut teritorial China di kawasan eksplorasi minyak Tu Chinh milik Vietnam.
1995	Taiwan–Vietnam	Artileri Taiwan menembaki kapal bahan bakar Vietnam
	China – Filipina	China menduduki Mischief Reef yang dikuasai oleh Filipina. Tentara Filipina mengusir pasukan China dan menghancurkan penanda China di pulau itu.
1996	China – Filipina	Pada Januari, Kapal China dan Filipina terlibat tembak menembak selama 90 menit di kepulauan Capone dekat Luxon, utara Manila.
1997	China-Filipina	Angkatan Laut Filipina mengusir kapal nelayan China dari Scarborough Shoal, kemudian pada bulan April, kapal Filipina mencabut penanda dan bendera China di pulau itu. China merespon dengan

⁵³ Diolah oleh penulis

		mengirimkan 3 kapal perang untuk berpatroli di pulau-pulau yang dikuasai Filipina yaitu Panata dan Kota.
1998	Filipina-Vietnam	Pada Januari, tentara Vietnam menembaki sebuah kapal nelayan Filipina di dekat Tennes (Pigeon) Reef
1999	China-Filipina	Pada Mei dan Juni, kapal nelayan China ditenggelamkan oleh kapal perang Filipina.
	Filipina-Vietnam	Pasukan Vietnam menembaki pesawat udara Filipina yang melakukan pengintaian di Spatly.
2000	China-Filipina	Pasukan Filipina menembaki nelayan China, menewaskan 1 orang dan menangkap 7 orang,
2001	China-Filipina	Pada Januari sampai Maret, Filipina menangkap 14 kapal nelayan berbendera China, mengambil hasil tangkapan mereka dan menerjunkan banyak kapal di kawasan sengketa di Spratly. Pada Maret, Filipina mengirimkan kapal penjaga untuk mencegah tindakan China yang ingin memasang patok di Scarborough Shoal
2002	Filipina-Vietnam	Pada bulan Agustus, pasukan Vietnam memberikan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang mengitari kawasan Spratly
2003	Vietnam-China	Pada April – Juni, Pasukan Vietnam menggiring dengan paksa, memonitor dan menghentikan operasi normal dari kapal China yang melakukan eksplorasi seismic di LCS.
	China-Filipina	Angkatan Laut Filipina juga menangkap kapal nelayan China sebanyak lebih dari 50 kali, menangkap dan menahan lebih dari 10 nelayan

		China.
	Malaysia–China	Angkatan Laut Malaysia menggiring paksa 50 kapal nelayan China dari kawasan Spratly.
2004	Vietnam– Taiwan	Taiwan membuat sebuah “bird watching stand” di kawasan Spratly dan dianggap oleh Vietnam sebagai tindakan yang mengarah pada ekspansi wilayah
2005	-	Tidak ada insiden karena pada tahun ini China mulai bekerja sama dengan negara – negara di kawasan Asia Tenggara untuk berpatroli di LCS (misalnya dengan Brunei, Filipina dan Vietnam)
2006	China–Vietnam	China memasang penanda baru di kawasan Paracel sehingga menyebabkan kemarahan Vietnam dan dianggap sebagai tindakan yang ‘invalid’. Tensi yang tinggi diantara kedua negara telah menimbulkan dihentikannya bantuan China kepada Vietnam pada Desember 2006.
2007,	China–Vietnam	Pada April, 4 kapal Nelayan Vietnam ditangkap oleh China di kawasan kepulauan Spratly yang disengketakan. Pada Juli 2007, sebuah kapal nelayan Vietnam tenggelam setelah ditembaki oleh kapal China. Insiden ini menewaskan satu orang nelayan Vietnam.
2008	Filipina–China	Parlemen Filipina mengeluarkan Maritime Boundary Act yang didalamnya terdapat pasal yang memasukan wilayah Spratly ke dalam wilayah kedaulatan Filipina. Hal ini menimbulkan kemarahan di pihak China yang kemudian

		melayangkan protes keras kepada Filipina.
2009	China–Vietnam & Malaysia	Malaysia dan Vietnam memperluas batas landas kontinental mereka dari 200 mil menjadi 350 mil laut di LCS dan menimbulkan protes keras dari China dengan melayangkan <i>nota verbale</i>
	China–AS	Insiden penembakan atas kapal survei AS Impeccable sehingga menyebabkan ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Insiden tersebut menjadi pendorong campur tangan AS atas berbagai masalah sengketa di LCS.
2010	China–Vietnam	Terjadi lebih dari 20 kali insiden penangkapan kapal nelayan Vietnam oleh kapal patroli China di kawasan Laut China Selatan sepanjang tahun 2010
2011	China–Vietnam	Pada Juni, Vietnam menuding bahwa kapal China merusak kapal survei minyak Vietnam dan memotong kabel eksplorasi pada kapal lainnya. Kapal China yang didukung oleh kapal patrol tersebut merusak kabel eksplorasi seismik Vietnam. Vietnam menyatakan bahwa pengrusakan dan pemotongan kabel ini sudah dua kali dilakukan China dalam waktu dua minggu sehingga menghalangi kegiatan eksplorasi gas dan minyak sehingga tindakan China ini dianggap sebagai ‘tindakan terencana’ untuk memperburuk ketegangan regional di LCS. Hanoi menyatakan bahwa kedua insiden terjadi di dalam wilayah 200 mil laut Vietnam yang merupakan kawasan ZEE Vietnam yang dijamin oleh hukum internasional.

Dari tabel di atas, insiden konflik antar negara pengklaim terlihat memanas sejak tahun 1974 dengan direbutnya Kepulauan Paracel dari Vietnam. Inilah kali pertama konflik militer terbuka di laut China Selatan antara kedua negara pengklaim yang sama-sama mengklaim keseluruhan kawasan LCS beserta semua kepulauan yang ada di dalamnya. Sejak itu, konflik antar negara pengklaim lainnya terus terjadi. Dari beberapa insiden yang terjadi, *clash* yang paling sering adalah antara China dengan Vietnam yaitu hampir setiap tahun terjadi insiden dalam tiga dekade terakhir sejak direbutnya Paracel dari Vietnam. Sementara itu, negara lain yang juga sangat sering mengalami *clash* adalah Filipina dengan China maupun Vietnam. Karena ketiga negara ini merupakan negara-negara yang paling merasa memiliki kawasan LCS, berdasarkan kedekatan geografis mereka dengan kawasan LCS (yaitu Filipina dan Vietnam) maupun berdasarkan klaim sejarah (yaitu China dengan peta historis yang memasukkan LCS), maka tak heran apabila keinginan mereka untuk mempertahankan klaim kedaulatan di LCS telah menjadi sebab konflik yang berkepanjangan (*protracted conflict*) selama hampir tiga dekade terakhir.

Konflik di LCS antar negara pengklaim ini menjadi sangat berkepanjangan dan tak terhindarkan akibat adanya klaim kedaulatan yang didasari kepentingan nasional masing-masing negara pengklaim. Alasan pertama yang mendasari kepentingan nasional adalah kesadaran negara pengklaim bahwa mereka membutuhkan sumber daya yang terdapat di kawasan sengketa tersebut sehingga mereka menginginkan sumber daya ekonomi yang ada di LCS untuk kesejahteraan mereka⁵⁴. Sumber daya berupa minyak, gas, ikan, dan sumber daya lainnya merupakan kebutuhan dasar manusia dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di negara pengklaim. Yang kedua, UNCLOS yang baru dibuat pada tahun 1982 belum mampu 'menegaskan' klaim historis yang telah diyakini oleh negara-negara pengklaim khususnya China, Vietnam dan Filipina⁵⁵. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS malahan menyebabkan konflik menjadi semakin memanas karena mengubah luas kawasan yang masuk dalam wilayah kedaulatan negara pengklaim.

⁵⁴ Sopheada Phy, *loc. cit.*, hlm. 2

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 4

Ada negara yang diuntungkan, namun juga ada yang dirugikan karena aturan – aturan yang ada dalam UNCLOS. China, Vietnam dan Taiwan mengklaim seluruh Spratly namun harus berhadapan dengan Filipina, Malaysia, dan Brunei yang menggunakan ZEE untuk memperkuat klaim mereka. Selain itu, berdasarkan bagian ke VI dalam aturan Batas landas Kontinental UNCLOS, Filipina, Malaysia dan Brunei memiliki kedekatan dengan kawasan sengketa sehingga klaim mereka menjadi lebih berdasar. Hal ini menimbulkan ketegangan diantara beberapa negara pengklaim lain yang tidak dapat menggunakan ZEE untuk memperluas dan memperkuat klaim mereka yaitu China, Vietnam dan Taiwan.

Bagi beberapa negara ASEAN, untuk mengatasi masalah sengketa di LCS memandang perlu adanya instrumen penyelesaian sengketa yang spesifik. Pada periode sebelum 1992, negara-negara anggota ASEAN hanya merujuk pada *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) dan *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* yang disepakati pada tahun 1976 dan 1995 yang menjadi instrumen legal untuk mengatur hubungan antar negara terkait laut China Selatan. Pada bulan Juli 1992, para pemimpin ASEAN mengadopsi kesepakatan mengenai kesamaan persepsi dan posisi dalam konflik laut China Selatan dalam *ASEAN Declaration on the South China Sea*, yang ditandatangani di Manila. Deklarasi tersebut menghimbau pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan di laut China Selatan untuk terus menjunjung TAC sebagai dasar tata laku internasional di kawasan tersebut. Vietnam yang saat itu belum menjadi negara anggota ASEAN mendukung deklarasi tersebut. Namun, China menolak untuk mengikuti diskusi multilateral tersebut dan terus bersikeras bahwa permasalahan di Kepulauan Paracel dan Spratly bukan merupakan permasalahan ASEAN secara keseluruhan.

Pada Desember 1997, ASEAN dan China mengeluarkan pernyataan bersama akan membangun hubungan dan kepercayaan yang lebih baik di abad ke-21. Semenjak itu, serangkaian kerangka China-ASEAN telah dilakukan. Misalnya, China dan Vietnam menandatangani perjanjian perbatasan darat pada bulan Desember 1999, yang diikuti oleh perjanjian demarkasi zona maritim di Teluk Tonkin pada tahun

2000. Kemudian, negara-negara pengklaim LCS di ASEAN dan China melakukan penandatanganan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) pada tahun 2002 yang diharapkan mampu mengatasi masalah sengketa LCS antara China dan negara-negara ASEAN. Pada deklarasi tersebut, China menyetujui poin yang menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di kawasan laut Cina Selatan akan diselesaikan secara damai, menolak penggunaan kekerasan; menghargai kebebasan navigasi di kawasan; dan untuk mulai bekerja bersama-sama negara ASEAN lainnya untuk menghasilkan sebuah *Code of Conduct* (CoC) sebagai metode penyelesaian konflik.

Meskipun DoC telah dibuat antar negara pengklaim dan adanya keinginan untuk membuat CoC, namun hal itu tidak serta merta menghentikan konflik yang ada di LCS. Insiden terus terjadi selama hampir tiga dekade. Bahkan sejak tahun 2006 sampai awal 2008, insiden-insiden di kawasan LCS menjadi semakin sering terjadi meskipun DoC telah dibuat dan kerja sama lainnya juga telah dilaksanakan. Kejadian kejadian konflik ini menunjukkan lemahnya DoC karena tak mampu mencegah konflik yang terus menerus.

Sepanjang tahun 2010, situasi di laut China Selatan menjadi semakin memburuk. Hal ini diakibatkan oleh adanya pemain baru dalam konflik LCS yaitu Amerika Serikat (selain dua negara pengklaim terbesar yaitu China dan Vietnam). Klaim China dan Vietnam atas semua fitur di kawasan ini menyebabkan konflik diantara keduanya menjadi aspek yang paling rumit dan berkepanjangan. Hal ini diperparah dengan masuknya AS yang ingin mempertahankan *freedom of navigation* di kawasan tersebut setelah terjadi insiden *Impeccable* pada 2009. Selain itu, AS sedang dalam proses membangun kembali kepentingan regionalnya di kawasan Asia Pasifik setelah sebelumnya lebih banyak berfokus di Timur Tengah. Keterlibatan Amerika Serikat ini pada gilirannya menyebabkan meningkatnya tensi di LCS karena

AS menyebutkan status LCS sebagai bagian dari *core interests* AS, berdampingan dengan masalah Taiwan, Tibet dan Xingjiang di China⁵⁶.

Dengan demikian, konflik di laut China Selatan dengan segala kompleksitasnya masih memiliki potensi untuk menjadi semakin memburuk di masa depan karena berbagai potensi yang menjadi rebutan negara pengklaim, klaim yang bertumpang tindih antar negara, kepentingan nasional negara-negara pengklaim, ketidakefektifan UNCLOS maupun masuknya pemain baru dalam konflik yang berkepanjangan ini. Secara khusus, konflik LCS antara Vietnam–China sebagai negara pengklaim seluruh kawasan perlu menjadi perhatian khusus akibat seringnya insiden konflik diantara keduanya.

2.2. Hubungan Bilateral China – Vietnam Terkait Konflik di laut China Selatan

Perkembangan hubungan bilateral China–Vietnam sangatlah penting untuk menganalisa konflik antara kedua negara tersebut di laut China Selatan. Faktor historis yang menunjukkan dinamika hubungan keduanya yang asimetris dan konfliktual tentunya memberikan pengaruh terhadap eskalasi maupun deeskalasi konflik antara China–Vietnam yang mengklaim semua fitur di kawasan laut China Selatan. Oleh karena itu, bab ini akan membahas tentang bagaimana hubungan bilateral China – Vietnam sepanjang sejarah sampai dengan saat ini.

2.2.1. Fase–Fase Perkembangan Hubungan Bilateral China–Vietnam: Kemajuan Positif Dan Interdependensi

Hubungan China-Vietnam telah mengalami perkembangan yang dramatis dari ‘teman’ menjadi ‘lawan’ kemudian menjadi teman lagi dan seterusnya selama empat dekade terakhir. Kurang dari satu dekade setelah tahun 1969 (kematian Ho Chi Minh), kedua negara ini terlibat dalam perang di perbatasan China-Vietnam yang menyebabkan terputusnya hubungan bilateral kedua negara. Karakter hubungan

⁵⁶ Sam Bateman, *loc.cit.*, hlm. 2

mereka adalah dari “*comradeship plus brotherhood*” menjadi “*the most direct and most dangerous enemies*”⁵⁷.”

Secara singkat, sejak berdirinya RRC sebagai sebuah negara tersendiri, hubungan Vietnam-China telah melalui empat fase utama⁵⁸. Fase pertama, yang berlangsung dari periode 1949 sampai 1978 adalah hubungan bilateral yang bersifat saling menguntungkan, ideologi *comradeship*, kepercayaan tinggi dan dukungan penuh. China merupakan sumber dukungan dan bantuan yang sangat besar dan berarti bagi *Democratic Republic of Vietnam* (DRV) dalam melewati perang melawan Perancis dan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Fase kedua dimulai dengan invasi Vietnam ke Kamboja pada 1978 dan perang perbatasan antara Vietnam-China pada 1979 dan berakhir pada 1990. Kedekatan antara Vietnam dengan Uni Soviet pada periode ini menjadi penyebab memburuknya hubungan Vietnam dengan China. Selain itu, dukungan China dalam konflik antara Kamboja dan Vietnam menyebabkan semakin memburuknya hubungan China-Vietnam. Periode ini diwarnai dengan antagonisme, perang dan kecurigaan berkepanjangan.

Fase ketiga dimulai pada 1991, dengan dilakukannya restorasi hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2007. Pada tahun-tahun pertama periode ini terlihat adanya kemajuan pesat dalam hal hubungan bilateral kedua negara berdasarkan prinsip ‘enambelas kata emas’ atau *sixteen golden words* yaitu tetangga yang baik, kerjasama total, perdagangan yang stabil, jangka panjang dan berorientasi ke depan dan penyelesaian masalah sengketa perbatasan⁵⁹. Periode antara tahun 1991 sampai akhir 1998 menunjukkan adanya restorasi hubungan antara kedua negara dengan adanya 219 kunjungan politik dan dibuatnya enam deklarasi pada 1991, 1992, 1994, 1995, 1999, dan 2000 untuk menentukan arah hubungan kedua negara⁶⁰. Akan tetapi, semangat kerja sama dan persahabatan baru ini terganggu oleh ketakutan Vietnam akan kebangkitan China dan tindakan agresif China di LCS.

⁵⁷ Joseph S. Cheng, *loc. cit.*, hlm. 390

⁵⁸ *China, What's Next?* Diakses dari <http://the-diplomat.com/whats-next-china/vietnam/> pada 25 Mei 2012 pukul 16.45

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 380

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 381

Fase keempat, yang dimulai pada 2008, menunjukkan tindakan asertif China terhadap upaya Vietnam untuk mempertahankan klaim kedaulatannya dan integritas teritorialnya di LCS. Periode tahun 2008 sampai dengan 2011 merupakan tahun-tahun yang dipenuhi dengan berbagai insiden penangkapan maupun pengusiran kapal-kapal Vietnam oleh kapal patrol China di perairan dekat kepulauan Paracel. Periode ini juga menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas penangkapan ikan oleh Vietnam dan meningkatnya perhatian China terhadap kawasan yang masih menjadi sengketa di LCS.

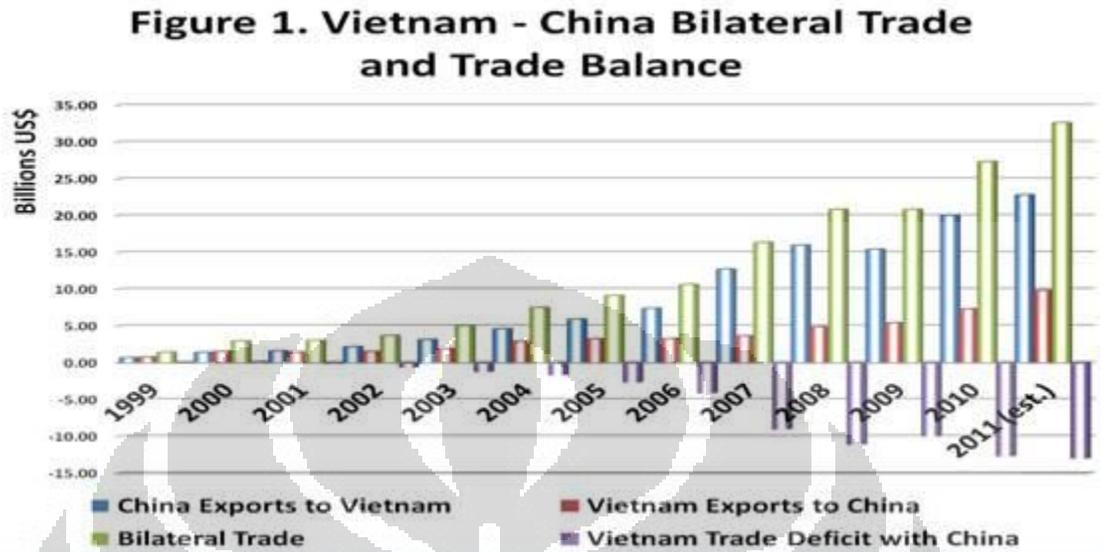
Meskipun demikian, hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup dramatis khususnya setelah normalisasi hubungan pada tahun 1990. Perdagangan bilateral dan hubungan ekonomi kedua negara telah meningkat dengan pesat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai perdagangan kedua negara yang melebihi target yang ditetapkan oleh Perdana Menteri kedua negara pada tahun 1998 di Beijing⁶¹. Pada akhir tahun 2000, berbagai perusahaan China telah menanamkan modal pada lebih dari 80 proyek di Vietnam, dengan nilai kontrak hampir mencapai \$180 juta. Selain itu, pemerintah China juga menawarkan hibah serta pinjaman rendah bunga pada Vietnam dengan nilai mencapai \$45 juta.

Oleh kedua negara, tahun 2010 diperingati sebagai ulang tahun ke-60 dimulainya hubungan diplomatik Sino-Vietnam dengan normalisasi resmi pada tahun 1990⁶². Hal ini menjadi dasar bagi kemajuan niat baik kedua negara dan peningkatan nilai perdagangan yang dibuktikan dengan pertumbuhan nilai perdagangan bilateral yang meningkat dari US\$32 juta pada 1991 menjadi hampir US\$28 milyar pada 2010 dan pada 9 bulan pertama tahun 2011, nilai perdagangan meningkat menjadi 35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan nilai perdagangan kedua negara dapat dilihat dari gambar di bawah ini

⁶¹ *Ibid.*, hlm.382

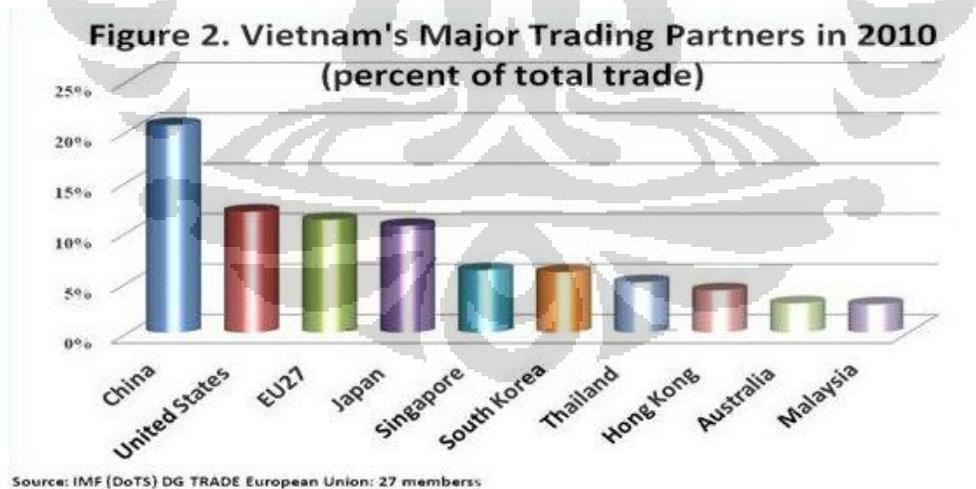
⁶² Dennis C McCornac, "Vietnam's Relations with China: A Delicate Balancing Act", diakses dari http://www.chinacurrents.com/Vol10_No2_2011/cc_mccornac.htm pada 25 Mei 2012 pukul 17.01

Gambar 2.3. Nilai Perdagangan Bilateral China–Vietnam dari 1999 - 2011



China merupakan partner dagang terbesar Vietnam (lihat gambar 3.2.), namun karena besarnya nilai perdagangan China secara global, Vietnam hanya menyumbangkan kurang dari satu persen dari total nilai perdagangan China.

Gambar 2.4. Partner Dagang Vietnam pada tahun 2010



Dari gambar di atas, terlihat bahwa China mewakili 20 persen dari seluruh nilai perdagangan Vietnam dibandingkan dengan nilai perdagangan Vietnam dengan semua partner dagang lainnya di dunia, dimana Amerika Serikat berada di urutan

kedua namun nilai perdagangannya dengan Vietnam hanyalah setengah (10%) dari nilai perdagangan Vietnam dengan China. Hal ini menunjukkan interdependensi Vietnam yang besar kepada China.

Selain kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, China – Vietnam juga sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang dulu pernah menjadi sumber perang diantara kedua negara. Sejak tahun 1994, China – Vietnam telah aktif melakukan negoisasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritime di kawasan Gulf of Tonkin dan kedua negara telah sepakat untuk mengumumkan keinginan bersama untuk memperoleh kesepakatan sebelum tahun 2000⁶³. Penyelesaian masalah perbatasan maritim di Gulf of Tonkin ternyata dapat direalisasikan pada tahun 1999 dan membuka harapan baru bagi Vietnam dan China untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritim lainnya khususnya di Laut China Selatan.

Setelah keberhasilan menyelesaikan masalah perbatasan di Gulf of Tonkin pada tahun 1999, China – Vietnam telah berhasil pula menyelesaikan masalah perbatasan darat kedua negara yang belum terselesaikan. Panjang kawasan perbatasan darat Vietnam-China adalah 1,449,56 km dimana 383,91 km terdiri dari sungai dan mata air. Kedua negara telah menempatkan 1,971 penanda di kawasan perbatasan tersebut.

Penyelesaian masalah perbatasan darat ini terealisasi pada tahun 2009 ketika China–Vietnam menerapkan *a Protocol on Border Demarcation and Marker Planting, an Agreement on Border Management Regulations and an Agreement on Border Gates and Border Gate Management Regulations* yang ditandatangani pada 18 November 2009⁶⁴. Perjanjian ini menandai diselesaikannya proses negoisasi perbatasan darat kedua negara yang telah dilaksanakan selama 36 tahun. Perjanjian Regulasi Manajemen Perbatasan ini memberikan perincian peraturan tentang manajemen, perlindungan, eksploitasi dan penggunaan air dari sungai serta sumber

⁶³ Stein Tonnesson, “Vietnam’s objective in the South China Sea: National or Regional Security?” *Contemporary Southeast Asia*, Vol 22 No. 1, (April 2000), hlm. 66

⁶⁴BBC Monitoring Asia Pacific, diakses melalui <http://search.proquest.com/docview/610120035?accountid=132811> pada 25 Mei 2012 pukul 17.34

air yang berada di perbatasan, dan mengatur masalah jalur lintas perbatasan oleh manusia, kendaraan maupun komoditas. Perjanjian ini mengatur dengan jelas mekanisme koordinasi dalam mempertahankan dan menjamin keamanan di kawasan perbatasan.

2.2.2. Asimetri Dalam Hubungan Bilateral China – Vietnam

Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1950, Vietnam telah menghadapi kondisi yang disebut sebagai ‘the tyranny of geography’⁶⁵. Kondisi ini terlihat dari kenyataan bahwa Vietnam berbatasan dengan China yang merupakan negara raksasa di bagian utara Vietnam. Bahkan saat ini, dengan populasi sebanyak 88 juta jiwa, Vietnam bagaikan salah satu dari provinsi-provinsi di China. Sejarah mencatat bahwa Vietnam dulu pernah menjadi bagian dari China dan berhasil melepaskan diri dari penjajahan dinasti Ming pada 1407 – 1427. Para pemimpin Vietnam harus selalu melewati masa negoisasi dan pembahasan yang serius apabila timbul permasalahan dengan China yang besar dan berpengaruh⁶⁶. Kenyataan ini menunjukkan adanya struktur yang asimetri antara China-Vietnam yang mempengaruhi hubungan bilateral antara keduanya.

Hubungan bilateral antara China-Vietnam yang mengalami dinamika baik konflik maupun normalisasi selama beberapa dekade memperlihatkan adanya hubungan bilateral yang asimetris. Menurut Brantly Womack⁶⁷, hubungan bilateral asimetri bilateral adalah hubungan yang di dalamnya terdapat kesenjangan dalam hubungan internasional. Hubungan semacam ini menciptakan perbedaan dalam hal persepsi risiko, perhatian dan perilaku interaktif antara negara-negara, dan bahwa hal itu dapat menyebabkan terjadinya lingkaran setan (*vicious cycle*) kesalahpahaman sistemik. Meskipun terlihat adanya ketegangan, namun sebenarnya tatanan

⁶⁵ Carlyle A Thayer, “Vietnam and The Rising China: The Structural Dynamics of Mature Asymmetry”. *Southeast Asian Affairs*, (2010), hlm. 5

⁶⁶ Alice D. BA, “Staking Claims and Making Waves in the South China Sea: How Troubled Are the Waters?” *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No. 3 (2011), hlm. 281

⁶⁷ Brantly Womack, “Asymmetry Theory and China’s Concept of Multipolarity”, *Journal of Contemporary China* Vol. 13 No. 39, (Inggris: Carfax Publishing, Taylor & Francis Group, Mei 2004), hlm. 358.

internasional cukup stabil, dan bahkan hubungan asimetris jarang digunakan oleh pihak yang kuat untuk memaksa pihak yang lebih lemah.

Dalam setiap hubungan antara negara-negara yang timpang dalam hal populasi, ekonomi dan militer, peluang dan risiko hubungan ini akan berbeda untuk kedua pihak. Untuk China, pihak yang lebih kuat, hubungan hanya mempengaruhi proporsi yang lebih kecil dalam kepentingan internasionalnya secara keseluruhan, serta lebih memberikan perhatian pada kepentingan domestik. Untuk Vietnam, pihak yang lebih lemah, hubungan internasional pada umumnya lebih penting karena perhatian kepada urusan domestik lebih sedikit dan bahkan hubungan dengan China jauh lebih penting bagi Vietnam daripada sebaliknya. Seperti yang terlihat dalam hubungan perdagangan antara China-Vietnam pada gambar 3.1, Vietnam lebih banyak tergantung pada China yang menjadi pasar terbesar Vietnam sementara nilai perdagangan Vietnam bagi China hanya 1 persen dari total nilai perdagangan China. Oleh karena itu, ketergantungan ini menyebabkan Vietnam berpotensi menghadapi resiko yang lebih besar apabila terjadi masalah dalam hubungan bilateral mereka.. Dampak dari hubungan asimetri akan lebih dirasakan oleh negara yang saling bertetangga karena kedekatan geografis akan menyebabkan hubungan kedua negara akan menjadi semakin penting.

Sebagai negara yang bertetangga, China-Vietnam menjalin hubungan bilateral dalam berbagai bidang. Secara politik, China merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Vietnam pada Januari 1950. Sejak itu, hubungan bilateral keduanya sangatlah dekat meskipun kemudian menjadi memburuk pada tahun 1970an ketika terjadi perang perbatasan diantara keduanya. Meskipun demikian, hubungan secara ekonomi tetap terjalin karena China sebagai penduduk dengan jumlah terbesar di dunia sangatlah membutuhkan sumber daya alam yang kebanyakan diimpor dari negara sekitarnya termasuk Vietnam. Nilai perdagangan mereka semakin meningkat, meskipun pada akhirnya nilai perdagangan Vietnam dengan China semakin

mengalami defisit bahkan mencapai US\$12 milyar pada tahun 2010⁶⁸. Hal ini karena kebanyakan dari tipe produk yang dijual Vietnam ke China merupakan barang mentah seperti batubara, minyak mentah, karet, dan makanan laut maupun barang dengan nilai jual rendah. Sementara itu, ekspor China ke Vietnam adalah barang yang sudah jadi dan bernilai jual tinggi seperti mobil, spare-part motor, mesin, peralatan untuk pengemasan, obat-obatan dan minyak tanah.

Dalam hubungan yang asimetris seperti hubungan China–Vietnam, pihak yang lebih kuat mungkin melakukan kesalahan akibat kurangnya perhatian terhadap hubungan tersebut. Kebijakan terhadap negara yang lebih lemah biasanya kurang terkoordinasi, dan perhatian kepada hubungan hanya diberikan pada saat krisis terjadi. Ketika konflik muncul, negara yang lebih kuat akan lambat dalam mengubah kebijakan secara keseluruhan, serta tergoda untuk menggunakan kapasitasnya yang superior untuk mendorong negara yang lebih lemah untuk mengikuti kehendaknya. Pihak yang lebih lemah kemungkinan melakukan kesalahan akibat terlalu memberikan prioritas dan perhatian pada hubungan tersebut. Untuk mengatasi hal itu, pihak yang lebih lemah akan bersekutu dengan negara ketiga dalam rangka menyeimbangkan hubungan. Namun, aliansi semacam itu kemungkinan dapat semakin mempertajam krisis yang terjadi, karena penentangan pihak yang lebih lemah didukung oleh kekuatan dari negara ketiga yang juga kuat. Oleh karena itu pada tahun 1978, aliansi Vietnam dengan Uni Soviet menjadi dasar utama sikap permusuhan China. Begitu pula kedekatan Amerika Serikat dengan Vietnam sejak kunjungan Hillary Clinton ke Hanoi 2010 telah menjadi dasar sikap asertif China di Laut China Selatan yang menyatakan akan menggunakan kekuatan militer atau *'sound of cannon'* untuk menyelesaikan sengketa teritorial di perairan tersebut.

Struktur hubungan yang asimetri ini menyebabkan kedua negara seringkali berada dalam situasi konfliktual selama beberapa dekade. Negara yang bertetangga cenderung lebih sensitif satu sama lain, serta membutuhkan upaya yang lebih antar

⁶⁸ Dennis McCornac, *loc. cit.*, hlm. 4

pihak untuk menyelesaikan masalah yang timbul⁶⁹. Hal ini juga terjadi pada China-Vietnam yang memiliki masalah perbatasan yang belum terselesaikan di kawasan LCS sehingga sensitivitas keduanya cenderung meningkat apabila salah satu pihak bertindak di kawasan yang menjadi klaim keduanya. Untuk mengatasi situasi konfliktual dalam hubungan asimetris, Vietnam sebagai pihak yang lebih lemah harus menunjukkan respek kepada China sebagai pihak yang lebih kuat dan China pun harus menghargai kepentingan dan otonomi Vietnam sebagai pihak yang lebih lemah. Meskipun demikian, situasi saling menghargai dalam struktur hubungan asimetris China–Vietnam terhambat dengan adanya masalah sengketa teritorial di LCS yang belum terselesaikan.

2.2.3. Masalah Perbatasan Di Laut China Selatan Antara China–Vietnam

Seperti yang telah disebutkan di atas, ketegangan dalam hubungan China – Vietnam mulai muncul sejak fase keempat yaitu sejak tahun 2009 ketika China menyatakan klaim atas lebih dari 80 persen kawasan Laut China Selatan atau Laut Timur pada Konvensi PBB tentang hukum laut. Hal ini menyebabkan Vietnam berada dalam posisi yang sulit mengingat bahwa China adalah partner dagang terbesar Vietnam selama hampir dua dekade terakhir di satu sisi dan di sisi lain, Vietnam memiliki klaim teritorial atas LCS yang juga mencakup keseluruhan kawasan ini. Masalah LCS ini menjadi isu yang sangat sensitif bagi kedua negara khususnya karena kawasan LCS memiliki berbagai potensi strategis yang sangat besar manfaatnya bagi kedua negara. Bahkan, bagi Vietnam, keseluruhan garis pantainya berbatasan dengan LCS sehingga menjadikan LCS sebagai laut yang sangat penting bagi Vietnam. Mengenai letak geografis LCS dengan Vietnam dan pentingnya LCS bagi Vietnam, Keliat dan Catley menyatakan bahwa:

The logic of its position suggests it will since Vietnam possesses a distinctive location in the South China Sea. Its entire coastline is adjacent to it and no other claimants have such a strong yet vulnerable strategic position. In fact, it is very much dependent on the sea route in the South China Sea. If the

⁶⁹ Alice D. BA, *loc. cit.*, hlm. 5

*entire Spratlys were seized by others, Vietnam's territorial security would be jeopardized and its economic interests damaged (hal. 57)*⁷⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa LCS tidak hanya menjadi sumber kekuatan bagi Vietnam, namun juga sumber kelemahan karena ketergantungannya yang besar kepada LCS. Akan sangat merugikan bagi Vietnam apabila klaim China yang meliputi seluruh kawasan LCS membuat Vietnam tak bisa menggunakan jalur lautnya untuk berinteraksi di dunia internasional. Klaim China dapat membuat Vietnam menjadi negara gagal atau *failed states* akibat tertutupnya akses ke jalur laut internasional dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat Vietnam yang bergantung pada sumber daya alam di LCS.

Sepanjang periode 2001 – 2009 beberapa insiden mewarnai hubungan China – Vietnam⁷¹. Selama 2001, terdapat 4 pernyataan dari kedua pihak pada 4 kejadian yaitu satu pernyataan dari China dan tiga pernyataan dari Vietnam yang memprotes tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. akan tetapi complain hanya sebatas pernyataan saja dan tidak ada ketegangan lain yang terjadi karena tindakan yang telah dilakukan. Pada tahun 2002, Vietnam memprotes *unilateral fishing ban* China di Laut China Selatan sejak 1 juni sampai 1 agustus 2002. Vietnam juga memprotes penerapan pelarangan penangkapan ikan dengan melakukan latihan menembak di area maritim yang termasuk dalam ‘laut dan landas kontinen’ Vietnam. Pelarangan ini dilakukan selama 5 hari pada bulan Juni 2002. Pada 2003, Vietnam memprotes pelarangan penangkapan ikan baru China di LCS dari 1 Juni sampai 1 Agustus. Pada agustus 2004, China mengusir KANTAN3 dan peralatan pengeboran minyak yang beroperasi sejak 19 November 2004 di laut kontinental Vietnam. Namun China membantah bahwa

⁷⁰ B. Catley dan Makmur Keliat, *Spratlys: The dispute in the South China Sea*, (Brookfield: Ashgate Publishing Limited, 1997), hlm. 35

⁷¹ Ramses Amer, “The Sino Vietnamese Approach to Managing Border Disputes—Lessons, Relevance and Implications for the SCS Situation” diakses melalui www.southchinaseastudies.org pada 25 Mei 2012 pukul 18.30

pengeboran tersebut dilakukan di kawasan laut teritorial Vietnam. Pada akhirnya China memindahkan peralatan pengeborannya dari area tersebut.

Pada 2005, Vietnam menegaskan kembali klaimnya terhadap Paracel dan Spratly dalam rangka menanggapi laporan bahwa China telah mempersiapkan “riset terumbu karang berskala besar” di kawasan Paracel. Pada Desember 2006, Vietnam menegaskan kembali klaimnya terhadap Paracel dan Spratly dalam rangka menanggapi informasi bahwa China ‘telah membangun penanda kedaulatan di beberapa poin dasar untuk laut teritorial termasuk di kepulauan Hoang Sa/Paracel’. Vietnam menyatakan bahwa tindakan tersebut ‘melanggar kedaulatan Vietnam dan sepenuhnya salah’. Kemudian pada Agustus 2007, Vietnam menegaskan kembali klaimnya terhadap Paracel dan Spratly dalam rangka menanggapi laporan bahwa China telah membangun ‘rencana pengembangan pariwisata’ di kawasan paracel. Pada akhir 2007, dua kejadian menyebabkan Vietnam merespon dengan pernyataan resmi. Pertama, China melakukan latihan militer di Paracel dan pembentukan kota Hainan untuk mengadministrasi Kepulauan Paracel dan Spratly. Vietnam memprotes keras pembentukan kota ini.

Pada Maret 2009, Vietnam memprotes rencana pembangunan pariwisata oleh China di Paracel. Pada awal Mei 2009, Vietnam menyerahkan *joint submission* terkait landas continental Vietnam di ‘area utara’ dan ‘pengumpulan bersama’ dengan Malaysia pada Komisi Batas-batas Landas Kontinental PBB. Hal ini menimbulkan protes dari China. Pada Agustus 2009, kapal nelayan Vietnam dan krunya ditangkap oleh kapal China di Paracel. Kemudian pada Oktober 2009, Vietnam memprotes keras perlakuan tidak manusiawi China pada nelayan – nelayan Vietnam yang sedang berlindung di Paracels akibat badai.

Masalah perbatasan di LCS semakin menjadi penyebab memanasnya hubungan kedua negara sejak 2009. Di satu sisi, China telah mempercepat peningkatan kapabilitas angkatan lautnya di LCS dan sekaligus melakukan

beberapa tindakan provokasi yang menimbulkan reaksi keras dari pihak Vietnam. Sebagai contoh, salah satu situs internet China mempublikasikan rencana invasi tentara China pada Vietnam. Selain itu, China mulai memperingatkan perusahaan minyak asing untuk tidak melakukan eksplorasi energi di area yang diklaim Vietnam, namun mempersilahkan mereka untuk melakukan eksplorasi dan eksplotasi di kawasan yang masih menjadi sengketa⁷².

China secara unilateral menerapkan pelarangan penangkapan ikan (*fishing ban*) di LCS, menangkap nelayan Vietnam serta mempublikasikan klaimnya yang lebih dari 80% kawasan LCS pada tahun 2009. Klaim ini meliputi wilayah ZEE Vietnam berdasarkan UNCLOS. Vietnam menanggapi dengan menghimbau para nelayannya untuk tetap melakukan penangkapan ikan di kawasan tersebut, memodernisasi persenjataan mereka sebagai alat untuk mempertahankan diri serta membawa masalah LCS ke forum multilateral untuk memperoleh bantuan dan kerja sama dengan negara-negara lain. China memprotes hal ini dengan menyatakan bahwa masalah LCS adalah masalah bilateral dan sangat tidak tepat apabila negara lain ikut campur dalam masalah ini.

Antara bulan Maret sampai Juli 2010, Angkatan Laut China melaksanakan tiga latihan militer maritim berskala besar yaitu di kawasan perairan Okinawa, Taiwan dan laut China Selatan⁷³. Latihan di laut China Selatan merupakan latihan militer yang terbesar dari ketiga latihan tersebut serta melakukan uji coba penembakan misil secara langsung. Latihan militer ini menandai sikap asertif Beijing untuk menegaskan klaimnya terhadap LCS. Armada China yang bekerja di LCS yaitu *South Sea Fleet* saat ini sedang dimodernisasi dengan sebuah kapal selam Jin-class yang bersenjatakan *ballistic nuclear* dan kapal *amphibious landing craft* di kawasan Yulin. Penambahan jumlah persenjataan militer di

⁷² *Ibid*

⁷³ Lawrence Prabhakar, "The Evolving Geopolitics in the South China Sea" *paper* dipaparkan dalam Seminar on South China Sea yang diselenggarakan oleh CASS dan The Habibie Centre (Jakarta, 31 Mei 2011), hlm. 13

armada ini memberikan sinyal bahwa China memang ingin mempertahankan kawasan LCS sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Sepanjang tahun 2011, berbagai insiden mewarnai sengketa teritorial antara China–Vietnam di LCS. Pertama, pada bulan Mei 2011, China menerapkan pelarangan penangkapan ikan di LCS dari tanggal 16 Mei sampai dengan 1 Agustus 2011⁷⁴. Kemudian, untuk mengimplementasikan kebijakan ini, China menempatkan kapal patroli serta melakukan ancaman akan memberikan tembakan kepada kapal nelayan Vietnam yang mendekati kawasan Spratly dan Paracel. Vietnam merespon kebijakan China ini dengan melayangkan protes keras kepada China. Insiden selanjutnya adalah pemotongan kabel pada kapal eksplorasi Vietnam yang terjadi sebanyak tiga kali pada bulan Mei dan Juni 2011. Vietnam menganggap bahwa tindakan China ini merupakan tindakan yang terencana. Namun China menanggapi bahwa kapal-kapal eksplorasi minyak yang dipotong kabelnya oleh China merupakan kapal yang memasuki wilayah perairan China secara illegal.

Insiden di tahun 2011 ini, khususnya pemotongan kabel kapal eksplorasi Vietnam oleh kapal patroli China telah menimbulkan reaksi nasionalis di kalangan penduduk Vietnam. Hal ini terlihat dari demonstrasi anti-China di Hanoi dan Ho Chi Minh City selama lebih dari empat minggu berturut-turut dan melibatkan lebih dari 1000 orang⁷⁵. Mereka menyerukan kemarahan atas tindakan China yang terkesan menginvasi dan mengganggu wilayah kedaulatan Vietnam. Demonstrasi semacam ini sangatlah jarang terjadi di Vietnam karena negara komunis ini akan dengan cepat menghentikan demonstrasi apapun. Oleh karena itu, China menuduh bahwa demonstrasi tersebut telah disetujui dan didukung oleh pemerintah Vietnam.

⁷⁴ Carlyle A Thayer, “Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses”. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 30 No. 2 (2011), hlm. 79.

⁷⁵ <http://factsanddetails.com/china.php?itemid=1902> diakses pada 26 Mei 2012 pukul 07.15 WIB

Meskipun menjadi negara dengan kekuatan militer yang besar serta terlihat sangat asertif di kawasan LCS, namun terdapat beberapa kelemahan China dalam menegaskan klaimnya di LCS. Pertama, China mendasarkan klaimnya atas 'klaim historis' yang menyebutkan adanya 9 dot lines di kawasan LCS dan pada masa lalu pulau-pulau di kawasan LCS telah dihuni oleh penduduk China bahkan pada 2000 tahun yang lalu. Klaim historis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadikan LCS sebagai wilayah kedaulatan China kecuali bila peta historis yang dimiliki China tersebut memiliki koordinat jelas yang dapat menjadi dasar-dasar yuridis formal untuk membatasi wilayah kedaulatannya di kawasan yang diklaim. Klaim historis tentang keberadaan nenek moyang pun tidak dapat menjadi dasar untuk mengklaim suatu wilayah. Kedua, China dan Vietnam memiliki jarak kedekatan yang berbeda dengan kawasan sengketa. Kelemahan China adalah bahwa jarak antara pulau terjauh China (Hainan) dengan kepulauan Spratly dan Paracel masih lebih jauh daripada jarak Vietnam ke Spratly atau Paracel⁷⁶.

Berbagai tindakan dilakukan untuk mencegah eksplotasi di kawasan LCS. Sebagai contoh, China mulai menekan beberapa perusahaan asing agar tidak berinvestasi untuk membangun sektor maritim Vietnam dan memperingatkan perusahaan minyak AS dan Australian untuk tidak melakukan *joint venture* dengan PetroVietnam, perusahaan minyak Vietnam, di kawasan selatan dan tengah pantai Vietnam⁷⁷. Pada tahun 2007, China berhasil menghentikan rencana British Petroleum (BP) yang akan mengembangkan proyek sumber daya energi di kawasan Nam Con Son, Vietnam senilai 2 milyar US\$ setelah China menyatakan bahwa rencana perusahaan ini 'tidak valid dan melanggar kedaulatan teritorial China'⁷⁸. Kemudian pada tahun 2008, China memperingatkan Exxonmobil bahwa China akan melarang semua investasi perusahaan ini di China apabila tetap

⁷⁶ Alice D. BA, *loc.cit.*, hlm. 5

⁷⁷ "US-Vietnam: China Concern Promotes Security Ties" *Oxford Analytica Daily Brief Service*. (16 April, 2009) diakses dari <http://search.proquest.com/docview/192453939?accountid=132811> pada 24 Mei 2012 pukul 16.30

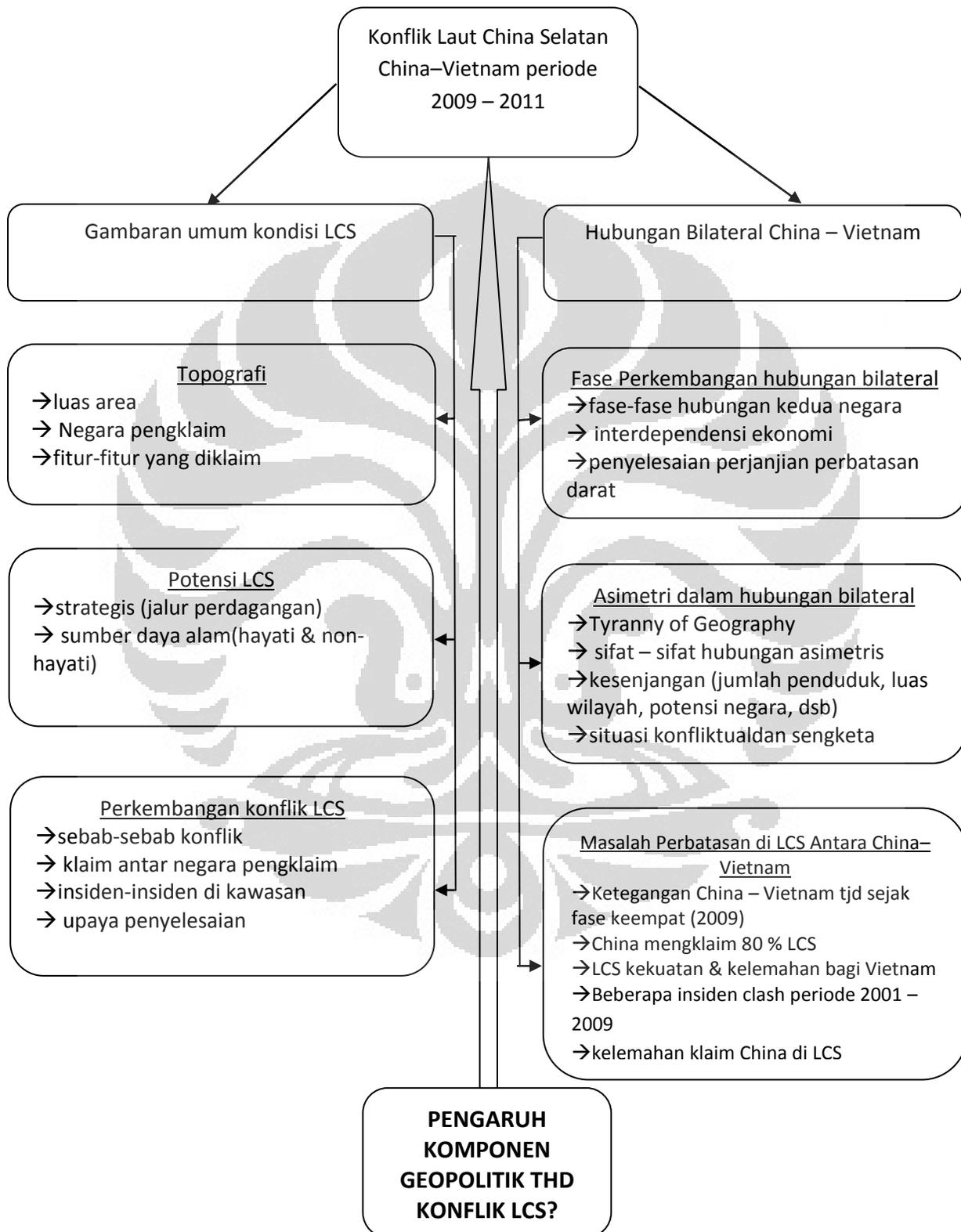
⁷⁸ Carlyle A. Thayer, *loc.c it*, hlm.3

melanjutkan perjanjian kerja sama eksplorasi minyak dengan Vietnam⁷⁹. Vietnam menanggapi hal ini dengan membuat protes diplomatik kepada pemerintah China.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan matriks temuan atas seperti yang dilihat dari gambar 2.5 di bawah. Dari gambar tersebut jelas bahwa laut China Selatan memiliki karakteristik topografi, potensi dan perkembangan konflik yang menjadi sumber kompleksitas di kawasan ini. Sementara itu, gambaran hubungan bilateral China-Vietnam terkait konflik di kawasan ini juga telah dijelaskan di bagian ini untuk melihat bagaimana kawasan LCS mempengaruhi hubungan keduanya maupun sebaliknya. Kedua hal itu merupakan variabel dependen yang telah dijelaskan dalam bab ini. Setelah memberikan penjelasan mendetail tentang variabel dependen di bab ini, bab selanjutnya akan menjelaskan pengaruh dari komponen geopolitik khususnya wilayah dan energi terhadap hubungan China-Vietnam dan sengketa mereka di kawasan Laut China Selatan pada periode 2009 – 2011.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 4

Gambar 2.5. Matriks Temuan Bab 2



BAB 3

PENGARUH KOMPONEN WILAYAH DAN ENERGI TERHADAP KONFLIK CHINA-VIETNAM DI LCS PERIODE 2009 – 2011

Setelah melihat karakteristik dari laut China Selatan dan hubungan bilateral antara China – Vietnam terkait sengketa keduanya di kawasan laut China Selatan, maka bab ini akan membahas tentang hubungan antara dua komponen geopolitik yaitu wilayah dan energi dengan konflik di laut China Selatan antara China – Vietnam periode 2009 sampai dengan 2011. Pada bab ini, dalam menganalisa pengaruh dari komponen wilayah, indikator – indikator komponen wilayah yaitu kedekatan wilayah dengan kawasan yang disengketakan dan panjang kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah yang disengketakan akan dihubungkan dengan potensi terjadinya konflik internasional. Selain itu, bentuk – bentuk konflik internasional yang terjadi di kawasan ini juga akan dilihat berdasarkan tahapan konflik internasional sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tahapan dalam konflik internasional

Tahap	Istilah
1.	War
2.	Limited armed conflict
3.	Military tension
4.	Diplomatic tension
5.	No tension

*diolah dari teori Huth dan Alle (2002) dan Quincy Wright (1986)

Lebih lanjut, bab ini juga akan meneliti pengaruh dari komponen energi terhadap konflik antara China – Vietnam di laut China Selatan periode 2009 – 2011. Pada bab ini, indikator – indikator dari komponen energi yaitu rasio antara produksi dengan konsumsi (minyak dan gas alam) China-Vietnam akan dianalisis untuk melihat bagaimana energi mempengaruhi konflik antara kedua negara di kawasan

LCS. Peneliti menggunakan mengukur rasio konsumsi dengan produksi sumber daya minyak dan gas alam karena laut China Selatan diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas alam yang sangat besar bahkan seringkali disebut sebagai Teluk Persia kedua.

Tabel 3.2. Indikator Komponen Wilayah dan Energi

Wilayah	Energi
kedekatan wilayah yang disengketakan dengan negara pengklaim (jarak)	rasio antara konsumsi energi dengan kapasitas produksi energi (minyak dan gas alam) negara pengklaim
panjang garis pantai negara pengklaim yang berbatasan langsung dengan daerah sengketa (panjang garis pantai)	

*diolah oleh penulis

Kedua komponen geopolitik yaitu wilayah dan energi ini saling berkaitan karena kawasan Laut China Selatan yang penting bagi kedaulatan kedua negara diperkirakan mengandung sumber daya energi yang sangat besar khususnya minyak dan gas alam. Perilaku dan sikap negara pengklaim yang agresif merupakan upaya untuk memperoleh kedaulatan atas kawasan dan dengan demikian juga memperebutkan hak untuk mengeksplorasi energi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kedua komponen ini saling berpengaruh dan dianalisis dalam satu bab yang sama.

3.1. Wilayah

Dalam geopolitik, wilayah atau faktor geografis berperan penting untuk menjadi dasar bagi politik suatu negara, khususnya pengambilan keputusan yang bersifat politik. Negara tak dapat disebut sebagai negara apabila tidak ada wilayah yang diakui secara politis dan sah oleh dunia internasional, dimana di dalam wilayah tersebut terdapat segala sumber daya yang menjadi hak kedaulatan negara tersebut. Kedaulatan wilayah dibatasi dengan batas-batas wilayah yang menjadi penanda

integritas teritorial suatu negara dan perpanjangan dari kekuasaan pemerintah⁸⁰. Oleh karena itu, batas-batas wilayah dan demarkasi fisik merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara karena tidak dapat dipisahkan dari argument politik untuk memperoleh dan mempertahankan kedaulatannya.

Akibat adanya perubahan geopolitik global selama beberapa dekade, setidaknya seperempat dari batas-batas wilayah di seluruh dunia ini tidaklah stabil, bahkan dua pertiga dari seluruh batas-batas wilayah maritim global masih belum terselesaikan hingga kini⁸¹. Penentuan batas-batas wilayah yang disetujui oleh negara-negara yang berbatasan merupakan hal yang sangat krusial bagi keamanan negara maupun kepentingan politik, sosial dan ekonomi. Akibat dari ketidakstabilan geopolitik dan belum terselesaikannya masalah penentuan batas-batas negara yang disepakati menyebabkan masih terjadinya konflik terkait dengan perbatasan negara dalam hubungan internasional.

3.1.1. Pengaruh Jarak terhadap Konflik

Konflik di kawasan perbatasan tidak dapat dilepaskan dari sumber ancaman yang dihadapi oleh negara. Salah satu sumber ancaman suatu negara adalah *proximity* atau kedekatan wilayah seperti yang dinyatakan oleh Stephen M. Walt:

*“States will also align in response to threats from proximate power. Because the ability to project power declines with distance, states that are nearby pose a greater threat than those that are far away....Small states bordering a great power may be so vulnerable that they choose to bandwagon rather than balance, especially if their powerful neighbor has demonstrated its ability to compel obedience”*⁸²

Pernyataan Walt ini menunjukkan bahwa kedekatan wilayah mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk memproyeksikan *power* mereka. Proyeksi *power* ini

⁸⁰ Ewan W. Anderson, “Geopolitics: International Boundaries as Fighting Places” dalam Colin S Gray dan Geoffrey Sloan, *Geopolitics: Geography and Strategy*, (London: Frank Cass Publishers, 1999), hlm. 124.

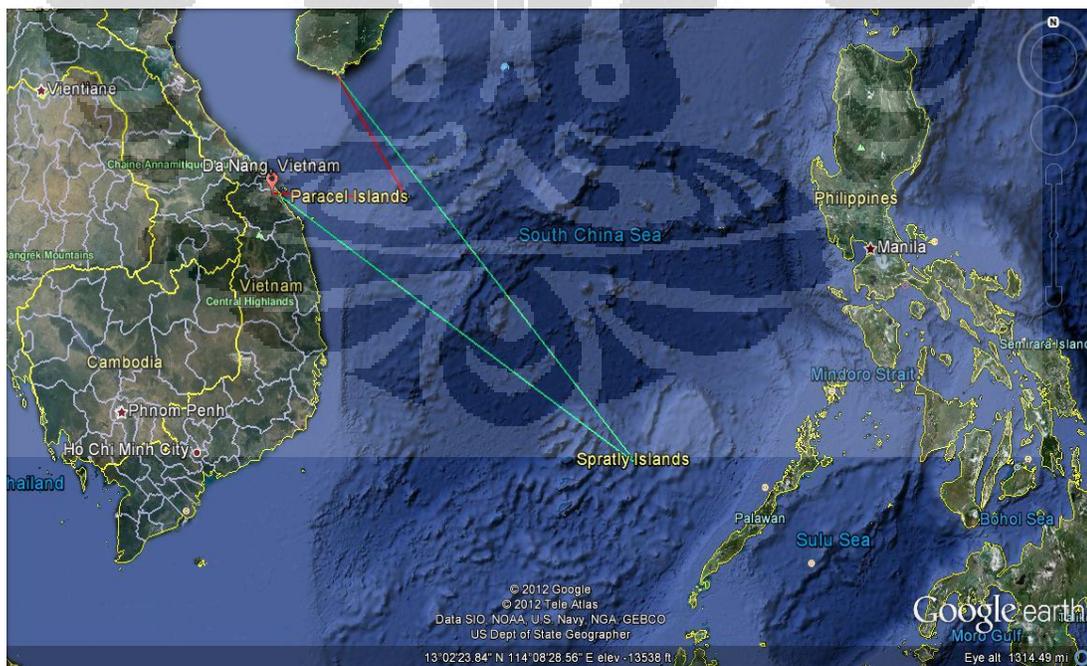
⁸¹ *Ibid.*, hlm. 125

⁸² Stephen M. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power,” *International Security*, Vol 9, No. 4 (Spring, 1985), hlm. 4.

dapat berupa tindakan agresif untuk melindungi kawasan perbatasan maupun kawasan yang masih disengketakan. Jarak dari kawasan yang disengketakan sangatlah berpengaruh terhadap persepsi ancaman terhadap negara lain. Semakin dekat jarak antara kawasan yang disengketakan dengan negara pengklaim, semakin besar keyakinan atas klaim kedaulatan kawasan tersebut sehingga meningkatkan perasaan terancam. Perasaan terancam akan menjadi semakin besar apabila negara pengklaim lainnya merupakan *powerful neighbor* dengan kapasitas politik, militer dan ekonomi yang lebih besar dari negara yang bersangkutan.

Dalam kasus sengketa di laut China Selatan antara China – Vietnam, jarak dari Kepulauan Spratly dan Paracel terhadap kedua negara ini sangat mempengaruhi persepsi ancaman China terhadap Vietnam maupun Vietnam terhadap China. Semakin dekat Spratly dan Paracel terhadap China atau Vietnam, maka akan semakin besar perasaan memiliki atas kawasan itu (klaim kepemilikan). Gambar di bawah ini menunjukkan jarak antara kedua negara dengan kedua kepulauan yang disengketakan tersebut:

Gambar 3.1. Peta Jarak Vietnam-China ke Kepulauan Paracel dan Spratly



Jarak Vietnam-China ke Paracel

Jarak Vietnam-China ke Spratly

Berdasarkan UNCLOS 1982, batas ZEE suatu negara adalah 200 mil laut dihitung dari garis pantai pulau terluarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keseluruhan kawasan sepanjang 200 mil laut itu merupakan wilayah kedaulatan dari negara pantai yang berbatasan. Dalam hal ini, seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, laut China Selatan merupakan *semi-enclosed sea* yang oleh hukum internasional diwajibkan bagi negara pantai untuk saling bekerja sama dalam mengelola laut semi tertutup ini. Meskipun demikian, dalam kondisi tidak terjadi kerja sama atau sengketa, hukum internasional tidak dapat memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua pihak. Oleh karena itu, pendekatan keamanan seringkali diambil untuk menyelesaikan sengketa.

Oleh karena itu, dalam situasi tidak adanya kerja sama dan dilakukannya pendekatan keamanan, jarak kedekatan kawasan sengketa dengan negara pengklaim dapat digunakan oleh negara pengklaim untuk menentukan seberapa besar 'hak'nya atas kawasan tersebut. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menggunakan batas ZEE. Perhitungan jarak antara Spratly dan Paracel terhadap China dan Vietnam perlu disesuaikan dengan batas sejauh 200 mil laut tersebut untuk melihat tingkat sensitivitas atas wilayah kedaulatan yang diklaimnya karena adanya rasa kepemilikan atas wilayah tersebut. Dalam hal ini, 200 mil laut setara dengan 370,4 km (dengan 1 mil laut sama dengan 1,852 km) dan dibulatkan menjadi 371 km. Idealnya, kawasan yang menjadi hak milik suatu negara dibatasi sepanjang 371 km. Oleh karena itu, selisih jarak yang paling ideal adalah nol atau dibawah nol (bernilai negatif). Klaim kepemilikan oleh penulis didefinisikan sebagai jarak wilayah yang berhak diklaim suatu negara karena masih berada di dalam wilayah ZEE atau kurang dari 200 mil laut (setara dengan 371 km). Dengan kata lain, klaim kepemilikan adalah selisih antara jarak kawasan sengketa–negara pengklaim dengan 371 km. Untuk mengukur klaim kepemilikan tersebut dapat digunakan rumus sebagai berikut=

Rumus 1

$$X = S - 371$$

Keterangan:

X : klaim kepemilikan

S : jarak Vietnam-China dari Paracel dan Spratly

371 : batas ZEE

Dari hasil penghitungan, maka akan diperoleh nilai x yang kemudian akan dirating berdasarkan skala di bawah ini:

Nilai X

Negatif	Klaim kepemilikan tinggi
Positif	Klaim kepemilikan rendah

*diolah oleh penulis

Semakin kecil selisih jarak kawasan yang diklaim dengan 371 km (bernilai 0 atau negatif), maka semakin besar klaim kepemilikan atas kawasan tersebut.

Apabila rumus 1 diaplikasikan pada jarak antara Spratly dan Paracel dengan China-Vietnam, maka hasil pengukurannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Jarak China – Vietnam ke Spratly dan Paracel

Jarak antara Kepulauan Paracel dengan China dan Vietnam (km)		Nilai X
China ke Paracel (dari Hainan)	314	- 57
Vietnam ke Paracel (dari Da Nang)	308	-63

Jarak antara Kepulauan Spratly dengan China dan Vietnam (km)		
China ke Spratly (dari Hainan)	1056	685
Vietnam ke Spratly(dari Da Nang)	988	617

*sumber: diolah oleh penulis dari pengukuran melalui *Google Earth*

Dalam menemukan jarak antara Vietnam dengan Paracel dan Spratly, penulis menarik garis dari dari Da-Nang, kota pantai terluar Vietnam yang berdekatan dengan Paracel. Sementara itu, dalam menemukan jarak antara China dengan Paracel, penulis menarik garis dari Hainan, kota administratif yang dibentuk China untuk mengadministrasi kepulauan Spratly dan Paracel. Dari hasil penghitungan berdasarkan rumus 1 diatas terlihat bahwa klaim kepemilikan China dan Vietnam di Kepulauan Paracel bernilai negatif sehingga menunjukkan bahwa kedua negara ini, berdasarkan UNCLOS, memiliki hak teritorial atas kedua kepulauan tersebut. Vietnam dan China memiliki klaim kepemilikan yang tinggi dilihat dari hasil pengukuran yang negatif. Meskipun demikian, nilai klaim kepemilikan Vietnam adalah -63, lebih tinggi dari nilai klaim kepemilikan China yang bernilai -57.

Sementara itu, klaim kepemilikan China dan Vietnam di kawasan Spratly sama-sama menunjukkan nilai yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jarak kepulauan Spratly adalah melebihi batas ZEE kedua negara. Meskipun demikian, jarak antara Spratly ke Vietnam dengan nilai 617 masih lebih dekat daripada jarak Spratly ke China yang bernilai 685. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Vietnam memiliki klaim kepemilikan yang lebih tinggi daripada China.

Tingginya klaim kepemilikan Vietnam di kawasan Paracel dan Spratly ini menjelaskan mengapa pemerintah Vietnam tetap melakukan aktivitas eksplorasi energi dan penangkapan ikan di kedua kawasan tersebut meskipun China seringkali melakukan penangkapan, penembakan, pemotongan kabel eksplorasi maupun larangan penangkapan ikan tahunan. Sedangkan tingginya klaim kepemilikan China di Paracel juga menjelaskan mengapa China bertindak asertif dan agresif selama

tahun 2009 sampai 2011 yang dibuktikan dengan melakukan pelarangan penangkapan ikan, pemotongan kabel seismik Vietnam dan penangkapan kapal-kapal Vietnam yang memasuki kawasan tersebut.

Selain itu, klaim kepemilikan Vietnam yang tinggi di Paracel juga menjelaskan mengapa terjadi *diplomatic tension* antara China dan Vietnam ketika Vietnam melayangkan lima protes diplomatik kepada China sepanjang periode 2009 - 2011. Pada tahun 2010, Vietnam memberikan tiga protes diplomatik kepada China terkait rencana China untuk mengembangkan pariwisata di Paracels dan penelitian kapal China yang memasuki kawasan yang diklaim Vietnam. Pada tahun 2011, mengirimkan dua protes terkait penerbitan peta batas maritime China yang memasukkan Paracel di dalam peta tersebut dan terkait dilakukannya pelatihan militer di dekat Paracel⁸³.

3.1.2. Pengaruh Panjang Garis Pantai Terhadap Konflik

Selain jarak antara Paracel dan Spratly terhadap Vietnam dan China, panjangnya garis pantai wilayah Vietnam dan China yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan juga memiliki signifikansi untuk melihat pengaruh komponen wilayah terhadap eskalasi konflik di kawasan ini. Hal ini dikarenakan garis pantai merupakan perbatasan yang penting untuk menentukan integritas teritorial dan membatasi kedaulatan suatu negara. Garis pantai sangatlah penting bagi sebuah negara karena menentukan akses sebuah negara terhadap dunia internasional. Selain itu, garis pantai merupakan 'buffer area' yang menahan sebuah negara dari invasi negara lain. Dengan kata lain, garis pantai sebagai wilayah perbatasan dapat menjadi faktor penentu untuk perang maupun damai serta menentukan hidup matinya sebuah negara

*Frontiers are indeed the razor's edge on which hang suspended the modern issues of war and peace, of life or death to nations*⁸⁴

⁸³ Carlyle A Thayer, "The Tyranny of Geography: Vietnamese Strategies to Constrain China in the South China Sea", *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No. 3 (2011), hlm. 360

⁸⁴ Ewan W. Anderson, *op. cit.*, hlm. 128

Pendudukan secara paksa kawasan yang masih disengketakan yang berbatasan dengan garis pantai suatu negara berpotensi membawa kerugian baik secara politik, ekonomi dan strategis bagi negara yang bersangkutan akibat tertutupnya akses ke dunia internasional melalui garis pantai tersebut. Oleh karena itu, panjangnya garis pantai yang berbatasan dengan kawasan sengketa sangat berpengaruh terhadap resiko suatu negara apabila terjadi konflik berskala besar di kawasan sengketa. Semakin panjang garis pantai suatu negara yang berbatasan langsung dengan kawasan sengketa, maka semakin besar tingkat resiko yang akan dihadapi negara tersebut bila konflik tereskalasi menjadi konflik berskala besar dan bahkan perang.

Resiko suatu negara diperoleh apabila ancaman (*threat*) bertemu dengan kerentanan (*vulnerability*). Ancaman adalah intensitas tahapan konflik internasional yang terlihat dari banyaknya insiden, atau dengan kata lain ancaman adalah skala intensitas tahapan konflik dengan dikalikan dengan jumlah insiden. Sedangkan kerentanan (*vulnerability*) adalah wilayah dengan tingkat exposure yang tinggi atas konflik yang kemungkinan terjadi. Dengan kata lain, kawasan yang paling mungkin terkena dampak penutupan akses bila terjadi konflik adalah garis pantai sehingga wilayah ini disebut variabel kerentanan. Kemudian, untuk menghitung tingkat resiko dapat menggunakan rumus di bawah ini

Rumus 2

$$R = T \times V$$

Keterangan:

R = Risk (tingkat resiko negara)

T = Threat (ancaman yaitu perkalian antara skala eskalasi konflik dengan frekuensi insiden)

V = Vulnerability (kerentanan yang berupa panjang garis pantai)

Skala *Threat* atau ancaman diperoleh dari jumlah insiden yang terjadi di kawasan LCS selama periode 2009 – 2012 dikalikan dengan skala eskalasi konflik.

Tabel 3.4. Skala Tahap – tahap eskalasi konflik

Skala	Istilah
5	War
4	Limited armed conflict
3	Military tension
2	Diplomatic tension
1	No tension

*diolah oleh penulis

Dari tabel di atas terlihat bahwa *war* menempati skala tertinggi yaitu 5 dalam tahapan konflik internasional karena merupakan situasi terjadinya eskalasi lebih lanjut atau krisis menjadi perang⁸⁵ dan situasi yang menunjukkan adanya intervensi militer atau perang untuk memaksakan solusi⁸⁶. Karena perang merupakan situasi paling membahayakan dalam eskalasi konflik, maka skala intensitasnya paling tinggi. Sementara itu, *limited armed conflict* menempati skala 4 karena tahap ini menunjukkan eskalasi konflik yang mulai terlihat adanya ancaman kekuatan militer⁸⁷. *Limited armed conflict* dapat dilihat dari adanya *clash* militer berskala kecil sampai sedang di kawasan yang menjadi sengketa namun belum sampai pada tahap invasi ke negara yang saling berkonflik. Selanjutnya, *military tension* menempati skala 3 karena ketegangan militer menunjukkan kondisi tekanan dengan menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi ketidaksesuaian⁸⁸ misalnya dengan perusakan kapal dan penangkapan kapal karena anggapan bahwa keberadaan kapal di kawasan sengketa tidak sesuai dengan klaim negara yang melakukan penangkapan tersebut. Sedangkan *diplomatic tension* menempati skala 2 karena menunjukkan kondisi

⁸⁵ Paul K. Huth dan Todd Alle, *op. cit.*, hlm. 35

⁸⁶ Quincy Wright, *op. cit.*, hlm.434

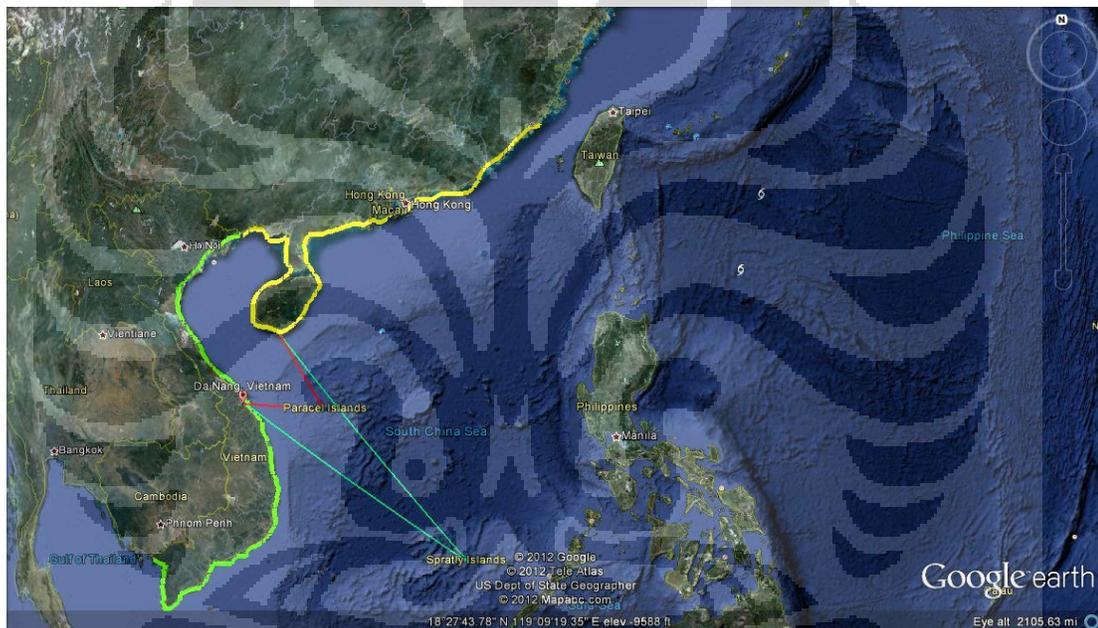
⁸⁷ Paul K. Huth dan Todd Alle, *op. cit.*, hlm. 35

⁸⁸ Quincy Wright, *op. cit.*, hlm.434

eskalasi konflik diplomatik⁸⁹ yang masih dapat diatasi oleh kedua negara dengan adanya nota protes yang ditanggapi dengan klarifikasi atas nota protes yang dikirimkan tersebut sehingga tidak membahayakan dan menimbulkan konflik yang lebih lanjut.

Dalam konteks sengketa antara China-Vietnam di laut China Selatan, kedua negara memiliki garis pantai yang berbatasan langsung dengan laut China Selatan. Garis pantai yang berbatasan dengan LCS dapat dilihat dari gambar di bawah

Gambar 3.2. Garis Pantai China-Vietnam yang Berbatasan dengan LCS



Garis Pantai Vietnam

Garis Pantai China

⁸⁹ Paul K. Huth dan Todd Alle, *op. cit.*, hlm. 35

Panjang garis pantai kedua negara dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5. Garis Pantai China-Vietnam dari LCS

Garis Pantai China-Vietnam yang berbatasan dengan LCS (km)	
Vietnam	2294
China	2173

*diolah oleh penulis dari pengukuran melalui *Google Earth*

Dari tabel ini terlihat bahwa panjang garis pantai Vietnam yang berbatasan langsung dengan LCS adalah 2294 km, lebih panjang dari garis pantai China yang panjangnya 2173 km. Garis pantai sebagai pintu gerbang untuk akses masuk ke negara maupun keluar ke dunia internasional, oleh peneliti disebut sebagai variabel kerentanan (*vulnerability*) karena rentan menyebabkan sebuah negara menjadi negara gagal (*failed state*) apabila akses melalui garis pantai ini ditutup akibat konflik berskala besar maupun perang.

Tabel 3.6. Pengukuran Threat (Ancaman) China – Vietnam di LCS

Tahun	Kejadian	Negara yang dirugikan	Tahapan konflik dan skala	Frekuensi	Threat (skala x frekuensi)
2009	Malaysia dan Vietnam memperluas batas landas kontinental mereka dari 200 mil menjadi 350 mil laut di LCS dan menimbulkan protes keras dari China dengan melayangkan <i>nota verbale</i> .	China	<i>Diplomatic tension</i> (2)	1	2
	Vietnam memprotes annual fishing ban yang dibuat China di kawasan LCS	Vietnam	<i>Diplomatic tension</i> (2)	1	2

	China memprotes respon Vietnam yang membawa masalah pelarangan penangkapan ikan (<i>fishing ban</i>) di LCS forum multilateral.	China	<i>Diplomatic tension</i> (2)	1	2
2010	Terjadi 20 kali insiden penangkapan kapal nelayan Vietnam oleh kapal patroli China.	Vietnam	<i>Military tension</i> (3)	20	60
	Vietnam mengirimkan 3 protes diplomatik terkait rencana China untuk mengembangkan pariwisata di Paracels dan penelitian kapal China yang memasuki kawasan yang diklaim Vietnam.	Vietnam	<i>Diplomatic tension</i> (2)	3	6
2011	Pada Juni, Vietnam menuding kapal China 2 kali merusak kapal survei minyak Vietnam dan memotong kabel eksplorasi pada kapal lainnya di dalam wilayah 200 mil laut atau ZEE Vietnam.	Vietnam	<i>Military tension</i> (3)	2	6
	Vietnam mengirimkan 2 protes terkait penerbitan peta batas maritime China yang memasukkan Paracel di dalam peta tersebut dan terkait dilakukannya pelatihan militer di dekat Paracel	Vietnam	<i>Diplomatic tension</i> (2)	2	4

	China memprotes demonstrasi anti-China yang seakan-akan didukung oleh pemerintah Vietnam terkait insiden pemotongan kabel eksplorasi Vietnam di LCS oleh militer China	China	<i>Diplomatic tension (2)</i>	1	2
	Total Threat China	6			
	Total Threat Vietnam	78			

*diolah oleh penulis

Dari tabel di atas maka total nilai Threat (T) Vietnam adalah 78 sedangkan China adalah 6. Dengan menggunakan rumus 2 di atas, maka hasil penghitungan resiko China dan Vietnam adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Pengukuran Resiko China – Vietnam

Negara	V x T	Resiko
Vietnam (RV)	2294 x 78	178932
China (RC)	2173 x 6	13038
RV : RC	13 : 1	

*diolah oleh penulis

Dari perhitungan Resiko Vietnam dan Resiko China, maka perbandingan resiko China dibandingkan dengan resiko Vietnam adalah 1: 13, dimana Vietnam lebih beresiko mengalami tertutupnya akses melalui garis pantainya. Apabila sengketa teritorial di kawasan laut China Selatan tereskalasi menjadi konflik berskala besar atau menjadi perang, maka Vietnam 13 kali lebih beresiko menjadi negara gagal daripada China.

Dengan demikian, faktor wilayah khususnya indikator kedekatan kawasan sengketa (Kepulauan Spratly dan Paracel) dengan China-Vietnam sangat berpengaruh terhadap konflik di Laut China Selatan antara China dan Vietnam pada periode 2009 sampai 2011. Hal ini dapat dilihat dari tingginya klaim kepemilikan Vietnam terhadap kawasan Kepulauan Paracel yang menjelaskan mengapa terjadi peningkatan ketegangan diplomatik (*diplomatic tension*) antara China-Vietnam sepanjang periode ini. Tingginya klaim kepemilikan ini meningkatkan sensitivitas Vietnam atas tindakan-tindakan China di kawasan LCS.

Sementara itu, indikator panjang garis pantai mempengaruhi tingginya resiko negara pengklaim untuk menjadi negara gagal akibat terputusnya akses ke dunia internasional melalui garis pantai yang berbatasan dengan daerah sengketa. Dalam hal ini, Vietnam lebih beresiko daripada China karena panjangnya garis pantai atau tingkat kerentanan yang dikalikan dengan ancaman yang dihadapi sepanjang 2009 – 2011. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa Vietnam lebih beresiko 13 kali daripada China. Karena itu, konflik dapat menjadi semakin memanas karena kerentanan Vietnam yang besar atas tindakan China menimbulkan eskalasi konflik menjadi tak terhindarkan.

3.2. Energi

Seperti yang telah dinyatakan oleh Ralf Emmers, sumber daya alam dan energi mempengaruhi tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Persediaan energi yang mencukupi sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu negara dan menjamin kualitas standar hidup warga negaranya. Sebagai isu strategis dan ekonomi, energi dapat menjadi dasar dibuatnya perjanjian aliansi, kebijakan yang ekspansionis dan penyebab terjadinya konflik

Competition over a variety of resources and historically legitimized claims to national homeland has inspired war throughout history. Increased demand

*coupled with decreasing availability of resources has potential to aggravate existing tensions and instigate potential conflict*⁹⁰.

Konflik terkait energi akan menjadi konflik yang lebih besar apabila berkaitan dengan konflik teritorial terkait perbatasan. Sumber daya energi yang berada di kawasan sengketa perbatasan sangatlah berpotensi untuk meningkatkan intensitas dan eskalasi konflik antar negara yang terlibat karena adanya kepentingan realis untuk memperoleh kandungan energi yang ada di kawasan tersebut.

*“...where boundaries cross both the identity and resource divide at one and at the same time, the potential for boundary conflict is greatest”*⁹¹.

Kawasan Laut China Selatan dengan perkiraan akan kandungan energi, khususnya minyak dan gas alam yang menjadi sengketa antara China dengan Negara pengklaim di Asia Tenggara, sampai saat ini belum terselesaikan, khususnya China dan Vietnam. Kedua negara sama-sama memiliki kepentingan untuk memperoleh manfaat dari kandungan energi yang berada di LCS. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan energi domestik yang besar dihadapkan dengan semakin berkurangnya jumlah persediaan energi global. Emmers melihat bahwa faktor energi menyebabkan permasalahan konsumsi dan produksi energi yang dulunya adalah masalah *low politics* menjadi masalah *high politics* yang berkaitan dengan hubungan antar Negara dan penggunaan kekuatan militer.

3.2.1. Gambaran Umum Situasi Energi Vietnam

Secara garis besar, Vietnam merupakan salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar di Asia Tenggara selama dua dekade terakhir⁹². Vietnam meningkatkan eksplorasi energi dan bekerjasama dengan perusahaan asing sektor migas serta melakukan reformasi pasar untuk mendorong industri energi. Hal ini telah mampu meningkatkan produksi migas, namun akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat, industrialisasi dan ekspansi pasar ekspor telah menyebabkan peningkatan konsumsi energi domestiknya. Seperempat dari konsumsi energi Vietnam adalah minyak

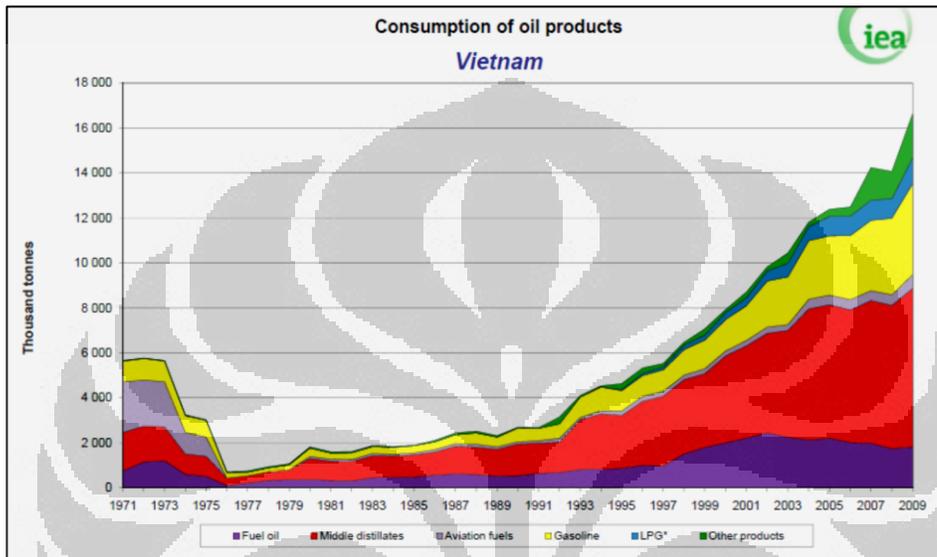
⁹⁰ Ralf Emmers, *op. cit.*, hlm. 7

⁹¹ Ralf Emmers, *op. cit.*, hlm. 9

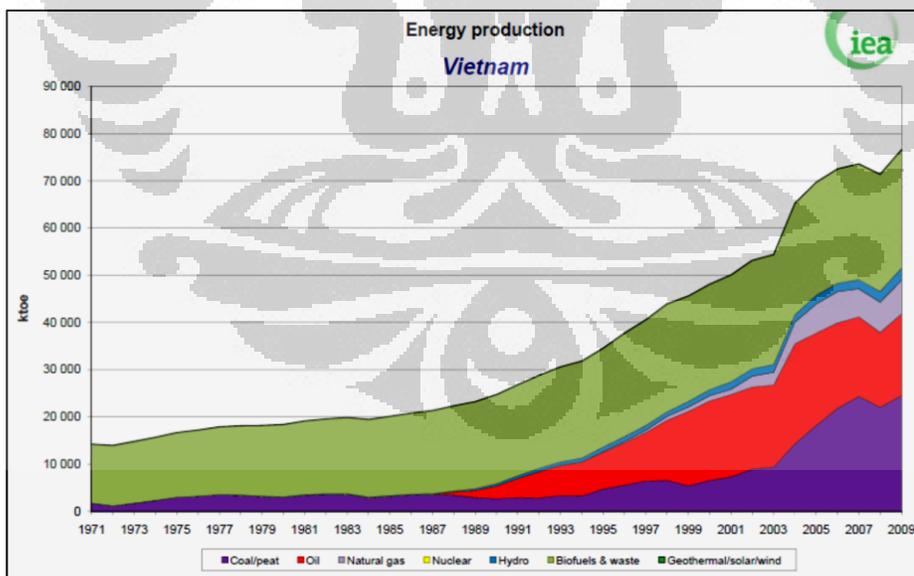
⁹² US Energy Information Administration. “Country Analysis Brief: Vietnam”, (Washington, 9 Mei 2012), diunduh melalui www.eia.doe.gov 27 Mei 2012 pukul 13.45.

sementara sisanya berasal dari energi hidropower (10 %), batubara (20 %), dan gas alam (11 %) ⁹³. Vietnam menempati posisi ketiga di kawasan Asia Pasifik sebagai Negara dengan cadangan minyak terbesar setelah China dan India ⁹⁴. Bahkan pada tahun 2012 tercatat Vietnam memiliki cadangan minyak sebanyak 4,4 milyar barel.

Gambar 3.3. Konsumsi minyak Vietnam⁹⁵



Gambar 3.4. Produksi Energi Vietnam⁹⁶



⁹³ International Energy Agency (IEA) diakses melalui www.iea.org pada 26 Mei 2012 pukul 09.45

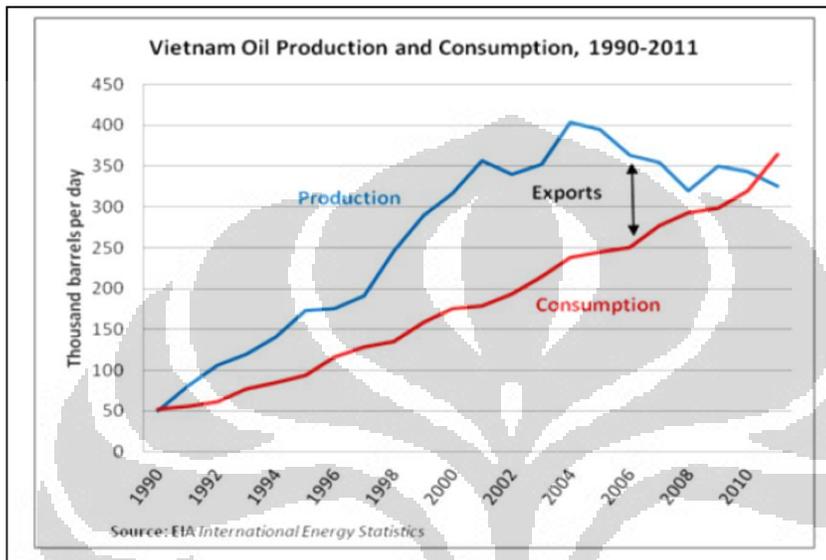
⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

Pada tahun 2010, Vietnam mengkonsumsi 320.000 bbl/d dan IEA memperkirakan bahwa konsumsi minyak akan meningkat sampai lebih dari 400.000 bbl/d dan meningkat melebihi tingkat produksinya seperti yang terlihat dari grafik di bawah ini

Gambar 3.5. Produksi dan Konsumsi Minyak Vietnam tahun 1990 - 2011



Sumber: US Energy Information Administration, International Energy Statistic, 2012

Selama tahun 1990 sampai 2010, produksi minyak Vietnam melebihi konsumsi domestik sehingga nilai ekspor jauh melebihi konsumsi dalam negeri. Namun, akibat pertumbuhan ekonomi dan industri yang pesat maka garis konsumsi dan produksi bertemu di satu titik di tahun 2010 yang menunjukkan bahwa konsumsi energi minyak Vietnam semakin meningkat bahkan diperkirakan akan melebihi tingkat produksinya.

Selain menjadi Negara dengan cadangan minyak yang besar, Vietnam juga kaya akan cadangan gas alam dengan cadangan gas alam sebanyak 24,7 trillion cubic feet (Tcf) pada tahun 2012. Pada 2010, produksi gas alam mencapai 290 billion cubic feet (Bcf) atau 0.8 Bcf/d dan diperkirakan akan meningkat sebanyak 1,4 Bcf/d pada 2015. Saat ini, Vietnam merupakan Negara yang mampu memenuhi kebutuhannya gas bumi tanpa mengimpor gas alam dari negara lain (*self-sufficient*).

Vietnam dan China terlibat dalam sengketa klaim atas area yang kaya akan minyak yaitu cekungan Song Hong, Phu Khanh dan Vung May. Vietnam dan beberapa Negara tetangganya telah sepakat untuk melakukan *joint exploration* migas di area-area tersebut, namun belum terselesaikannya permasalahan sengketa teritorial menyebabkan kerjasama ini terhambat. Karena eksplorasi energi hidrokarbon menjangkau kawasan di bawah air dan terjadi peningkatan kebutuhan migas di kawasan Asia Pasifik, maka ketegangan akibat masalah teritorial pun menjadi tak terhindarkan dan cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir, khususnya antara China dan Vietnam⁹⁷.

3.2.2. Gambaran Umum Situasi Energi China

China merupakan konsumen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, namun memiliki cadangan minyak terbesar di Asia Pasifik. Pada tahun 1990an, China berubah dari Negara pengekspor minyak menjadi Negara pengimpor minyak sejak tahun 2006. Konsumsi minyak China meningkat dan mencapai sepertiga dari konsumsi minyak seluruh dunia pada tahun 2009. Untuk memenuhi kebutuhan akan energi dalam negeri, China menggunakan batubara sebagai sumber energi utamanya sebesar 71 persen dari total konsumsi energi negara itu, sedangkan minyak adalah sumber energi terbesar kedua dengan nilai 19 persen dari keseluruhan total konsumsi energi China. Sedangkan gas alam hanya menyumbangkan 3,4 persen bagi seluruh konsumsi energi China⁹⁸.

China mengkonsumsi minyak 8,3 million barrel per day (bbl/d) pada 2009, sedangkan impor minyak China mencapai 4,3 million bbl/d pada tahun 2009, menjadikan China sebagai Negara pengimpor terbesar kedua setelah Amerika Serikat sejak 2009 dan melebihi konsumsi minyak Jepang untuk pertama kalinya⁹⁹. EIA memprediksi bahwa konsumsi minyak China akan semakin meningkat pada tahun 2010 dan 2011 dengan permintaan sebesar 9,6 juta bbl/d pada 2011. Sebaliknya,

⁹⁷ US EIA, *loc. cit.*, hlm. 2

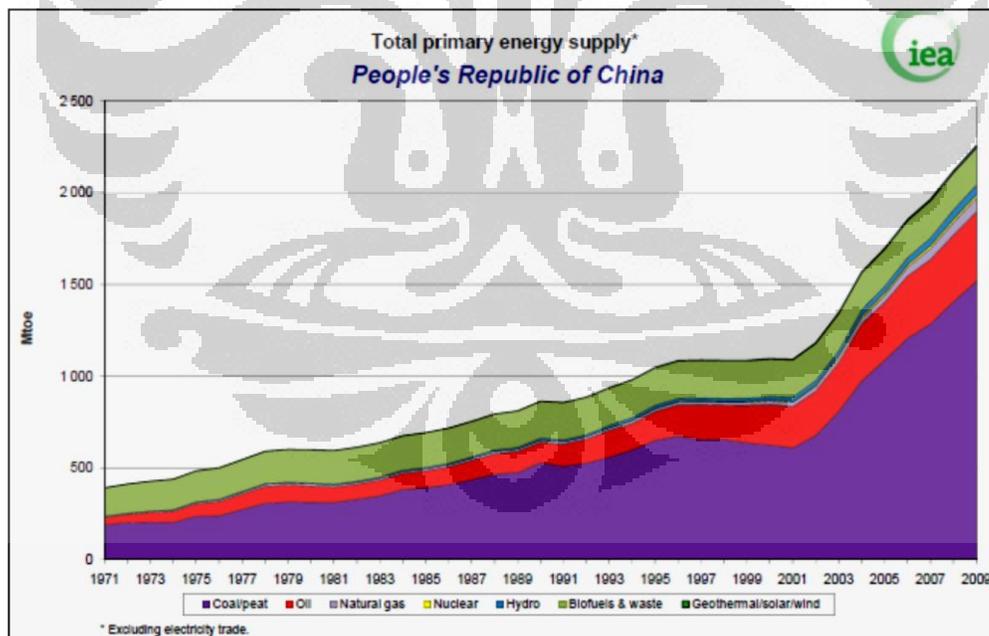
⁹⁸ US Energy Information Administration (US EIA), "Country Analysis Brief: China Energy Data, Statistics and Analysis - Oil, Gas, Electricity, Coal" (Washington: November 2010), diakses melalui www.eia.doe.gov pada 29 Mei 2012 pukul 10.30

⁹⁹ *Ibid*

produksi minyak juga diperkirakan akan meningkat dari 150 ribu bbl/d sampai 4,2 juta bbl/d pada 2011. Prediksi EIA International Energy Outlook menyebutkan bahwa kebutuhan bahan bakar minyak China akan meningkat sebesar 17 juta bbl/d pada tahun 2035. Sedangkan cadangan minyak China pada 2010 adalah sebesar 20,4 milyar barrel¹⁰⁰.

Akibat peningkatan konsumsi energi khususnya minyak China, pemerintah China berupaya melakukan eksplorasi energi oleh perusahaan energi nasionalnya yaitu *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)* di beberapa kawasan yaitu di Bohai Bay dan Laut China Selatan (*offshore*) dan provinsi China bagian barat yaitu Xinjiang, Sichuan, Gansu, and Inner Mongolia (*onshore*) sehingga pada 2009 China berhasil menemukan lebih dari 50 sumber minyak. Tahun 2009 China juga telah berhasil memproduksi energi hidrokarbon di kawasan LCS sebanyak 245.000 boe/d – 191,000 boe/d untuk minyak dan 54,000 boe/d (324 MMcf/d) gas alam. Selain itu, cadangan hidrokarbon yang dimiliki CNOOC pada tahun 2009 adalah 957 juta boe/d.

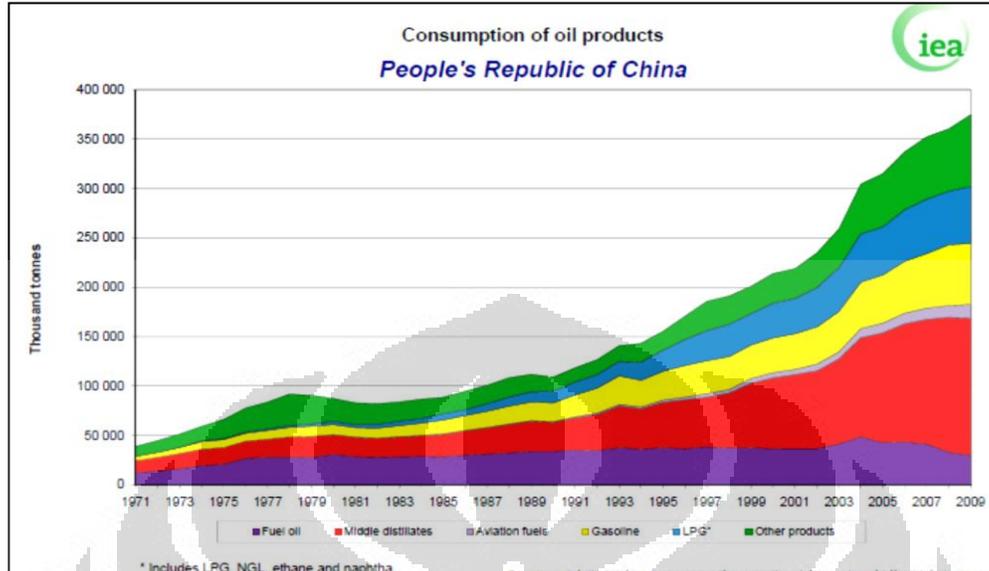
Gambar 3.6. Produksi Energi China Tahun 1971 – 2009¹⁰¹



¹⁰⁰ *Ibid*

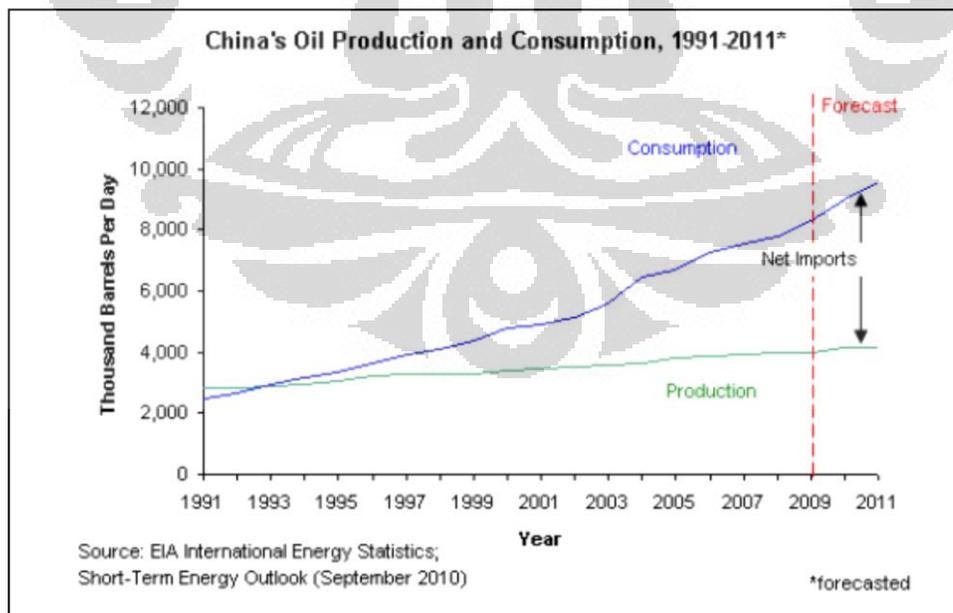
¹⁰¹ *Ibid*

Gambar 3.7. Konsumsi produk minyak China 1971 – 2009



Kedua gambar di atas menunjukkan peningkatan persediaan energi China dan peningkatan konsumsi energi negara tersebut selama rentan tiga dekade terakhir. Sementara itu, antara produksi energi domestik dengan konsumsi energi China, terlihat adanya gap yang cukup besar yang kemudian harus diatasi dengan menjadi net importer.

Gambar 3.8 Gap Konsumsi dan Produksi Energi Domestik China 1991- 2011¹⁰²



¹⁰² *Ibid*

Untuk mengeksplorasi energi hidrokarbon di LCS, China menggandeng beberapa perusahaan minyak dunia seperti ConocoPhillips, Shell, Chevron, BP, Husky, Anadarko, dan Eni. Akan tetapi, akibat sengketa teritorial yang berkepanjangan di kawasan tersebut, beberapa perusahaan minyak asing menghentikan rencana mereka untuk mengeksplorasi kawasan seperti yang dilakukan oleh BP pada tahun 2007.

3.2.3. Pengaruh Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi terhadap Konflik

Masalah konsumsi dan produksi energi yang pada awalnya merupakan isu domestic yang bersifat *low politic* menjadi masalah *high politic* karena berbenturan dengan kepentingan negara lain dan menyebabkan adanya insiden berupa ketegangan militer seperti yang terjadi di kawasan LCS. Hal ini disebabkan karena kedua negara sama-sama memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan energi mereka yang semakin meningkat sedangkan kapasitas produksi energi belum mampu mengimbangi konsumsi energi domestik mereka. Akibatnya, keinginan memenuhi kebutuhan konsumsi energi dalam negeri ini mendorong keinginan untuk mengeksplorasi kawasan yang berpotensi memiliki cadangan hidrokarbon yang besar seperti LCS meskipun masih menjadi kawasan sengketa.

Oleh karena itu, dorongan mengeksplorasi energi ini sebagian besar dipengaruhi oleh rasio konsumsi energi dibandingkan dengan produksi energi sehingga hasilnya akan menunjukkan apakah kapasitas produksi sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan energi negara tersebut. Untuk melihat bagaimana faktor energi berpengaruh terhadap eskalasi konflik di LCS, perlu mengukur rasio antara kapasitas produksi dengan konsumsi energi China–Vietnam per tahun sejak tahun 2009 sampai 2011. Kemudian diperbandingkan untuk melihat siapa yang lebih berpotensi menghadapi masalah kelangkaan energi. Kelangkaan energi ini kemudian akan menjadi penyebab keinginan ekspansif negara untuk memperoleh sumber energi baru untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang tidak dapat dicukupi secara domestik.

Idealnya, kapasitas produksi dan konsumsi berada dalam satu titik pertemuan yang menandakan bahwa kebutuhan dalam negeri mampu dicukupi dengan kapasitas produksi atau tingkat pemenuhan kebutuhan energi (Y) sebesar 100 % dengan nilai perbandingan antara konsumsi dan produksi (rasio) adalah 1. Sedangkan apabila r melebihi 1 atau Y di atas 100 %, maka negara tersebut surplus persediaan energi. Rumus yang dapat digunakan adalah

Rumus 3

$$Y = P/K \times 100\%$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi

K= Konsumsi

P= Produksi

Dengan menggunakan rumus di atas, maka Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi Minyak China – Vietnam pada 2009 sampai 2011 dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.8. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi Minyak China–Vietnam 2009-2011

Tahun	Konsumsi Minyak (dalam Thousand Barrels per Day)		Produksi minyak (dalam Thousand Barrels per Day)		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi/Y (%)	
	China	Vietnam	China	Vietnam	China	Vietnam
2009	8537,856	298	4025,868	350,3973	47,15	117,58
2010	9391,641	320	4306,278	343,1781	45,87	107,24
2011	8924	352	4302,879	325,8685	48,21	92,57

*data diolah oleh penulis berdasarkan data dari *International Energy Agency 2012*

Dari tabel ini terlihat bahwa kapasitas produksi minyak China periode 2009 – 2011 hanya mampu memenuhi 45 sampai 48 % dari total konsumsi minyak China. Artinya, total konsumsi China hanya mampu dipenuhi oleh kapasitas produksi dalam negeri sebanyak kurang dari setengahnya saja. Meskipun kapasitas produksi meningkat dari tahun 2009 sampai 2011, namun konsumsi energi juga sangat besar yang pada 2009 dan hanya mampu dipenuhi sebanyak 47%. Kemudian pada 2010 kemampuan pemenuhan kebutuhan energi berkurang menjadi 45% dan pada 2011 naik lagi menjadi 48%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan energi minyak China tahun 2009 – 2011 adalah fluktuatif namun tidak pernah lebih dari 50%.

Sementara itu, tingkat pemenuhan kebutuhan energi Vietnam pada tahun 2009 dan 2010 mengalami surplus dengan 117% pada tahun 2009, kemudian menurun pada tahun 2010 menjadi sebesar 107,24%. Sedangkan pada tahun 2011, tingkat pemenuhan kebutuhan energi minyak Vietnam berkurang menjadi hanya 92 %. Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa konsumsi energi Vietnam semakin meningkat sedangkan kapasitas produksinya semakin menurun.

Sedangkan pengukuran kebutuhan energi gas alam adalah sebagai berikut

Tabel 3.9. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi Gas Alam China–Vietnam 2009-2011

Tahun	Konsumsi Gas alam (dalam billion cubic feet)		Produksi gas alam (dalam billion cunic feet)		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Energi/Y (%)	
	China	Vietnam	China	Vietnam	China	Vietnam
2009	3125	250	2975	250	95,2	100
2010	3768	290	3334	290	88,48	100
2011	3257	295	2585	295	79,36	100

* data diolah penulis dari *US EIA dan Business Monitor International 2011*

Dari tabel di atas, tingkat pemenuhan kebutuhan energi gas alam Vietnam dari tahun 2009 sampai 2010 adalah 100% menunjukkan bahwa Vietnam berhasil memenuhi kebutuhan gas alam dalam negeri tanpa ada kecenderungan untuk meningkatkan produksi untuk diekspor. Sementara itu, China telah berupaya memenuhi sebagian besar kebutuhan gas alam domestiknya dengan tingkat pemenuhan kebutuhan energi sebesar 88 % sampai 95 % di tahun 2009 sampai 2010. Meskipun demikian, tingkat pemenuhan kebutuhan energi gas alam China cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun terbukti dengan berkurangnya nilai produksi gas alam sejak tahun 2009 dan pada tahun 2011 hanya mampu memenuhi 79% dari konsumsi domestik China.

Berdasarkan penghitungan rasio produksi dengan konsumsi energi hidrokarbon China dan Vietnam, maka dapat dilihat bahwa China merupakan negara dengan tingkat konsumsi energi yang lebih besar daripada Vietnam. Akan tetapi, tingkat produksi energi China selalu lebih kecil daripada produksinya, yang menjadikan negara ini sebagai net importer terbesar kedua di dunia. Dengan keadaan semacam ini, China memiliki potensi untuk melakukan eksplorasi energi khususnya minyak dan gas alam ke kawasan yang kaya akan minyak dan gas alam seperti di Laut China Selatan. Hal ini dikarenakan China akan mengalami kelangkaan energi apabila kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan produksi energi global yang menipis.

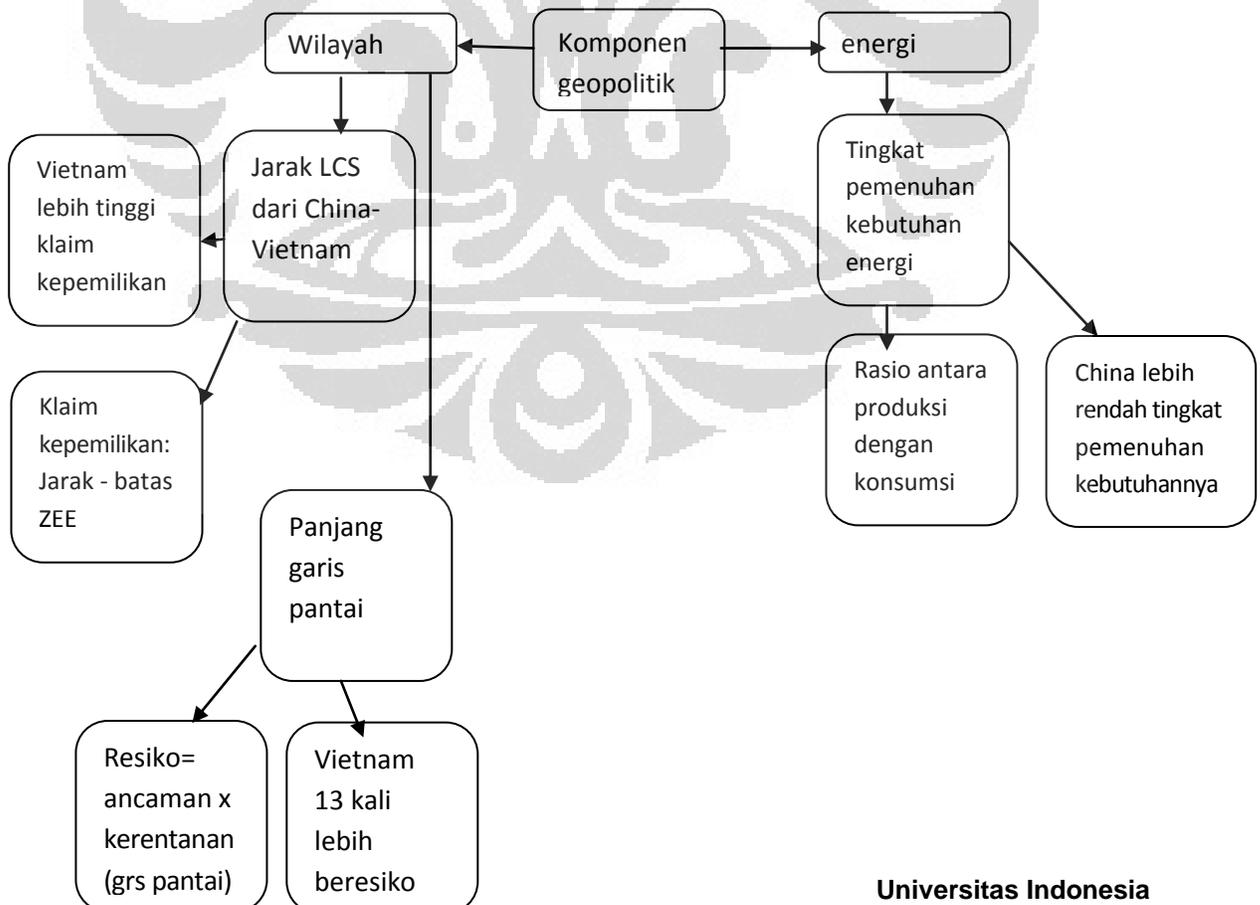
Keinginan untuk meningkatkan produksi energi hidrokarbon dan mengurangi ketergantungan sebagai net importer akan mendorong China melakukan eksplorasi di kawasan yang masih menjadi sengketa dengan Vietnam khususnya di LCS. Dengan demikian, hal ini akan membawa pada eskalasi konflik karena Vietnam juga mengklaim kawasan itu serta memiliki kepentingan untuk memperoleh energi hidrokarbon. Di samping itu, produksi minyak Vietnam sepanjang periode 2009 sampai 2011 juga mengalami penurunan sehingga Vietnam tentunya akan melakukan upaya untuk mengeksplorasi energi di LCS yang diklaim oleh Vietnam. Meskipun Vietnam tidak kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan energi, namun tekanan

industrialisasi dan kemajuan ekonomi Vietnam semakin lama semakin membutuhkan sumber daya energi yang besar. Oleh karena itu, cadangan hidrokarbon di LCS menjadi opsi terbaik bagi Vietnam untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Kepentingan dua negara pengklaim untuk meningkatkan produksi energi hidrokarbonnya akan menyebabkan keduanya semakin mempertegas klaimnya di kawasan Laut China Selatan. Bahkan China, yang membutuhkan sumber daya migas yang lebih besar daripada Vietnam karena produksinya tidak mencukupi kebutuhan domestik, dapat bertindak sangat agresif di kawasan LCS. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan energi migas China periode tahun 2009 sampai 2011.

Secara ringkas, pembahasan di bab ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.9. Matriks Temuan Bab 3



BAB 4

PENGARUH *POWER* TERHADAP KONFLIK CHINA – VIETNAM

DI LAUT CHINA SELATAN PERIODE 2009 - 2010

Setelah membahas komponen wilayah dan energi di bab sebelumnya, maka bab ini akan membahas tentang komponen ketiga dalam geopolitik yaitu *power*. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ralf Emmers (2010), *power* selalu berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer dan sejalan dengan pandangan bahwa politik internasional adalah *struggle for power* dan *power* selalu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Melalui sudut pandang geopolitik, *power* dianalisis dari dimensi militer dan strategis yang mengandung pemahaman akan adanya kekuatan koersif untuk menekan negara lain. Komponen *power* dalam teori geopolitik yang diungkapkan oleh Ralf Emmers ini berkaitan dengan tradisi realis yang melihat negara sebagai aktor utama dalam politik internasional yang hanya berfokus untuk bertahan hidup dan meningkatkan keamanannya.

Oleh karena itu, negara meningkatkan *powernya* melalui kekuatan militer dan ekonomi. Joseph S. Nye, Jr (2011) menyatakan beberapa definisi *power* yaitu (1) *power* adalah kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan, (2) *power* adalah kapasitas untuk melakukan hal-hal dalam situasi sosial untuk mempengaruhi pihak lain agar memperoleh tujuan yang diinginkan dan (3) *power* adalah sumber daya yang mampu menghasilkan apa yang diinginkan¹⁰³. Oleh karena itu, *power* yang berkaitan dengan kepemilikan sumber daya seperti wilayah dan sumber alam mempengaruhi hubungan suatu negara dengan negara lain.

Pada bab ini, penulis akan melihat bagaimana *power* mempengaruhi konflik antara China-Vietnam di LCS periode 2009 sampai 2011. *Power* yang berkaitan dengan kekuatan maritim dalam hal ini akan dianalisis dengan melihat kapabilitas maritim kedua negara. Untuk mempertahankan klaimnya di mata internasional,

¹⁰³ Joseph S Nye, "The Future of Power", (New York: Public Affairs, 2011), hlm. 5 – 8

negara tidak hanya menggunakan instrument diplomasi saja namun juga perlu diperkuat dengan angkatan laut yang kuat dan masif sehingga tidak akan dengan mudah ditekan oleh negara lain. Untuk melihat pengaruh dari komponen *power* ini, penulis akan meneliti kapabilitas kekuatan maritime negara, tingkat agresivitas dan strategi untuk mempertahankan klaim di kawasan LCS.

4.1. Kapabilitas Angkatan Laut China – Vietnam

Kapabilitas angkatan laut dapat dilihat dari jenis-jenis persenjataan, jumlahnya maupun jumlah pasukan angkatan laut yang dimiliki oleh negara tersebut. Jenis-jenis persenjataan yang bersifat ofensif yang dimiliki suatu negara akan menjadi *backing* dalam mempertahankan klaimnya maupun memaksakan klaim tersebut terhadap negara pengklaim lainnya. Selain jenis, jumlah yang signifikan juga mempengaruhi bagaimana negara tersebut akan memproyeksikan kekuatannya di kawasan sengketa yang diklaimnya.

Negara akan mempersenjatai diri sebagai usaha untuk mencapai keamanan terhadap ancaman (*threat*) pihak lain atau meningkatkan kekuatan (*power*) untuk mencapai tujuan politik terhadap kepentingan negara lain¹⁰⁴. Dengan demikian, negara mempersenjatai diri untuk menghadapi anarki internasional dan ancaman luar. Dengan kata lain, kekuatan militer, khususnya kekuatan maritim, dapat digunakan untuk mencapai tujuan melalui *force*, baik itu secara eksplisit maupun implisit¹⁰⁵. Secara eksplisit adalah dengan melakukan tindakan militer seperti penangkapan, penembakan maupun pengusiran kapal asing yang berada di kawasan sengketa. Sedangkan secara implisit misalnya dengan melakukan *naval live fire* atau latihan militer berskala besar di kawasan sengketa yang menampilkan berbagai persenjataan ofensif untuk memberikan efek gentar kepada negara pengklaim lainnya.

Perselisihan teritorial antara China dan Vietnam di kawasan Laut China Selatan pun tak lepas dari peran persenjataan untuk membela klaim masing masing

¹⁰⁴ Barry Buzan, *The Arms Dynamics in World Politics*, (London: Lynne Rienner. 1998), hlm. 79

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 80

negara di kawasan ini. Sejak tahun 2000, China mengubah fokus dari pertahanan darat menuju ke pertahanan laut dengan melakukan pembelian besar-besaran sistem senjata baru, restrukturisasi angkatan bersenjata, membeli kapal destroyer, kapal selam dan meningkatkan kapabilitas *amphibious* pada armada laut selatan China atau South Sea Fleet (SSF)¹⁰⁶. Selain itu, sejak tahun 2009, China mengembangkan teknologi persenjataan terbaru seperti pesawat J-20, kapal selam serang, dan kapal induk untuk memperluas keberadaannya secara fisik di kawasan LCS serta memperkuat klaimnya. Pada akhir 2010, China berhasil membuat pesawat siluman pembom generasi kelima (J-20) dan berencana untuk memiliki 78 kapal selam serang pada 2020. Selain itu, Desember 2010, secara resmi China mengakui telah memulai program pembangunan empat buah kapal induk. China juga mengadakan uji coba rudal berjarak jangkau 1000 km dan latihan militer di sekitar kawasan LCS pada 2009. Kemudian pada Juni 2011, Cina melakukan latihan taktis angkatan laut terbesar di laut Pasifik, melewati Filipina dan menuju Laut Cina Selatan¹⁰⁷. Dalam hal budget pertahanan, China merupakan peringkat kedua dalam Daftar 10 negara dengan budget pertahanan terbesar di dunia pada tahun 2011. Seperti gambar berikut

Gambar 4.1. Daftar 10 negara dengan Anggaran Pertahanan Terbesar di Dunia¹⁰⁸



¹⁰⁶ Ralf Emmers, *op. cit.*, hlm. 85.

¹⁰⁷ Latihan melibatkan kapal perang, UAV, kapal frigat, kapal intelijen diakses dari “Chinese navy fleet completes largest-ever training in Pacific” melalui <http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1101&MainCatID=11&id=20110625000003> pada 03 Juni 2012 pukul 17.25

¹⁰⁸ SIPRI Yearbook 2011 (Stockholm: SIPRI, 2011)

Sedangkan jumlah pasukan angkatan laut China adalah 255.000 pada 2010.

Sementara itu, Vietnam juga mulai melakukan modernisasi militernya sejak akhir 1990an misalnya dengan meningkatkan anggaran pertahanannya yang bernilai seperempat dari seluruh anggaran negara pada tahun 1995, membeli persenjataan dari Rusia misalnya Flanker fighter, Su-30K fighter, kapal misil, stasiun radar dan kapal selam dari Korea Utara. Saat ini, Vietnam memiliki 3 korvet, lebih dari 12 kapal patroli *Svetlyak*-class fast-attack dan PSC dari Korea Utara dan Polandia. Vietnam juga menandatangani perjanjian pembelian senjata dengan Polandia pada 2005 untuk pembelian 10 pesawat patroli maritim dan 40 pesawat Su-22M. Selain itu, Vietnam juga mengembangkan lebih dari 40 kapal patroli 400-ton dan 6 kapal patroli pantai 150-ton. Angkatan Laut Vietnam juga mengumumkan akan membeli 6 *Kilo*-class kapal selam diesel-electric dari Russia. Sedangkan jumlah angkatan laut Vietnam pada 2011 adalah 13.000.

Secara singkat, kapabilitas maritime kedua negara dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 4.1. Kapabilitas Maritim China – Vietnam

Equipment	China	Vietnam
Submarines	71	2
Principal Surface Combatants	78	7
Patrol and Coastal Combatants	211	49
Mine Warfare	89	13
Amphibious	239	6
Support	285	24
Missile	72	
Aircraft	436	
Helicopters	80	
Tank	124	

Armoured Combat Vehicles	248	
Artillery	40	
Total	1973	101

Sumber: Military Balance 2011, (London: Routledge, 2011)

Dari tabel di atas dapat dipecah lagi menjadi senjata ofensif dan defensif. Senjata ofensif adalah senjata yang dapat digunakan sebagai alat penyerang sedangkan senjata defensif adalah senjata yang digunakan sebagai senjata untuk bertahan. Menurut UN ROCA, yang termasuk dalam senjata ofensif adalah Combat Aircraft, Warship dan Missile. Dari tabel di atas, China memiliki combat aircraft dengan jumlah 436, sementara Vietnam tercatat belum memiliki combat aircraft untuk kapabilitas maritimnya. Sedangkan warship yang terdiri dari Principal Surface Combatant, Submarine, Patrol and Coastal Combatant jumlah yang dimiliki China jauh lebih besar daripada Vietnam. Sedangkan untuk misil, Vietnam belum memiliki sementara China memiliki 72 misil dengan jarak jangkauan serangan yang bervariasi. Dalam hal jumlah pasukan angkatan laut, China memiliki 255.000 pasukan sedangkan Vietnam hanya 13.000 saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapabilitas maritim China dan Vietnam sangatlah asimetris baik dalam hal jenis maupun jumlah. Hal ini mempengaruhi perilaku China terhadap Vietnam dalam hal menegaskan klaimnya di kawasan LCS terbukti dengan berbagai insiden penangkapan kapal, pemotongan kabel eksplorasi, dan pengusiran kapal Vietnam dari kawasan sengketa. Semua dilakukan China dengan menggunakan kapabilitas maritim yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan militer Vietnam. Oleh karena itu, faktor kapabilitas maritim ini menjadi pendukung bagi China dalam menunjukkan kekuatannya di kawasan LCS sehingga seringkali menimbulkan insiden yang semakin memperpanas konflik di kawasan tersebut.

4.2. Tingkat Agresivitas

Meskipun telah berlangsung selama beberapa dekade, namun konflik di Laut China Selatan terlihat mengalami eskalasi selama beberapa tahun terakhir. Insiden-insiden yang terjadi melibatkan China dan Vietnam menunjukkan bahwa kedua negara memiliki tingkat agresivitas terhadap kawasan yang diklaim. Agresivitas ini berkaitan dengan definisi *power* oleh Joseph Nye bahwa *power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kemampuan untuk mendapatkan yang diinginkan itu kemudian direalisasikan dengan tindakan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain karena terjadinya pemaksaan kehendak. Dalam konteks sengketa teritorial, kemampuan untuk mendapatkan yang diinginkan yaitu wilayah yang disengketakan tersebut akan selalu berbenturan dengan kepentingan negara pengklaim lainnya. Benturan kepentingan menunjukkan bahwa suatu negara itu agresif untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

Tingkat agresivitas oleh penulis didefinisikan sebagai tindakan suatu negara untuk menegaskan klaimnya di kawasan Laut China Selatan dengan didasari oleh *power* yang dimilikinya. Mengetahui tingkat agresivitas akan berguna untuk melihat siapa yang cenderung melakukan tindakan yang akan memperburuk konflik yang sudah ada. Semakin tinggi tingkat agresivitasnya, semakin besar pula potensinya untuk memprovokasi negara pengklaim lainnya di kawasan sengketa. Secara sederhana, tingkat agresivitas dapat diketahui dari banyaknya (frekuensi) insiden dikalikan dengan skala intensitas dari tindakan negara yang bersangkutan. Skala intensitas tindakan negara dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 4.2. Skala Intensitas Tindakan Negara

Tindakan	Skala intensitas
Konflik militer	5
Penangkapan kapal	4
Kebijakan LN (nota protes, unilateral	3

fishing ban, pengumuman resmi, dsb)	
Perang verbal (melalui media)	2
Gerakan nasionalis (protes, dsb)	1

*diolah oleh penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa skala intensitas tindakan negara yang memiliki skala tertinggi adalah konflik militer. Konflik militer menempati skala tertinggi (5) karena menunjukkan situasi adanya intervensi militer atau perang untuk memaksakan solusi¹⁰⁹. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi konflik militer merupakan kondisi yang paling berbahaya dan terkait dengan perang antar negara yang bersengketa. Sementara itu, penangkapan kapal menempati skala 4 karena dilakukan oleh pihak militer sehingga menunjukkan adanya tekanan dengan menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi ketidaksesuaian atau *military tension*¹¹⁰. Selanjutnya, kebijakan luar negeri menempati skala 3 karena kebijakan luar negeri seperti nota protes, *unilateral fishing ban*, dan pernyataan resmi menunjukkan adanya eskalasi konflik diplomatik yang masih memiliki prospek penyelesaian dengan negosiasi dan klarifikasi¹¹¹. Kemudian, perang verbal di media menempati skala kedua karena menunjukkan kondisi aksi-reaksi atas tindakan kedua negara namun bukan merupakan pernyataan resmi sehingga tidak terlalu mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Sedangkan gerakan nasionalis menempati skala 1 sebagai skala terkecil karena menunjukkan adanya kesadaran akan adanya ketidaksesuaian¹¹² dan pengaruh dari tindakan tersebut hanya berdampak pada skala domestik saja sesuai dengan tahap-tahap konflik internasional yang diungkapkan oleh Quincy Wright.

¹⁰⁹ Quincy Wright, *op.cit.*, hlm.434

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Paul K. Huth dan Todd Alle, *op. cit.*, hlm. 35

¹¹² Quincy Wright, *op. cit.*, hlm. 434

Untuk mengukur tingkat agresivitas, maka rumus yang digunakan adalah

Rumus 4

$$Z = I \times n$$

Keterangan:

Z: Tingkat Agresivitas

I: Skala intensitas tindakan negara

N: frekuensi insiden

Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh hasil seperti yang terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.3. Agresivitas China – Vietnam di LCS 2009 – 2011

Tahun	Insiden	Negara	Skala intensitas	Frekuensi	Nilai agresivitas (skala x frekuensi)
2009	Malaysia dan Vietnam memperluas batas landas kontinental mereka dari 200 mil menjadi 350 mil laut di LCS dan menimbulkan protes keras dari China dengan melayangkan <i>nota verbale</i> .	Vietnam	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
	China mempresentasikan klaimnya atas 80 persen kawasan LCS di depan UNCLOS	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
	China mengumumkan annual fishing ban di kawasan LCS	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3

	Vietnam memprotes annual fishing ban yang dibuat China di kawasan LCS	Vietnam	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
	China memprotes respon Vietnam yang membawa masalah pelarangan penangkapan ikan (<i>fishing ban</i>) di LCS forum multilateral.	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
	Latihan gabungan Kuaye-2009 skenario persiapan angkatan bersenjata Cina dalam serangan militer jarak jauh di kawasan Laut Cina Selatan dengan waktu yang singkat	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
2010	Terjadi 20 kali insiden penangkapan kapal nelayan Vietnam oleh kapal patroli China.	China	<i>Penangkapan kapal (4)</i>	20	80
	Vietnam mengirimkan 3 protes diplomatik terkait rencana China untuk mengembangkan pariwisata di Paracels dan penelitian kapal China yang memasuki kawasan yang diklaim Vietnam.	Vietnam	<i>Kebijakan LN (3)</i>	3	9
	Tersebar nya rencana invasi ke Vietnam dari salah satu situs internet di China	China	<i>Perang Verbal di Media (2)</i>	1	2
	Protes anti-china terkait tersebar nya rencana penyerangan China ke Vietnam	Vietnam	<i>Gerakan nasionalis (1)</i>	1	1
	China mengumumkan annual fishing ban di kawasan LCS	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
	China memperingatkan kepada perusahaan minyak asing untuk tidak mengeksplorasi energi di area yang diklaim Vietnam tapi memperbolehkan mereka untuk	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3

	melakukan eksplorasi di area yang masih menjadi sengketa				
2011	Pada Juni, China 2 kali merusak kapal survei minyak Vietnam dan memotong kabel eksplorasi pada kapal lainnya di dalam wilayah 200 mil laut atau ZEE Vietnam.	China	<i>Clash militer (5)</i>	2	10
	China melakukan latihan militer berskala besar di kawasan LCS	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
	Vietnam mengirimkan 2 protes terkait penerbitan peta batas maritime China yang memasukkan Paracel di dalam peta tersebut dan terkait dilakukannya pelatihan militer di dekat Paracel	Vietnam	<i>Kebijakan LN (3)</i>	2	6
	Demonstrasi nasionalis besar-besaran di Hanoi dan Ho Chi Minh City atas kejadian pemotongan kabel kapal Seismik Vietnam oleh kapal China	Vietnam	<i>Gerakan nasionalis (1)</i>	2	2
	China memprotes demonstrasi anti-China yang seakan-akan didukung oleh pemerintah Vietnam terkait insiden pemotongan kabel eksplorasi Vietnam di LCS oleh militer China	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
	Pernyataan China bahwa penyelesaian masalah sengketa di LCS adalah dengan 'the sound of cannon'	China	<i>Perang Verbal di media (2)</i>	1	2

	Pembuatan Peta yang memasukkan kawasan Paracel dan Spratly yang diklaim Vietnam	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
	Pengumuman annual fishing ban di kawasan LCS oleh China	China	<i>Kebijakan LN (3)</i>	1	3
	penyebutan kawasan Laut Cina Selatan sebagai kepentingan nasional yang utama oleh Cina	China	<i>Perang verbal melalui media (2)</i>	1	2
	Total tingkat agresivitas China	126			
	Total tingkat agresivitas Vietnam	24			

*diolah oleh penulis

Dari tabel di atas, tindakan yang dilakukan China – Vietnam bervariasi yaitu dari penangkapan kapal; kebijakan LN yang berupa pengiriman nota protes, pengumuman annual fishing ban, peringatan kepada perusahaan asing, pengumpulan peta kepada UNCLOS; perang verbal yaitu pernyataan yang provokatif dan gerakan nasionalis berupa demonstrasi. Meskipun ketegangan meningkat namun tercatat belum pernah ada tindakan yang mengarah pada perang antara kedua negara ini pada periode 2009 – 2011.

Lebih lanjut lagi, tabel ini juga menunjukkan tingkat agresivitas China yang lebih tinggi daripada Vietnam akibat banyaknya berbagai insiden yang mengarah pada pemaksaan kehendak China untuk menegaskan klaimnya di kawasan LCS. Tingkat agresivitas China adalah 126 dan Vietnam adalah 24, dengan perbandingan 5: 1. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan China lima kali lebih agresif karena seringnya melakukan tindakan yang berulang-ulang selama tiga tahun berturut-turut seperti penangkapan kapal nelayan Vietnam dan annual fishing ban di LCS. Agresivitas China ini didukung oleh kapabilitas militer China yang lebih kuat daripada Vietnam.

4.3. Strategi China – Vietnam untuk Mempertahankan Klaim di LCS

Vietnam dan China memiliki strategi yang berbeda dalam menegaskan klaimnya di kawasan Laut China Selatan. Strategi Vietnam adalah dengan melakukan internasionalisasi konflik serta mempererat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara ASEAN. Sementara itu, China menegaskan klaimnya dengan peningkatan kapabilitas maritimnya dan menginginkan penyelesaian masalah sengketa secara bilateral.

4.3.1. Strategi Vietnam

Salah satu strategi Vietnam untuk mempertahankan klaimnya di kawasan LCS adalah dengan melakukan upaya diplomasi dengan melakukan internasionalisasi atas konflik tersebut sebagai sebuah cara untuk meningkatkan posisi tawarnya di hadapan China¹¹³. Internasionalisasi konflik yang dilakukan Vietnam adalah dengan membawa masalah LCS ke forum multilateral seperti pertemuan KTT ASEAN di Hanoi pada tahun 2010 yang juga dihadiri oleh Amerika Serikat. Pembahasan tentang LCS di forum ini ditentang oleh China yang meyakini bahwa masalah sengketa LCS harus diselesaikan secara bilateral antara negara pengklaim secara individual dengan China.

Internasionalisasi konflik dilakukan Vietnam dengan melakukan kerja sama dengan negara – negara yang juga pengklaim di LCS misalnya Malaysia dengan melakukan partial joint submission kepada UNCLOS pada tahun 2009. Hal ini ditentang oleh China yang merasa bahwa tindakan kedua negara itu menyalahi kedaulatan China di LCS. Internasionalisasi konflik merupakan opsi yang terbaik bagi Vietnam untuk memperoleh dukungan dari negara-negara ASEAN seperti yang dinyatakan Emmers (2010) berikut:

Vietnam's best way and perhaps the only solution in order to pre-empt a fait accompli in the Spratlys is to depend on ASEAN support and to internationalize this issue as much as it possibly can...Vietnam try to push for

¹¹³ “Vietnam/China: Popular Anger Heightens Tension At Sea”, *Oxford Analytica Daily Brief Service*, (Jun 30, 2011) diakses melalui <http://search.proquest.com/docview/874584074?accountid=132811> pada 11 April 2012 Pukul 15.45

*a binding code of conduct on the SCS but Hanoi remains doubtful whether ASEAN is able to engender genuine cooperation with China*¹¹⁴

Meskipun demikian, Vietnam sendiri tidak dapat terlalu banyak bergantung pada mekanisme ASEAN untuk membuat China mau bekerja sama menyelesaikan masalah sengketa teritorial secara multilateral.

Oleh karena itu, Vietnam juga melakukan hal kerja sama dengan negara lain, khususnya mereka yang memiliki kekhawatiran yang sama yaitu kebangkitan militer China. Pada tahun 2009, Vietnam menandatangani kerja sama pertahanan dengan Rusia yaitu kerja sama untuk membangun reaktor nuklir pertama di Vietnam. Pada tahun 2010, Vietnam dan Amerika Serikat melakukan dialog politik dan militer yang diikuti dengan dialog tentang kebijakan pertahanan. Pada tahun 2011, Vietnam menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam hal kerja sama pertahanan dengan Jepang dengan melakukan beberapa kunjungan kehormatan pejabat tinggi maupun kerja sama untuk membangun sumber energi nuklir di Vietnam¹¹⁵.

Selain itu, Vietnam terus berupaya untuk meningkatkan profilnya di dunia internasional. Upaya yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan normalisasi hubungan AS-Vietnam, memperkuat integrasi Vietnam di dalam ASEAN, upaya untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 2008 dan menjadi ketua ASEAN pada 2010. Beberapa upaya ini dilakukan oleh Vietnam dalam rangka memperoleh dukungan internasional atas klaim kedaulatannya di Laut China Selatan dan meningkatkan kepercayaan diri Vietnam dalam menghadapi klaim China di LCS. Buku Putih Pertahanan Vietnam juga menunjukkan determinasi untuk melindungi klaim teritorialnya di kawasan LCS dengan membangun kerjasama pertahanan dan keamanan meskipun menghadapi resiko menentang China¹¹⁶. Meskipun demikian, aliansi pertahanan dengan negara-negara kuat seperti AS dan Jepang, yang dapat

¹¹⁴ Ralf Emmers, *op. cit.*, hlm. 89

¹¹⁵ Alex Calvo, "Japan-Vietnam Defence Agreement", (Spanyol: Center for Strategic Studies of Catalonia, 10 November 2011), hlm. 1

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2

menjadi cara Vietnam melindungi diri atas kemungkinan clash dengan China, kemungkinan besar belum akan dapat diwujudkan dalam waktu dekat.

4.3.2. Strategi China

Bila Vietnam menggunakan strategi menginternasionalisasi konflik dan bekerja sama dengan beberapa negara besar, China menggunakan strategi modernifikasi kapabilitas pertahanannya dengan cara meningkatkan anggaran pertahanan, meningkatkan persenjataan khususnya pembangunan kapal induk dan menolak pembahasan konflik dalam tataran multilateral.

Pada tahun 2009, anggaran pertahanan China mengalami kenaikan dari 60,1 milyar dollar AS pada 2008 menjadi 70,3 milyar dolar pada tahun 2009¹¹⁷. Jumlah ini adalah sekitar 1,8% dari total GDP China pada tahun 2009 yang mencapai 7,9 trilyun US dollar. Sementara itu pada tahun 2010 China diperkirakan telah meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi sekitar 98,36 milyar US dolar atau meningkat menjadi 1,98 % dari total GDP tahun 2010 yaitu 9,09 trilyun US dolar. Peningkatan anggaran pertahanan ini digunakan untuk memodernifikasi berbagai kemampuan angkatan lautnya yaitu dengan membangun empat kapal induk dalam rangka mengembangkan *blue-water capabilities*. Upaya penegasan klaim China dilakukan dengan cara menggelar sejumlah latihan militer, pembelian senjata dan proyek konstruksi senjata dalam negeri.

Dalam hal penggelaran latihan militer, pada Juli 2010 China menerjunkan lebih dari 12 kapal perang dari tiga armadanya untuk mengadakan latihan di LCS¹¹⁸. Latihan ini melibatkan sejumlah kapal serang permukaan dan kapal selam seperti destroyer Type 051C *Luzhou*; Type 052B *Luyang I* dan Type 052C *Luyang II*; frigate Type 054A *Jiangkai II*; empat destroyer SSF *Sovremenny* dan and kapal selam serang *Kilo-class*. Selain itu, beberapa uji coba penembakan misil dilakukan dalam latihan ini. Dalam hal pembelian sistem senjata baru, China membeli beberapa peralatan baru

¹¹⁷ *Military Balance 2011*, (London: Routledge, 2011) hlm. 125

¹¹⁸ *Ibid*

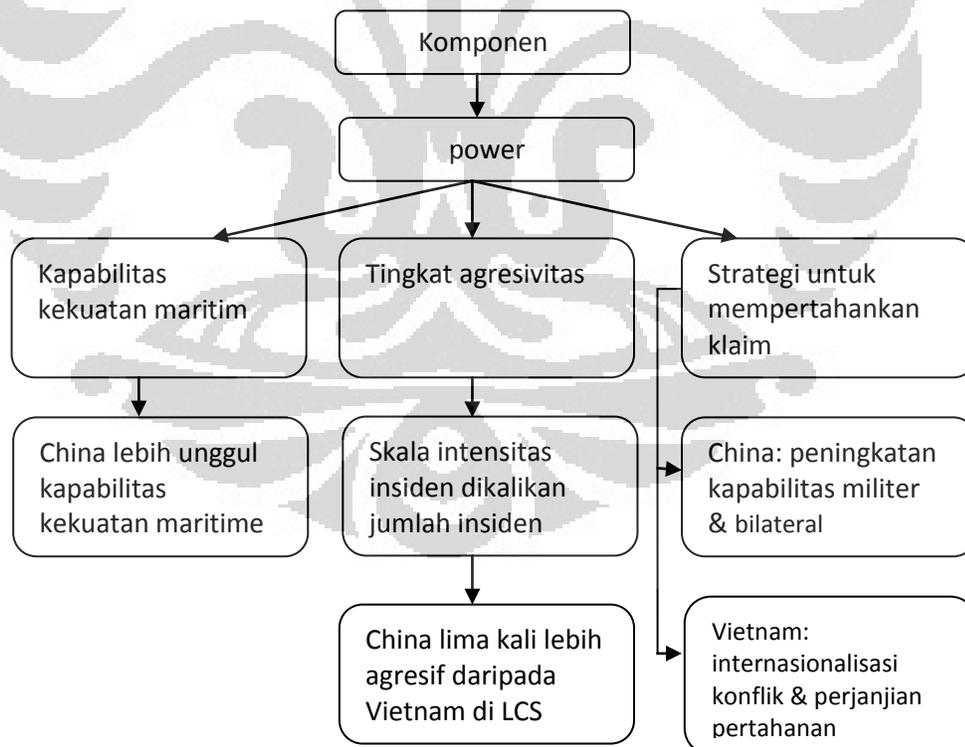
seperti amphibious fighting vehicles Type 063A yang digunakan untuk berlatih di LCS. Kemudian dalam hal proyek pembuatan senjata, China melakukan pengembangan produksi kapal selam dalam negeri yaitu hibrida antara Yuan and Kilo class serta pembangunan empat kapal induk. Ketiga hal ini menunjukkan determinasi China untuk memberikan efek gentar kepada dunia internasional pada umumnya dan Vietnam pada khususnya dalam hal sengketa teritorial di kawasan LCS.

Strategi China yang melakukan peningkatan kapabilitas militer sejak tahun 2009 ini berpotensi untuk meningkatkan *security dilemma* di kawasan, khususnya bagi negara-negara pengklaim LCS. Hal ini dikarenakan kekuatan China yang sungguh masif dapat menimbulkan kekhawatiran akan adanya pendudukan secara paksa China seperti yang terjadi pada saat penyerangan kepulauan Paracel pada tahun 1970an. Kekhawatiran ini memberikan implikasi bagi Vietnam untuk melakukan kerja sama dengan *major power* seperti AS, Jepang dan Rusia untuk menghadapi kebangkitan China. Dengan masuknya berbagai aktor asing dalam sengketa kedua negara ini, kemungkinan besar konflik akan menjadi semakin memanas di kawasan LCS.

Dapat disimpulkan bahwa komponen power dalam geopolitik mempengaruhi eskalasi konflik di kawasan Laut China Selatan dipandang dari tiga hal yaitu peningkatan kapabilitas maritim, tingkat agresivitas dan strategi China-Vietnam untuk mempertahankan klaim di kawasan ini. Dalam hal peningkatan kapabilitas maritim, China memiliki kekuatan maritim yang lebih besar daripada Vietnam dengan kepemilikan senjata yang lebih banyak dan lebih canggih, khususnya senjata ofensif. Oleh karena itu, China cenderung melakukan tindakan – tindakan provokatif sepanjang tahun 2009 sampai 2011 di LCS terhadap Vietnam karena memiliki *backing* berupa sistem persenjataan yang tidak dapat ditandingi oleh Vietnam. Sedangkan dalam hal tingkat agresivitas, China lima kali lebih agresif daripada Vietnam dilihat dari berbagai tindakan yang dilakukan bahkan secara berulang-ulang dalam tiga tahun berturut-turut.

Sementara itu, dalam hal strategi untuk mempertahankan klaim di LCS, Vietnam lebih memilih untuk menginternasionalisasi konflik dengan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan dari dunia internasional sementara China lebih memilih meningkatkan kapabilitas militer dengan meningkatkan anggaran pertahanan, menggelar latihan militer, membeli senjata baru dan mengembangkan sistem persenjataan domestik. Upaya internasionalisasi konflik akan memberikan keuntungan dari pihak Vietnam karena kerja samanya dilakukan dengan negara-negara yang sama-sama khawatir akan kebangkitan China seperti US, Jepang dan Rusia. Sedangkan strategi China pada akhirnya malahan akan menimbulkan *security dilemma* di kawasan yang dapat memperburuk sengketa di LCS dan menjadikan LCS sebagai panggung perang kepentingan antara China-Vietnam sebagai pengklaim dan negara-negara major power yang terlibat dalam sengketa ini.

Gambar 4.2. Matriks Temuan Bab 4



BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagai hasil dari upaya menganalisis pengaruh komponen geopolitik terhadap sengketa teritorial antara China – Vietnam periode 2009 sampai 2011, peneliti mencoba membuktikan beberapa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Pembuktian hipotesis ini dilakukan dengan menghubungkan antara variabel independen yaitu komponen-komponen geopolitik yang berupa wilayah, energi dan power dengan variabel dependen yaitu sengketa teritorial antara China-Vietnam dan hubungan bilateral keduanya periode 2009 – 2011. Hasil analisis interaksi antara kedua variabel tersebut akan dibahas pada bab ini.

Laut China Selatan merupakan kawasan yang terbagi menjadi empat fitur utama yaitu Kepulauan Pratas, kepulauan Paracel, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield Bank. China-Vietnam merupakan dua negara yang mengklaim keseluruhan fitur di kawasan Laut China Selatan ini. Klaim dari kedua negara ini didasari oleh potensi penting yang dimiliki oleh LCS yaitu letaknya yang strategis sebagai jalur komunikasi laut yaitu Sea Lanes of Communication (SLOC) yang menghubungkan kawasan Eropa dan Asia, kawasan Asia Timur dengan Samudera Hindia dan Timur Tengah dan memiliki beberapa jalur laut di Laut China Selatan yaitu Selat Malaka dan Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok dan Makasar yang merupakan jalur perkapalan tersibuk di dunia. Potensi yang kedua dari LCS adalah potensi ekonomis ditunjukkan dengan banyaknya sumber daya alam hayati (ikan) maupun non-hayati (penemuan minyak dan gas) di kawasan ini. Selain itu, kawasan LCS menjadi penanda batas wilayah kedaulatan masing-masing negara pengklaim. Maka tidak heran bila kawasan ini tidak pernah sepi dari sengketa antar negara pengklaim khususnya China dan Vietnam.

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memperoleh temuan-temuan sebagai berikut.

Pertama, faktor wilayah khususnya indikator kedekatan kawasan sengketa (Kepulauan Spratly dan Paracel) dengan China-Vietnam sangat berpengaruh terhadap konflik di Laut China Selatan antara China dan Vietnam pada periode 2009 sampai 2011. Dari pengukuran jarak kedekatan wilayah, terlihat bahwa kedekatan Vietnam dengan kawasan sengketa mempengaruhi klaim kepemilikan atas kawasan LCS. Dapat dilihat bahwa hasil penghitungan jarak Vietnam dengan kawasan sengketa dikurangi dengan batas ZEE yaitu 371 km, menunjukkan nilai klaim kepemilikan dengan angka negatif dan positif yang nilainya lebih besar daripada nilai klaim kepemilikan China. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam memiliki klaim kepemilikan yang lebih tinggi dari pada China sehingga tetap melaksanakan aktivitas ekonomi di kawasan sengketa meskipun menghadapi resiko atas berbagai tindakan China seperti penangkapan kapal, pengrusakan dan pelarangan.

Sementara itu, indikator panjang garis pantai juga memberi pengaruh terhadap konflik karena semakin panjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa, maka semakin besar resiko yang akan dihadapi negara tersebut bila terjadi perang atau konflik berskala besar di kawasan tersebut. Artinya resiko untuk menjadi negara gagal akibat terputusnya akses ke dunia internasional melalui garis pantai yang berbatasan dengan daerah sengketa menjadi semakin tinggi. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, Vietnam 13 kali lebih beresiko daripada China apabila terjadi sengketa di kawasan pantai yang berbatasan langsung dengan LCS. Panjang garis pantai Vietnam yang memiliki tingkat *exposure* tinggi terhadap serangan merupakan kerentanan (*vulnerability*) sehingga mudah mengalami ancaman (*threat*) dari berbagai tindakan yang mungkin dilakukan panjang apabila terjadi perang atau konflik berskala besar dan perang di masa depan. Dengan melihat berbagai insiden di laut China Selatan sepanjang periode 2009 sampai 2011 yang diwarnai dengan penangkapan kapal, pengrusakan peralatan eksplorasi dan pelarangan kegiatan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa komponen wilayah yang terdiri dari klaim kepemilikan dan resiko negara pengklaim sangat mempengaruhi semakin memanasnya konflik di LCS.

Kedua, komponen energi mempengaruhi konflik karena adanya risiko terjadinya kelangkaan energi akibat tingkat pemenuhan kebutuhan energi yang rendah atau berada di bawah 100 persen. Berdasarkan penghitungan rasio produksi dengan konsumsi energi hidrokarbon China dan Vietnam periode 2009 sampai 2011, maka dapat dilihat bahwa China merupakan negara dengan tingkat konsumsi energi yang lebih besar daripada Vietnam. Akan tetapi, tingkat produksi energi China selalu lebih kecil daripada produksinya, yang menjadikan negara ini sebagai net importer terbesar kedua di dunia. Dengan keadaan semacam ini, China memiliki potensi untuk melakukan eksplorasi energi khususnya minyak dan gas alam ke kawasan yang kaya akan minyak dan gas alam seperti di Laut China Selatan. Hal ini dikarenakan China akan mengalami kelangkaan energi apabila kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan produksi energi global yang menipis. China yang membutuhkan sumber daya migas yang lebih besar daripada Vietnam karena produksinya tidak mencukupi kebutuhan domestik, dapat bertindak sangat agresif di kawasan LCS. Mengingat perkiraan potensi energi yang besar di LCS yang dapat menyokong kemajuan China, maka China mulai melarang beberapa perusahaan besar yang akan berinvestasi energi dengan Vietnam khususnya di lepas pantai LCS. Oleh karena itu, pelarangan yang dilakukan China ini berpotensi menimbulkan protes keras dari Vietnam yang menunjukkan adanya eskalasi konflik.

Ketiga, komponen power dalam geopolitik mempengaruhi eskalasi konflik di kawasan Laut China Selatan pada periode 2009 – 2011 dipandang dari tiga hal yaitu peningkatan kapabilitas maritim, tingkat agresivitas dan strategi China-Vietnam untuk mempertahankan klaim di kawasan ini. Dalam hal peningkatan kapabilitas maritim, China memiliki kekuatan maritim yang lebih besar daripada Vietnam dengan kepemilikan senjata baik jumlah maupun jenisnya. Oleh karena itu, China cenderung melakukan tindakan – tindakan provokatif sepanjang tahun 2009 sampai 2011 di LCS terhadap Vietnam karena memiliki *backing* berupa sistem persenjataan canggih. Sedangkan dalam hal tingkat agresivitas, China lima kali lebih agresif daripada Vietnam dilihat dari berbagai tindakan yang dilakukan bahkan secara

berulang-ulang dalam tiga tahun berturut-turut misalnya dengan mengumumkan pelarangan penangkapan ikan yang telah diprotes berkali-kali Vietnam.

Dalam hal strategi untuk mempertahankan klaim di LCS, Vietnam lebih memilih untuk menginternasionalisasi konflik dengan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan dari dunia internasional sementara China lebih memilih meningkatkan kapabilitas militer dengan meningkatkan anggaran pertahanan, menggelar latihan militer, membeli senjata baru dan mengembangkan sistem persenjataan domestik. Upaya internasionalisasi konflik akan memberikan keuntungan dari pihak Vietnam karena kerja samanya dilakukan dengan negara-negara yang memiliki kekhawatiran sama akan kebangkitan China seperti AS, Jepang dan Rusia. Sedangkan strategi China pada akhirnya malah akan menimbulkan *security dilemma* di kawasan yang dapat memperburuk sengketa di LCS dan menjadikan LCS sebagai panggung perang kepentingan antara China-Vietnam sebagai pengklaim dan negara-negara *major power* yang terlibat dalam sengketa ini. Oleh karena itu, komponen *power* yang ditandai dengan peningkatan kekuatan maritim China, agresivitas China yang tinggi dan strategi untuk mempertahankan klaim yang cenderung tidak kooperatif telah menyebabkan terjadinya eskalasi konflik di laut China Selatan antara China – Vietnam karena berbenturan dengan minimnya kekuatan maritim Vietnam sehingga tidak mampu menghadapi agresivitas China yang berujung pada ketidakmampuan Vietnam membawa China ke meja perundingan bilateral untuk membahas sengketa di LCS.

Dengan demikian secara keseluruhan penelitian ini telah membuktikan bahwa komponen-komponen geopolitik yaitu wilayah, energi dan power memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya eskalasi konflik di kawasan LCS antara China – Vietnam pada periode 2009 sampai 2011.

Selanjutnya, rekomendasi yang ingin disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya keseriusan dari kedua negara untuk melakukan pembahasan penyelesaian masalah perbatasan di LCS yaitu pembentukan *code of conduct* yang mempertimbangkan ketiga komponen geopolitik tersebut.
- b. Dari sudut pandang wilayah, bagi Vietnam dengan tingkat kerentanan yang tinggi, perlu menegaskan perlunya kepatuhan terhadap UNCLOS atas prinsip – prinsip *semi-enclosed sea* yang membutuhkan kerja sama antara negara pantai sehingga meminimalisir penggunaan pendekatan keamanan. Dengan demikian, China dapat terikat oleh kode etik agar tidak melakukan serangan di kawasan sengketa yang dapat menyebabkan Vietnam menjadi *failed state*.
- c. Dari sudut pandang energi, pembuatan *code of conduct* perlu pula mencantumkan keharusan untuk melakukan kerja sama eksplorasi energi untuk memenuhi kebutuhan energi kedua negara yang bersengketa dalam porsi yang disepakati oleh keduanya. Dengan kerja sama eksplorasi energi yang terikat oleh kode etik, maka dapat meminimalisir tindakan agresif China yang ingin memenuhi kebutuhan energi dengan mengeksplorasi keseluruhan LCS, melarang investasi energi di Vietnam dan menyerang kapal-kapal eksplorasi energi Vietnam.
- d. Dari sudut pandang *power*, Vietnam sebagai kekuatan yang asimetris terhadap kekuatan China, perlu melakukan aliansi formal dengan negara-negara besar yaitu AS, Jepang dan Rusia sehingga mampu menaikkan posisi tawarnya di dunia internasional pada umumnya dan di hadapan China pada khususnya. Selain itu, akselerasi modernisasi persenjataan juga diperlukan bagi Vietnam bukan untuk menandingi China, melainkan untuk meningkat patroli penjagaan atas kawasan yang menjadi wilayah Vietnam di laut China Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Addler, E & Michael Barnett. *Security Communities*. (Chapter 6: *Collective identity and conflict management in Southeast Asia* by Amitav Acharya). Cambridge: Cambridge University Press. 1998.
- Anderson, Ewan W. *Geopolitics: International Boundaries as Fighting Places* dalam Gray, Colin S dan Geoffrey Sloan. *Geopolitics: Geography and Strategy*. London: Frank Cass Publishers. 1999.
- Creswell, J. W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches Third Edition*. California: Thousand Oaks.
- Emmers, Ralf. *Geopolitics And Maritime Territorial Disputes In East Asia*. Routledge Security in Asia pacific Series. London and New York: Routledge, 2010.
- Huth, Paul K dan Allee, Todd L. *The Democratic Peace and Territorial Conflict In The 20th Century*. Cambridge: Cambridge University Press. 2002.
- Min Gyo Koo. *Island Disputes and Maritime Regime Building in East Asia Between a Rock and a Hard Place*. London: Springer Science + Business Media, LLC. 2009.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 3rd ed*. MA: Allyn & Bacon, 1991.
- Prasetya Irawan. 2003. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Ras, Abdul Rivai. *Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik Sudut Pandang Indonesia*. Jakarta: Yayasan Abdi Persada Siporennu Indonesia, Spers Mabes TNI AL. 2001

Viotti, P.R., and Mark V. Kauppi. *International Relations Theory 4th edition*. New York : Pearson Education, Inc.2010.

Catley, B. & Keliat, M. (1997). *Spratlys: The dispute in the South China Sea*. Brookfield, VT.: Ashgate Publishing Limited.

Nye, Joseph S. *The Future of Power*. New York: Public Affairs. 2011.

Buzan, Barry. *The Arms Dynamics in World Politics*. London: Lynne Rienner. 1998

Jurnal

Fahrudin, Wawan. *Sekuritisasi maritim dan wilayah perbatasan dalam jurnal Institute For Global Justice* edisi Maret 2007 hal. 16-18.

Manicom, James. *IR Theory and Asia's Maritime Territorial Disputes*. School of Political and International Studies . Flinders University. Refereed paper presented to the Australasian Political Studies Association Conference University of Newcastle 25-27 September 2006

Cheng, Joseph Y. S. *Sino-Vietnamese Relations in the Early Twenty-first Century: Economics in Command?* Asian Survey, Vol. 51, Number 2, pp. 379-405. 2011

Walt, Stephen M. *Alliance Formation and the Balance of World Power*. International Security, Vol 9, No. 4 (Spring, 1985), 3 – 43.

Thayer, Carlyle A. *The Tyranny of Geography: Vietnamese Strategies to Constrain China in the South China Sea*. Contemporary Southeast Asia Vol. 33, No. 3 (2011), pp. 348-69

Valencia, Mark J. *A Maritime Security Regime for Northeast Asia*. ASIAN PERSPECTIVE, Vol. 32, No. 4, 2008, pp. 157-180.

- Womack, Brantly. *Asymmetry Theory and China's Concept of Multipolarity*. Journal of Contemporary China (2004), 13(39), May, 351–366. Carfax Publishing, Taylor & Francis Group
- Wright, Quincy. *The escalation of international conflicts. The Journal of Conflict Resolution (pre-1986)*; Dec 1965; pg. 434
- BA, Alice D. *Staking Claims and Making Waves in the South China Sea: How Troubled Are the Waters?* Contemporary Southeast Asia Vol. 33, No. 3 (2011), pp. 269–91
- Emmers, Ralf. *Maritime Disputes in the South China Sea: Strategic and Diplomatic Status Quo*. WP no. 87. Institute of Defence and Strategic Studies. Singapore. 2005
- Bateman, Sam. *Regime building in the South China Sea – current situation and outlook*. *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs* (2011) Vol 3(1)
- Tonnesson, Stein. *Vietnam's objective in the South China sea: National or regional security?* Contemporary Southeast Asia; Apr 2000; 22, 1; ProQuest.
- Thayer, Carlyle A. *Vietnam and The Rising China: The Structural Dynamics of Mature Asymmetry*. Southeast Asian Affairs. 2010
- Womack, Brantly. *Asymmetry Theory and China's Concept of Multipolarity*. Journal of Contemporary China (2004), 13(39), May, 351–366. Carfax Publishing, Taylor & Francis Group
- Prabhakar. Lawrence . *The Evolving Geopolitics in the South China Sea*. Paper presented or Seminar on South China Sea held by CASS and The Habibie Centre. Jakarta, 31 Mei 2011
- Thayer, Carlyle A. *Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses*. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 30, 2, 77-104. 2011.

Dokumen lain

Buszynski, Leszek. *Can the South China Sea Dispute be resolved? ASEAN's choices before an assertive China*. Paper presented or Seminar on South China Sea held by CASS and The Habibie Centre. Jakarta, 31 Mei 2011

Emmers, Ralf. *The Changing Power Distribution in the South China Sea: Implication for Conflict Management and Avoidance*. RSIS Working Paper No. 183. RSIS. Singapore. 30 September 2009.

Glogan, Timothy. *China's 'Assertive' South China Sea Policy And Rhetoric: Proactive, Reactive Or Myth?*, Centre for East Asian Studies Faculty of Social Sciences, University of Turku, Juni 2011.

Rommel C. Banloi. *Renewed Tensions and Continuing Maritime Security Dilemma in the South China Sea: A Philippine Perspective*. Dalam *The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development*. Diplomatic Academy of Vietnam. 2011.

Storey, Ian. *Hardening Positions over Dangerous Grounds: Recent Developments in the South China Sea Dispute*. Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore. CSIS Conference on Maritime Security in the South China Sea. June 20-21, 2011, Washington D.C.

Calvo, Alex. *Japan-Vietnam defence agreement*. Center for Strategic Studies of Catalonia. 10 November 2011.

Military Balance 2011, London: Routledge

Dokumentasi Kemenko Polhukam, tanggal 13 Januari 2012

Collier's Encyclopedia, Vol. 10, 1962

SIPRI Yearbook 2011

Publikasi elektronik

<http://www.nytimes.com/2011/06/11/world/asia/11vietnam.html>

<http://www.voanews.com/english/news/asia/China-Irks-Neighbors-as-Tensions-Rise-in-South-China-Sea-123197918.html>

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MF09Ae01.html

http://www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45%3Aarticle2&catid=1%3Alatest-news&limitstart=1

South China Sea warning casts shadow over US-China dialogue.

<http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1101&MainCatID=&id=20110623000095>>

<http://socgeo.ruhosting.nl/html/files/geoapp/Werkstukken/Geopolitics.pdf>

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/images/south-china-sea-claims3.gif>

www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm

<http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1101&MainCatID=&id=20110623000095>

<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2020721,00.html#ixzz1Qq1mt22S>

Conflict in the South China Sea: China's Relations with Vietnam and the Philippines

oleh Ian Storey. April 30, 2008. Dapat diakses melalui <http://www.japanfocus.org/-Ian-Storey/2734>

<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-16181-4106202803-Chapter1.pdf>

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=7457&type=99

Energy Information Administration. *South China Sea: Country Analysis Briefs.*

http://www.eia.gov/cabs/South_China_Sea/pdf.pdf

Phy, Sopheada. *Peace and Conflict Monitor ANALYSIS II: The Management Of The*

Spratly Islands Conflict: Success Or Failure? June 02, 2009 dapat diakses pada situs http://www.monitor.upeace.org/printer.cfm?id_article=623

--, *China, What's Next?* Diakses dari <http://the-diplomat.com/whats-next-china/vietnam/>

McCornac, Dennis C. Vietnam's Relations with China: A Delicate Balancing Act.

Diakses

dari

http://www.chinacurrents.com/Vol10_No2_2011/cc_mccornac.htm

--, BBC Monitoring Asia Pacific, VNA news agency website, Hanoi, in English 14

Jul 10/BBC Monitoring/BBC diakses melalui.

<http://search.proquest.com/docview/610120035?accountid=132811>

Amer, Ramses. *The Sino Vietnamese Approach to Managing Border Disputes – Lessons, Relevance and Implications for the SCS Situation* diakses melalui

www.southchinaseastudies.org

<http://factsanddetails.com/china.php?itemid=1902>

US Energy Information Administration. *Country Analysis Brief: Vietnam*, data diperbarui pada 9 Mei 2012, diunduh melalui www.eia.doe.gov

International Energy Agency (IEA) diakses melalui www.iea.org

US Energy Information Administration (US EIA). *Country Analysis Brief: China Energy Data, Statistics and Analysis - Oil, Gas, Electricity, Coal data*, November 2010, diakses melalui www.eia.doe.gov

Jing-jing, Huang. *Chinese navy fleet completes largest-ever training in Pacific*.

<http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1101&MainCatID=11&id=20110625000003>

VIETNAM/CHINA: *Popular anger heightens tension at Sea* Oxford Analytica Daily Brief Service. (Jun 30, 2011).

<http://search.proquest.com/docview/874584074?accountid=132811>